

LAPORAN *SURVEILLANCE*
PERBANKAN INDONESIA
LSPI
TW I 2024

LAPORAN *SURVEILLANCE* PERBANKAN INDONESIA

TW I 2024

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kata Pengantar

Dian Ediana Rae

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan - Otoritas Jasa Keuangan



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan *Surveillance* Perbankan Indonesia Triwulan I-2024 ini dapat diselesaikan dengan baik. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun atas jerih payahnya sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Kami berharap agar pembaca dan pengguna laporan ini dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari data dan informasi maupun analisis/ulasan yang disajikan.

Laporan *Surveillance* Perbankan Indonesia Triwulan I-2024 ini memuat *overview* dan analisis kondisi perekonomian global maupun domestik, serta kaitannya terhadap perkembangan kinerja, penyaluran kredit dan/atau pembiayaan, dan profil risiko yang dihadapi perbankan. Selain itu, dalam laporan ini tercakup juga kebijakan perbankan yang diterbitkan oleh OJK pada periode laporan, perkembangan kelembagaan perbankan, serta koordinasi antar lembaga terkait perbankan. Pada laporan ini juga disajikan pembahasan khusus dengan topik “Andil Fungsi Intermediasi Perbankan dalam Menanggulangi Dampak Risiko Berlanjutnya Tekanan Gejolak Ekonomi Global dan Suku Bunga Tinggi terhadap Kinerja Korporasi”.

Secara umum, pada periode laporan, kondisi perekonomian global masih terdivergensi dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Sejalan dengan kondisi di beberapa negara yang masih cukup resilien, utamanya di AS dan negara *emerging markets*, IMF dalam *World Economic Outlook* (WEO) April 2024 memproyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 tumbuh sebesar 3,2% (yoy) stabil dari pertumbuhan tahun 2023 dan sedikit lebih tinggi dari perkiraan pada WEO Januari 2024 sebesar 3,1% (yoy). Sedangkan untuk perkiraan pertumbuhan ekonomi pada 2025 tidak berubah dari perkiraan sebelumnya yaitu sebesar 3,2% (yoy). Ketidakpastian pasar keuangan global pada awal tahun 2024 masih cukup tinggi, antara lain dipengaruhi oleh laju penurunan inflasi global yang masih tertahan khususnya inflasi di negara maju seperti AS yang masih berada di atas targetnya. Hal tersebut mendorong The Fed mempertahankan suku bunga *Fed Funds Rate* (FFR) tinggi dalam jangka waktu lama (*high for longer*) dan diperkirakan baru melakukan pemangkasan FFR pada semester II 2024. Selain itu, perlu diperhatikan pula faktor risiko seperti perkembangan konflik geopolitik di Timur tengah dan Ukraina serta gangguan jalur perdagangan di laut merah yang berpotensi memicu peningkatan harga komoditas dan inflasi ke depan. Di tengah perkembangan global tersebut, pada triwulan I-2024 ekonomi domestik mampu tumbuh kuat sebesar 5,11% (yoy), meningkat dari 5,04% (yoy) pada triwulan IV-2023. Pertumbuhan didorong oleh masih kuatnya konsumsi domestik dan investasi, serta naiknya ekspor dan pengeluaran pemerintah.

Ekonomi domestik yang tetap kuat juga tecermin pada indikator perbankan sebagaimana terlihat pada pertumbuhan kredit (bank umum) yang masih cukup baik yaitu sebesar 12,40% (yoy), meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya (9,93%, yoy). Pertumbuhan kredit tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi domestik dari 5,04% (yoy) pada triwulan I-2023 menjadi 5,11% (yoy) pada triwulan I- 2024. Hal ini didorong oleh permintaan yang solid tecermin pada pertumbuhan konsumsi dan investasi serta tumbuhnya pengeluaran pemerintah. Di sisi lain, DPK juga masih tumbuh yaitu sebesar 7,44% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya (7,00%, yoy) sehingga menjadi salah satu faktor pendorong terjaganya likuiditas perbankan. Hal ini tecermin dari tetap tingginya rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 121,05% dan 27,18%. Tingkat permodalan juga cukup solid dengan CAR sebesar 25,96% meskipun menurun dari tahun sebelumnya didorong oleh pertumbuhan ATMR yang tumbuh 11,49% (yoy), sejalan dengan pertumbuhan kredit, dan melampaui pertumbuhan modal. Risiko kredit juga terpantau membaik dengan rasio NPL *gross* yang menurun menjadi sebesar 2,25% dan NPL *net* sedikit meningkat menjadi 0,77%. Sejalan dengan kinerja bank umum, kinerja BPR dan BPRS juga cukup baik dengan pertumbuhan kredit/pembiayaan yang melambat namun DPK meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio permodalan juga cukup kuat dengan CAR BPR dan BPRS masing-masing sebesar 32,60% dan 23,57%.

Ke depan, tetap perlu diperhatikan risiko perbankan utamanya risiko pasar dan risiko likuiditas di tengah masih tingginya ketidakpastian global seperti risiko suku bunga global yang masih tinggi, perkembangan ekonomi Tiongkok, serta kenaikan tensi geopolitik yang dapat berpotensi meningkatkan tekanan ekonomi domestik. Adapun potensi peningkatan risiko kredit paskaberakhirnya masa relaksasi kredit restrukturisasi terkait Covid-19 pada akhir Maret 2024 secara umum sudah dapat dimitigasi, mengingat bank sudah membentuk cadangan yang cukup dan jumlah eksposur kredit restrukturisasi terkait Covid-19 yang sudah jauh menurun. Namun demikian, bank diminta untuk tetap melakukan pengawasan dan *monitoring* yang ketat untuk mencegah timbulnya pemburukan kredit di masa depan. Selain itu, perbankan juga didorong untuk meningkatkan daya tahannya melalui penguatan permodalan dan menjaga *coverage* CKPN secara memadai. Untuk memastikan kelancaran normalisasi kebijakan relaksasi restrukturisasi, perbankan tetap dapat melanjutkan restrukturisasi kredit Covid-19 yang sudah berjalan. Sedangkan permintaan restrukturisasi kredit baru dapat dilakukan dengan mengacu pada kebijakan normal yang berlaku tentang Kualitas Aset. Dalam rangka mengukur ketahanan bank, OJK meminta agar bank secara rutin melakukan *stress test* kekuatan permodalannya untuk mengukur kemampuannya dalam menyerap potensi penurunan kualitas kredit restrukturisasi.

OJK senantiasa berupaya memperkuat mitigasi risiko secara berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ke depan dengan melakukan peningkatan kualitas pengawasan dibarengin penguatan regulasi. Dalam hal penguatan regulasi, pada periode laporan OJK menerbitkan ketentuan perbankan berupa tiga POJK dan juga diterbitkan satu Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) di antaranya terkait dengan Penyesuaian Batas Waktu Penyampaian Laporan Perbankan dan Laporan Debitur melalui SLIK Tahun 2024. Sementara itu, OJK juga aktif berkoordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas terkait dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.

OJK terus mencermati perkembangan volatilitas ekonomi global dan dampaknya kepada ekonomi domestik serta perbankan Indonesia. Hal tersebut dilakukan seiring dengan pengawasan perbankan secara individual yang intensif dan berkelanjutan yang diharapkan mampu menjaga stabilitas sistem keuangan dan perbankan Indonesia pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Selanjutnya, OJK juga meminta bank-bank agar terus memperhatikan aspek kehati-hatian (*prudential banking*), profesionalisme, inovatif, dan selalu menjaga integritas untuk bisa mencapai pertumbuhan yang tinggi dan sehat.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi semua niat baik yang kita upayakan bersama, termasuk melalui penyampaian laporan ini. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Jakarta, Juli 2024



Dian Ediana Rae

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Box	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	viii
Ringkasan Eksekutif	ix
Infografis	xi

Bab 1

Overview dan Analisis Perekonomian Global dan Domestik

1. Perekonomian Global	3
2. Perekonomian Domestik	6

Bab 2

Kinerja Industri Perbankan Nasional

1. Kinerja Bank Umum	21
2. Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR)	27
3. Kinerja Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)	29

Bab 3

Penyaluran Kredit/Pembiayaan Perbankan

A. Penyaluran Kredit/Pembiayaan Bank Umum (BUK dan BUS)	35
1. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi	35
2. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Lokasi Proyek (Spasial)	38
3. Perkembangan Penyaluran Kredit/Pembiayaan UMKM	40
B. Penyaluran Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS	42
1. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi	42
2. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Lokasi (Spasial)	43

Daftar Box

Boks 1. Andil Fungsi Intermediasi Perbankan dalam Menanggulangi Dampak Risiko Berlanjutnya Tekanan Gejolak Ekonomi Global dan Suku Bunga Tinggi terhadap Kinerja Korporasi	11
--	----

Bab 4

Profil Risiko Perbankan

1. Risiko Kredit	47
2. Risiko Pasar	56
3. Risiko Likuiditas	59
4. Risiko Hukum	61

Bab 5

Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

1. Pengaturan Perbankan	65
2. Kelembagaan Perbankan	67

Bab 6

Koordinasi Antar Lembaga terkait Perbankan

1. Koordinasi Multi-Lembaga dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan	75
2. Koordinasi Bilateral	77
3. Partisipasi OJK dalam Fora Internasional	78

Lampiran

I. Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko	87
II. <i>Glossary</i>	89

Daftar Tabel

Tabel 1 Indikator Umum Bank Umum	21
Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset Bank Umum	22
Tabel 3 Perkembangan Aset Bank Umum berdasarkan Kelompok Kepemilikan	22
Tabel 4 DPK Bank Umum berdasarkan Kelompok Kepemilikan Bank	24
Tabel 5 Penyebaran DPK Bank Umum berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar	24
Tabel 6 Komponen ATMR Bank Umum	26
Tabel 7 Rasio Keuangan Bank Umum	26
Tabel 8 Rasio Permodalan dan Rentabilitas Bank Umum	26
Tabel 9 Perkembangan Kinerja BPR dan BPRS	27
Tabel 10 Indikator Umum BPR	28
Tabel 11 Indikator Umum BPRS	30
Tabel 12 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi	36
Tabel 13 Rincian Kredit/Pembiayaan Bank Umum pada Sektor Rumah Tangga	37
Tabel 14 Porsi Kredit/Pembiayaan berdasarkan Sektor Ekonomi menurut Lokasi (Spasial)	40
Tabel 15 Kredit/Pembiayaan UMKM berdasarkan Kelompok Bank	41
Tabel 16 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan BPR/BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi	43
Tabel 17 Persebaran Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS menurut Lokasi (Spasial)	43
Tabel 18 Perkembangan Kualitas Kredit	49
Tabel 19 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan	49
Tabel 20 Rasio NPL <i>Gross</i> per Jenis Penggunaan	49
Tabel 21 Rasio NPL <i>Gross</i> berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank	50
Tabel 22 NPL <i>Gross</i> Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi Periode Maret 2024	56
Tabel 23 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan berdasarkan Kategori	58
Tabel 24 Perkembangan LCR Perbankan	60
Tabel 25 Statistik Penanganan Penyimpangan Ketentuan Perbankan	61
Tabel 26 Pemberian Keterangan Ahli/Saksi	61
Tabel 27 Jaringan Kantor BUK	68
Tabel 28 Jaringan Kantor BPR	69
Tabel 29 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah	71
Tabel 30 Jaringan Kantor BPRS	71

Daftar Grafik

Grafik 1 Inflasi Konsumen	3
Grafik 2 Suku Bunga Acuan	4
Grafik 3 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara	5
Grafik 4 PMI Manufaktur Beberapa Negara	5
Grafik 5 Perkembangan Harga Komoditas	6
Grafik 6 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Pengeluaran	6
Grafik 7 Pertumbuhan Nilai Ekspor dan Impor	8
Grafik 8 Neraca Perdagangan Indonesia	8
Grafik 9 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Lapangan Usaha	9
Grafik 10 Perkembangan Aset Bank Umum	22
Grafik 11 Tren Pertumbuhan DPK per Komponen	23
Grafik 12 Pergerakan DPK berdasarkan Valuta	23
Grafik 13 Kredit per Valuta	25
Grafik 14 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan	25
Grafik 15 Perkembangan Aset BPR	28
Grafik 16 Perkembangan DPK BPR	28
Grafik 17 Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan	29
Grafik 18 Tren Aset BPRS	30
Grafik 19 Tren Pertumbuhan DPK BPRS	30
Grafik 20 Tren ROA dan BOPO BPRS	31
Grafik 21 Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi	37
Grafik 22 Persebaran Kredit/Pembiayaan Bank Umum menurut Lokasi (Spasial)	40
Grafik 23 Penyebaran Kredit/Pembiayaan UMKM	41
Grafik 24 Tren Rasio NPL <i>Gross</i> dan NPL <i>Net</i>	47
Grafik 25 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit	47
Grafik 26 Pertumbuhan CKPN	48
Grafik 27 Tren Kredit Restrukturisasi terkait COVID-19	48
Grafik 28 Tren NPL <i>Gross</i> per Sektor Ekonomi	53
Grafik 29 Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi	53
Grafik 30 Tren Rasio NPL <i>Gross</i> berdasarkan Lokasi Proyek (Spasial)	56
Grafik 31 Dolar Index dan VIX Index	57
Grafik 32 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar	57
Grafik 33 <i>Spread Yield</i> UST dan SBN	57
Grafik 34 Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia	58
Grafik 35 Potensi Keuntungan/Kerugian Kepemilikan Surat Berharga Perbankan	58
Grafik 36 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan (FVTPL dan FVTOCI) berdasarkan Tenor	58
Grafik 37 Perkembangan Parameter IRRBB	59
Grafik 38 LDR berdasarkan Valuta	59
Grafik 39 AL/NCD dan AL/DPK	60
Grafik 40 Perkembangan LCR dan NSFR	60
Grafik 41 Perkembangan Suku Bunga PUAB	61
Grafik 42 Penyebaran Jaringan Kantor BUK	68
Grafik 43 Penyebaran Jaringan Kantor BPR	69
Grafik 44 Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	70
Grafik 45 Jumlah BPRS berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	70
Grafik 46 Penyebaran Jaringan Kantor BUS	71
Grafik 47 Penyebaran Jaringan Kantor BPRS	71

Ringkasan Eksekutif

Pada triwulan I-2024, kondisi perekonomian global cenderung membaik meski dengan pertumbuhan ekonomi beberapa negara yang masih terdivergensi. Ekonomi Eropa, UK dan Tiongkok tumbuh meningkat di luar ekspektasi, namun AS justru tumbuh melambat dari triwulan sebelumnya. Sejalan dengan kondisi beberapa negara yang masih cukup resilien, utamanya AS dan negara *emerging markets*, IMF dalam *World Economic Outlook* (WEO) April 2024 memproyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 tumbuh sebesar 3,2% (yoy) stabil dari pertumbuhan tahun 2023 dan sedikit lebih tinggi dari perkiraan pada WEO Januari 2024 sebesar 3,1% (yoy). Sedangkan untuk perkiraan pertumbuhan ekonomi pada 2025 tidak berubah dari perkiraan sebelumnya yaitu sebesar 3,2% (yoy). Ketidakpastian pasar keuangan global pada awal tahun 2024 masih cukup tinggi antara lain dipengaruhi oleh laju penurunan inflasi global yang masih tertahan khususnya inflasi di negara maju seperti AS yang masih berada di atas targetnya. Hal tersebut mendorong The Fed mempertahankan suku bunga *Fed Funds Rate* (FFR) tinggi dalam jangka waktu lama (*high for longer*) dan diperkirakan baru melakukan pemangkasan FFR pada semester II 2024. Selain itu, perlu diperhatikan juga faktor risiko seperti perkembangan konflik geopolitik di Timur tengah dan Ukraina serta gangguan jalur perdagangan di laut merah yang berpotensi memicu peningkatan harga komoditas dan inflasi ke depan. Di tengah perkembangan global tersebut, pada triwulan I-2024 ekonomi domestik mampu tumbuh kuat sebesar 5,11% (yoy), meningkat dari 5,04% (yoy) pada triwulan IV-2024. Pertumbuhan didorong oleh masih kuatnya konsumsi domestik dan investasi, serta naiknya ekspor dan pengeluaran pemerintah.

Ekonomi domestik yang tetap kuat juga terekam pada indikator perbankan sebagaimana terlihat pada pertumbuhan kredit (bank umum) yang masih cukup baik yaitu sebesar 12,40% (yoy) meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya (9,93%, yoy). Pertumbuhan kredit tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi domestik dari 5,04% (yoy) pada triwulan I-2023 menjadi 5,11% (yoy) pada triwulan I- 2024. Hal ini didorong oleh permintaan yang solid tecermin pada pertumbuhan konsumsi dan investasi serta tumbuhnya pengeluaran pemerintah. Di sisi lain, DPK juga masih tumbuh yaitu sebesar 7,44% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya (7,00%, yoy) sehingga menjadi salah satu faktor pendorong terjaganya likuiditas perbankan. Hal ini tecermin dari tetap tingginya rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 121,05% dan 27,18%. Tingkat permodalan juga cukup solid dengan CAR sebesar 25,96% meskipun menurun dari tahun sebelumnya didorong oleh pertumbuhan ATMR yang tumbuh 11,49% (yoy), sejalan dengan pertumbuhan kredit, dan melampaui pertumbuhan modal. Risiko kredit juga terpantau membaik dengan rasio NPL *gross* yang menurun menjadi sebesar 2,25% dan NPL *net* sedikit meningkat menjadi 0,77%. Sejalan dengan kinerja bank umum, kinerja BPR dan BPRS juga cukup baik dengan pertumbuhan kredit/pembiayaan yang melambat namun DPK meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio permodalan juga cukup kuat dengan CAR BPR dan BPRS masing-masing sebesar 32,60% dan 23,57%. Untuk menjaga ketahanan industri perbankan, OJK senantiasa berupaya meningkatkan mitigasi risiko secara berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas pengawasan dibarengi penguatan regulasi. Dalam penguatan regulasi, pada periode laporan, OJK menerbitkan ketentuan perbankan berupa tiga POJK, disertai penerbitan satu Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP). OJK juga aktif berkoordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas terkait, baik secara bilateral maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

INFOGRAFIS

Laporan *Surveillance* Perbankan Indonesia

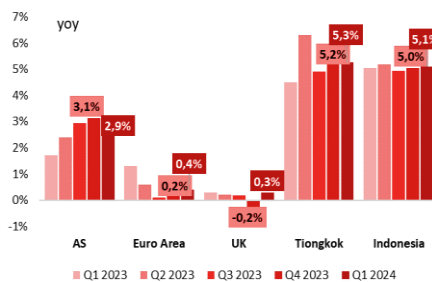
Triwulan I 2024

Ekonomi Global

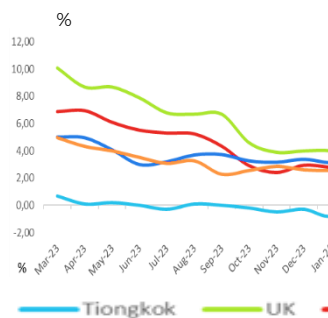


- Kondisi perekonomian global cenderung divergen dan masih dibayangi tensi geopolitik di Timur Tengah dan Rusia-Ukraina. Perekonomian Tiongkok dan Eropa tumbuh meningkat, diikuti UK yang meningkat setelah sebelumnya berkontraksi, sementara AS mengalami perlambatan.
- IMF dalam *World Economic Outlook* (WEO) April 2024 memproyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 dan tahun 2024 akan tumbuh stabil sebesar 3,2% (yoy), sedikit lebih tinggi dari perkiraan pada WEO Januari 2024 masing-masing sebesar 3,1% (yoy) pada 2023 dan 2024.
- Pergerakan dan kondisi pasar keuangan global pada triwulan I-2024 masih dipengaruhi oleh *stance* kebijakan moneter bank sentral untuk mempertahankan suku bunga acuannya lebih lama (*high for longer*), sejalan dengan tingkat inflasi yang masih belum mencapai target meski mulai melandai.

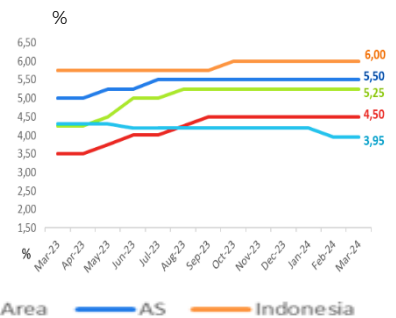
Pertumbuhan Ekonomi



Inflasi Global



Suku Bunga Global

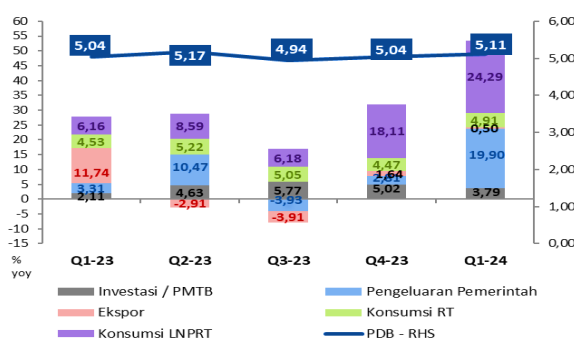


Ekonomi Domestik

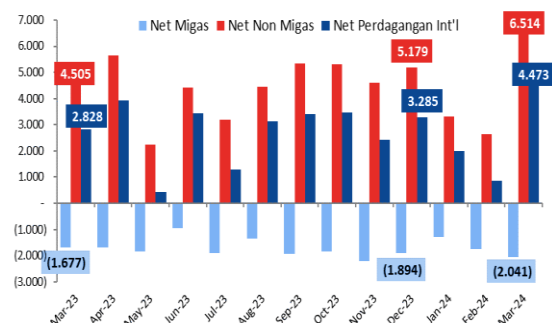
- Ekonomi Indonesia tetap resilien dan tumbuh kuat sebesar 5,11% (yoy) pada triwulan I-2024, meningkat dari 5,04% (yoy) pada triwulan IV-2023 dan triwulan I-2023. Tetap kuatnya pertumbuhan ekonomi domestik didorong oleh permintaan yang solid tecermin pada pertumbuhan konsumsi dan investasi serta tumbuhnya pengeluaran pemerintah.
- Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan didorong oleh sektor konstruksi dan sektor pertambangan. Selain itu, sektor transportasi dan perdagangan serta PAMM juga tumbuh tinggi sejalan dengan meningkatnya mobilitas menjelang Momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri dan naiknya keyakinan konsumen yang mendorong konsumsi masyarakat.



PDB Indonesia



Neraca Perdagangan Indonesia



INFOGRAFIS

Laporan *Surveillance* Perbankan Indonesia

Triwulan I 2024

KINERJA



Aset

8,38% (yoy)

8,16% (yoy)

Rp11.876 T



DPK

7,00% (yoy)

7,44% (yoy)

Rp8.601 T



Kredit

9,93% (yoy)

12,40% (yoy)

Rp7.245 T



CAR

27,09%

25,96%



ROA

2,77%

2,62%

TW I-23

TW I-24



Bank Umum



Bank Umum
Konvensional



Bank Umum
Syariah

7,80% (yoy)

7,97% (yoy)

Rp11.272 T

6,38% (yoy)

7,34% (yoy)

Rp8.124 T

9,22% (yoy)

12,30% (yoy)

Rp6.866 T

27,14%

25,98%

2,80%

2,65%

20,83% (yoy)

11,83% (yoy)

Rp604 T

19,08% (yoy)

9,14% (yoy)

Rp477 T

24,81% (yoy)

14,28% (yoy)

Rp378 T

26,01%

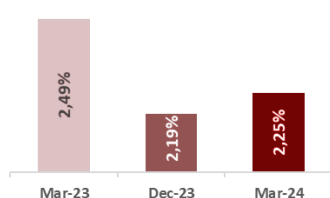
25,66%

2,18%

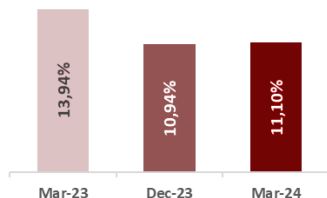
2,03%

Risiko Kredit

NPL Gross

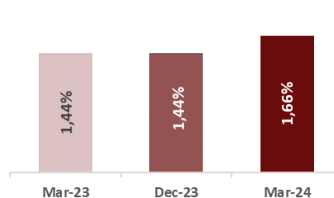


LaR



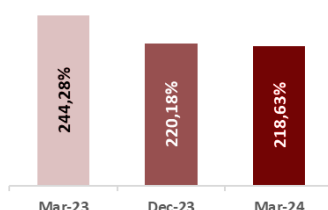
Risiko Pasar

PDN

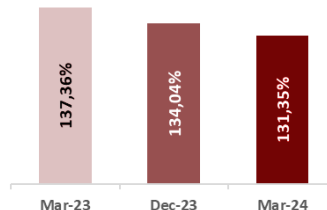


Risiko Likuiditas

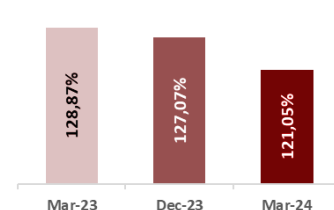
LCR



NSFR



AL/NCD

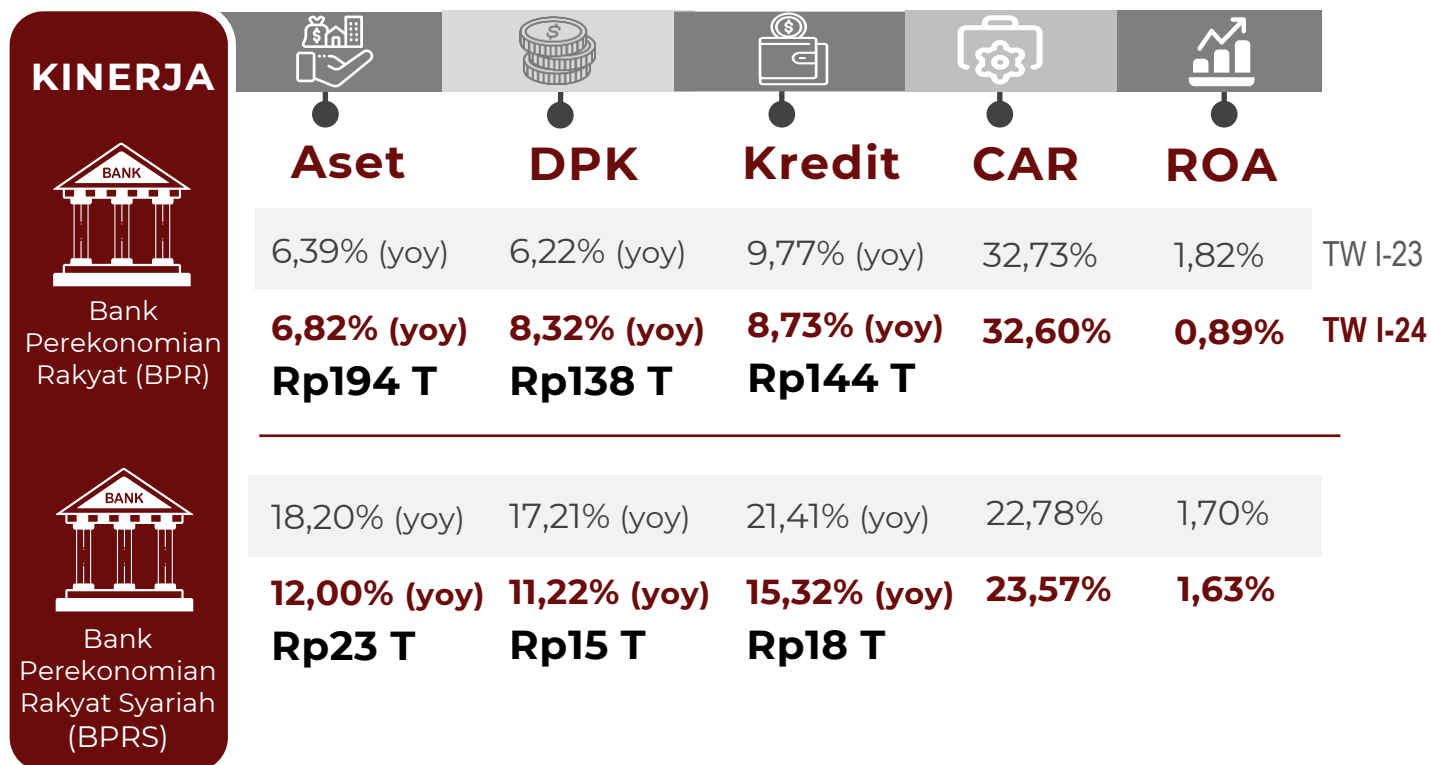


**PROFIL
RISIKO
BANK
UMUM**

INFOGRAFIS

Laporan *Surveillance* Perbankan Indonesia

Triwulan I 2024



KETENTUAN PERBANKAN PADA TRIWULAN I 2024

KETENTUAN	PERIHAL	TANGGAL PENETAPAN	OBJEK PENGATURAN
POJK Nomor 1 Tahun 2024	Pengembangan Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat	11 Januari 2024	BPR
POJK Nomor 2 Tahun 2024	Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	16 Februari 2024	BUS dan UUS
POJK Nomor 5 Tahun 2024	Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum	27 Maret 2024	Bank Umum

Halaman ini sengaja dikosongkan

1 Overview dan Analisis Perekonomian Global dan Domestik

Halaman ini sengaja dikosongkan

1 Overview dan Analisis Perekonomian Global dan Domestik

Pada triwulan I-2024, pertumbuhan ekonomi antarnegara masih terdivergensi dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Sejalan dengan itu, ekonomi domestik tumbuh lebih baik dari triwulan sebelumnya didorong masih kuatnya konsumsi domestik dan investasi, serta naiknya ekspor dan pengeluaran pemerintah.

1. Perekonomian Global

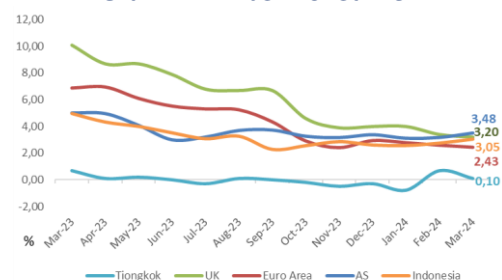
Pada triwulan I-2024, kondisi perekonomian global cenderung divergen. Prospek ekonomi global masih dibayangi tensi geopolitik yang terus meningkat utamanya konflik di Timur Tengah dan konflik Rusia-Ukraina. Selain itu, ketidakpastian pasar keuangan global juga masih tinggi antara lain dipengaruhi oleh laju penurunan inflasi global yang masih tertahan khususnya inflasi di negara maju seperti AS yang masih berada di atas targetnya. Hal tersebut mendorong The Fed mempertahankan suku bunga Fed Funds Rate (FFR) tinggi dalam jangka waktu lama (*high for longer*) dan diperkirakan baru melakukan pemangkasan FFR pada semester II 2024.

Pada Maret 2024, The Fed memutuskan masih mempertahankan suku bunga *Fed Funds Rate* (FFR) sebesar 5,25%-5,50% sejalan dengan ekspektasi pasar. Adapun The Fed menyampaikan pernyataan yang hampir serupa dengan pernyataan sebelumnya yaitu bahwa mereka tidak berekspektasi menurunkan suku bunga acuan sampai mereka memperoleh keyakinan lebih besar bahwa inflasi bergerak secara berkelanjutan menuju target The Fed 2%. Meski demikian, kondisi ekonomi Amerika Serikat (AS) yang cukup

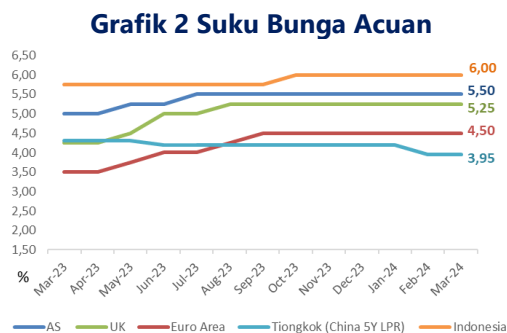
resilien membuat The Fed pada FOMC Maret 2024, mensinyalkan akan menurunkan FFR sebanyak tiga kali pada tahun 2024 atau sama dengan *dot plot* pada Desember 2023. The Fed dalam *The Federal Open Market Committee* (FOMC) Maret 2024 merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi AS untuk 2024 yaitu sebesar 2,1% (*prev.* 1,4%); kemudian pada 2025 sebesar 2,0% (*prev.* 1,8%); dan pada 2026 sebesar 2,0% (*prev.* 1,9%).

Sebagai informasi, pada FOMC Juni 2024, The Fed memutuskan mempertahankan FFR pada 5,25%-5,50% atau sejalan dengan perkiraan pasar. Adapun The Fed merevisi *dot plot* pada Maret 2024 yang semula memperkirakan tiga kali penurunan suku bunga pada 2024 dan 2025 menjadi hanya memperkirakan satu kali penurunan suku bunga pada 2024 dan empat kali penurunan pada tahun 2025.

Grafik 1 Inflasi Konsumen



Sumber: Reuters



Sumber: Reuters

Sejalan dengan The Fed, European Central Bank (ECB) dan Bank of England (BOE) juga masih mempertahankan suku bunga acuannya sejalan dengan risiko kenaikan inflasi yang masih membayangi, meskipun tingkat inflasi mulai melandai, namun belum mencapai target 2%. Gubernur ECB, Christine Lagarde menyiratkan kemungkinan terjadinya pemangkasan suku bunga terjadi pada Juni 2024, namun ECB tidak dapat memberikan jaminan akan melakukan penurunan suku bunga setelahnya. Pernyataan Gubernur ECB tersebut terbukti yaitu pada Juni 2024, ECB memutuskan memangkas suku bunga acuan (*main refinancing operation*) sebesar 25bps menjadi 4,25% dari sebelumnya 4,5%, *Deposit Facility Rate* menjadi 3,75% dari 4,00%, *Marginal Lending Rate* menjadi 4,5% dari 4,75%. Risiko inflasi yang terjadi utamanya pada negara besar sebagai pengaruh dari dampak kebijakan kenaikan suku bunga sebelumnya yang menyebabkan naiknya biaya tenaga kerja. Ditambah dengan faktor konflik geopolitik di timur tengah yang meningkatkan harga komoditas, sehingga berpotensi mendorong kembali kenaikan inflasi.

Selain itu, People's Bank of China (PBOC) juga masih mempertahankan suku bunga acuannya di tengah tekanan ekonomi yang

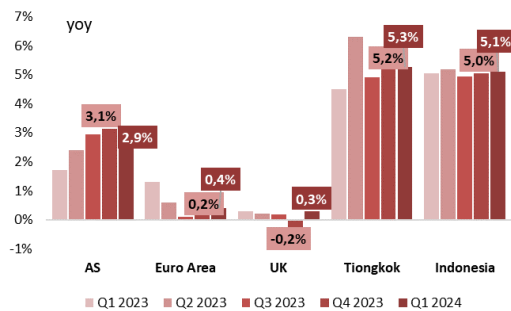
sempat mengalami deflasi beberapa waktu lalu. Dalam hal ini, pemerintah Tiongkok menghadapi dilema terkait kebijakan relaksasi suku bunga yang dapat berakibat mendorong deflasi lebih dalam. Hal ini dikarenakan kebijakan stimulus lebih banyak diberikan pada sisi penawaran/produksi, utamanya ke sektor manufaktur dan infrastruktur, sementara sisi permintaan masyarakatnya masih lemah.

Sejalan dengan kondisi di beberapa negara yang masih cukup resilien, utamanya di AS dan negara *emerging markets*, IMF dalam *World Economic Outlook* (WEO) April 2024 memproyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 tumbuh sebesar 3,2% (yoy) stabil dari pertumbuhan tahun 2023 dan sedikit lebih tinggi dari perkiraan pada WEO Januari 2024 sebesar 3,1% (yoy). Sedangkan untuk perkiraan pertumbuhan ekonomi pada 2025 tidak berubah dari perkiraan sebelumnya yaitu sebesar 3,2% (yoy). Selain itu, inflasi global juga diperkirakan melandai dari tahun 2023 sebesar 6,7% menjadi 5,9% pada 2024 dan 4,4% pada 2025.

Pada triwulan laporan, pertumbuhan ekonomi negara-negara masih terdivergensi. Di satu sisi, ekonomi AS tumbuh 2,9% (yoy) melambat dari triwulan sebelumnya 3,1% (yoy). Perlambatan ekonomi AS didorong oleh melambatnya belanja konsumen (2,5% < 3,3%), terutama disebabkan oleh penurunan konsumsi barang (-0,4% < 3%) serta Investasi non-perumahan yang juga menurun (2,9% < 3,7%). Selain itu, perlambatan yang terjadi juga sejalan dengan tingkat suku bunga AS yang dipertahankan pada level tinggi (*high*

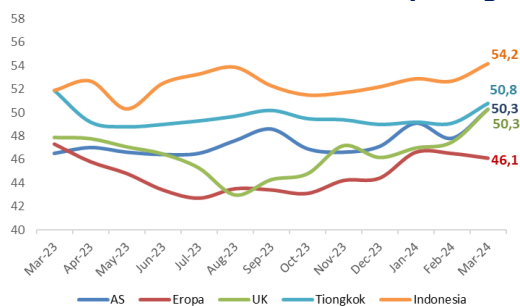
for longer). Meskipun demikian, PMI Manufaktur AS menunjukkan peningkatan dan berada pada level ekspansi sebagai pengaruh meningkatnya pesanan baru dan pesanan ekspor baru.

Grafik 3 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara



Sumber: *Trading Economics* dan *Reuters*

Grafik 4 PMI Manufaktur Beberapa Negara



Sumber: *Reuters*

Ekonomi Tiongkok justru menunjukkan perbaikan yaitu tumbuh 5,3% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (5,2%, yoy) atau di atas perkiraan pasar sebesar 5,0% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Tiongkok didorong oleh tumbuhnya output produksi seiring stimulus yang diberikan pemerintah untuk mendorong sektor manufaktur serta didorong juga oleh *high-tech industry* dan sektor jasa. Selain itu, peningkatan ekonomi Tiongkok juga dipicu oleh peningkatan belanja masyarakat dalam rangka peringatan Tahun Baru Imlek. Meski demikian, penjualan ritel melambat sejalan dengan keyakinan konsumen yang masih pesimis dan permintaan yang lemah. Perlu

diperhatikan tantangan seperti turunnya investasi di sektor properti, risiko hutang, dan lemahnya konsumsi, terlebih dengan isu *ageing population*, yang dapat menghambat pertumbuhan Tiongkok ke depan.

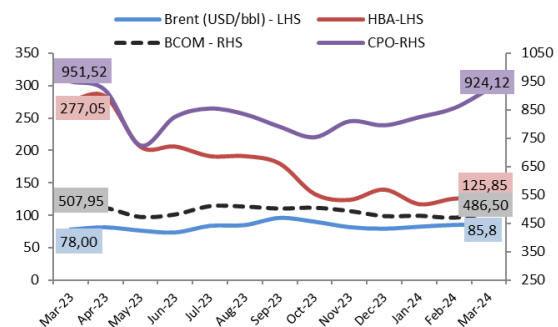
Sejalan dengan Tiongkok, ekonomi Eropa juga menunjukkan peningkatan, yaitu pada triwulan I-2024 tumbuh 0,4% (yoy) naik dari 0,2% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Di antara 19 negara anggota Zona Eropa, terdapat 4 negara yang berkontribusi besar terhadap PDB Zona Eropa di antaranya Jerman (29% dari total PDB), Perancis (20%), Italia (15%), dan Spanyol (10%). Berdasarkan komponen pengeluaran, Pengeluaran Pemerintah menjadi komponen yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi pada triwulan I-2024 yaitu mencapai 1,6% (yoy). Meskipun inflasi di Eropa sudah melandai, namun harga energi masih tetap tinggi sebagai pengaruh dari konflik geopolitik yang belum berakhir. Selain itu, tekanan dari biaya transportasi perdagangan (*shipping cost*) karena adanya disrupsi di Laut Merah turut meningkatkan tekanan inflasi di Eropa dan menahan ECB untuk menurunkan suku bunganya pada triwulan I-2024. Hal ini kemudian berdampak pada turunnya kinerja manufaktur sebagaimana ditunjukkan oleh PMI manufaktur Eropa yang masih pada level kontraksi.

Lebih lanjut, ekonomi UK juga mengalami peningkatan pada triwulan I-2024 yaitu sebesar 0,3% (yoy), meningkat dari -0,2% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Peningkatan dipengaruhi oleh naiknya sektor jasa dan produksi. Adapun dari sisi

pengeluaran, peningkatan didorong oleh belanja pemerintah.

Relatif tingginya inflasi masih menjadi faktor utama perlambatan yang memengaruhi pelemahan konsumsi dan industri manufaktur. Meskipun masih dibayangi risiko inflasi ke depan, pergerakan harga komoditas global pada awal tahun 2024 menunjukkan penurunan sebagaimana ditunjukkan oleh indeks harga komoditas Bloomberg (BCOM) pada Maret 2024 tercatat sebesar 486,50 turun dari 507,95 pada Maret 2023. Penurunan tecermin pada turunnya harga batubara dan *Crude Palm Oil* (CPO). Penurunan harga tersebut umumnya dipengaruhi oleh turunnya permintaan di tengah pasokan yang memadai. Selain itu, penurunan harga juga dipengaruhi oleh menurunnya harga komoditas pengganti. Pada batubara misalnya, terdapat penurunan permintaan dari India, Eropa, dan Tiongkok seiring semakin masifnya pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di tengah meningkatnya pasokan batubara. Selain itu, turunnya harga batubara juga dipicu oleh menurunnya harga gas sebagai komoditas substitusi batubara. Adapun penurunan harga CPO juga dipengaruhi oleh turunnya harga minyak nabati lainnya sebagai komoditas pengganti CPO. Meski demikian, perlu diperhatikan faktor risiko seperti perkembangan konflik geopolitik di Timur Tengah dan Ukraina serta gangguan jalur perdagangan di laut merah yang berpotensi memicu peningkatan harga komoditas ke depan. Hal tersebut tecermin dari harga minyak dunia yang mengalami peningkatan pada periode laporan dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 5 Perkembangan Harga Komoditas

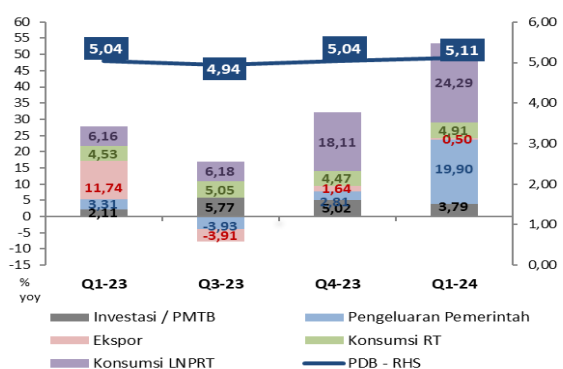


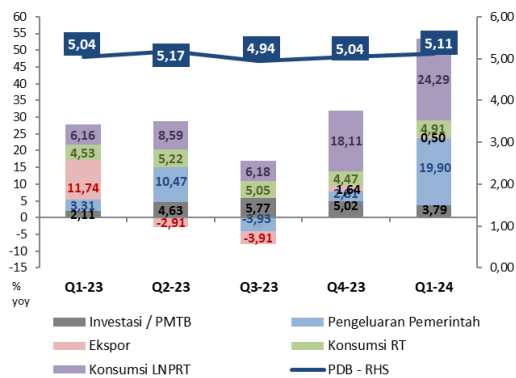
Sumber: Reuters

2. Perekonomian Domestik

Dari sisi domestik, fundamental ekonomi Indonesia tetap resilien dan mampu tumbuh kuat sebesar 5,11% (yoy) pada triwulan I-2024, meningkat dari 5,04% (yoy) pada triwulan IV-2023 dan triwulan I-2023. Tetap kuatnya pertumbuhan ekonomi domestik didorong oleh permintaan yang solid tecermin pada pertumbuhan konsumsi dan investasi serta tumbuhnya pengeluaran pemerintah. Sementara itu, ekspor berkontraksi sejalan dengan perlambatan ekonomi global dan pelemahan harga komoditas ekspor utama. Kontraksi ekspor sebesar -0,50% (yoy) sejalan dengan dengan normalisasi harga komoditas utama ekspor yang menurunkan kontribusi ekspor terhadap PDB.

Grafik 6 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Pengeluaran





Sumber: BPS

Pada triwulan I-2024, konsumsi tumbuh 5,33% (yoy) didorong oleh konsumsi rumah tangga dengan porsi terbesar (53,32%) yang tumbuh 4,91% (yoy) dan konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) dengan porsi 1,41% yang tumbuh tinggi mencapai 24,29% (yoy). Pertumbuhan konsumsi domestik antara lain sejalan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), hari libur nasional, dan cuti bersama. Kenaikan konsumsi rumah tangga hampir terjadi pada semua sektor kecuali pakaian, alas kaki, dan jasa perawatannya serta transportasi dan komunikasi. Sementara itu, pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencatatkan pertumbuhan terbesar utamanya pada sektor perumahan dan perlengkapan rumah tangga serta kesehatan dan pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat dan keyakinan konsumen tetap terjaga di tengah berlanjutnya kondisi perbaikan ekonomi domestik. Per Maret 2024, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat sebesar 123,8 meningkat dari 123,3 pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 3,79% (yoy), didorong oleh investasi bangunan dan peralatan lainnya. Investasi bangunan

tumbuh sejalan dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur Pemerintah di berbagai wilayah, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Sementara itu, investasi non-bangunan didorong antara lain oleh investasi peralatan lain dalam kegiatan produksi, *Cultivated Biological Resources* (CBR), dan produk kekayaan intelektual.

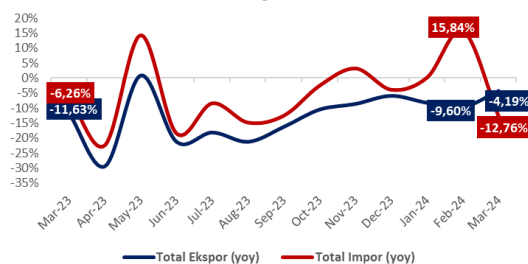
Pengeluaran pemerintah mencatatkan perbaikan pertumbuhan paling tinggi mencapai 19,90% (yoy) dari 2,95% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh kenaikan realisasi belanja barang terutama pada kegiatan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan realisasi belanja pegawai.

Di sisi lain, kontribusi perdagangan internasional melalui ekspor yang tumbuh sebesar 0,50% (yoy) pada triwulan I-2024 meskipun secara tahunan melambat sejalan dengan turunnya harga komoditas yang memengaruhi turunnya kontribusi dari net ekspor. Hal tersebut tecermin pada turunnya nilai ekspor pada Maret 2024 sebesar -4,19% (yoy), karena dipengaruhi oleh penurunan ekspor migas dan non migas masing-masing sebesar -3,95% (yoy) dan -4,21% (yoy). Penurunan nilai ekspor migas utamanya dipengaruhi oleh komoditas minyak mentah (porsi: 0,89%) dan gas alam (porsi: 3,09%) yang berkontraksi cukup dalam yakni masing-masing dari 50,54% (yoy) dan -9,26% (yoy) pada Maret 2023 menjadi -8,70% (yoy) dan -19,01% (yoy) pada Maret 2024. Sementara itu, penurunan nilai ekspor nonmigas antara lain dipengaruhi oleh komoditas batubara (porsi: 15,22%), produk logam dasar (porsi: 16,42%), dan *palm oils* (porsi: 7,36%) yang masing-masing berkontraksi

sebesar -28,85% (yoy), -0,58% (yoy) dan -6,18% (yoy).

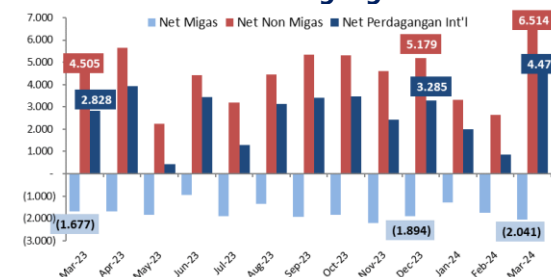
Sejalan dengan perkembangan tersebut, kinerja impor yang juga turun sebesar -12,76% (yoy) karena dipengaruhi oleh penurunan impor nonmigas sebesar -16,72% (yoy) sedangkan impor migas tetap tumbuh positif 10,34% (yoy). Penurunan nilai impor nonmigas dipengaruhi oleh beberapa komoditas, antara lain: produk manufaktur lainnya (porsi: 19,20%); peralatan listrik, alat ukur, dan optik (porsi: 16,66%); dan produk logam dasar (porsi: 10,46%). Pada Maret 2024, komoditas produk manufaktur lainnya berkontraksi lebih dalam dari -2,28% (yoy) menjadi -18,10% (yoy). Demikian halnya dengan komoditas peralatan listrik, alat ukur, dan serta produk logam dasar yang masing-masing berkontraksi sebesar -10,68% (yoy) dan -31,91% (yoy) dari 7,41% (yoy) dan -5,06% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan impor migas antara lain didorong oleh komoditas hasil minyak (porsi: 12,03%) yang tumbuh positif dari -23,33% (yoy) menjadi 13,47% (yoy). Meskipun demikian, neraca perdagangan mampu mencatatkan surplus tertinggi dalam setahun terakhir pada Maret 2024 sebesar USD4,47 miliar atau secara kumulatif mencapai USD7,31 Miliar pada periode Januari s.d. Maret 2024.

Grafik 7 Pertumbuhan Nilai Ekspor dan Impor



Sumber: BPS

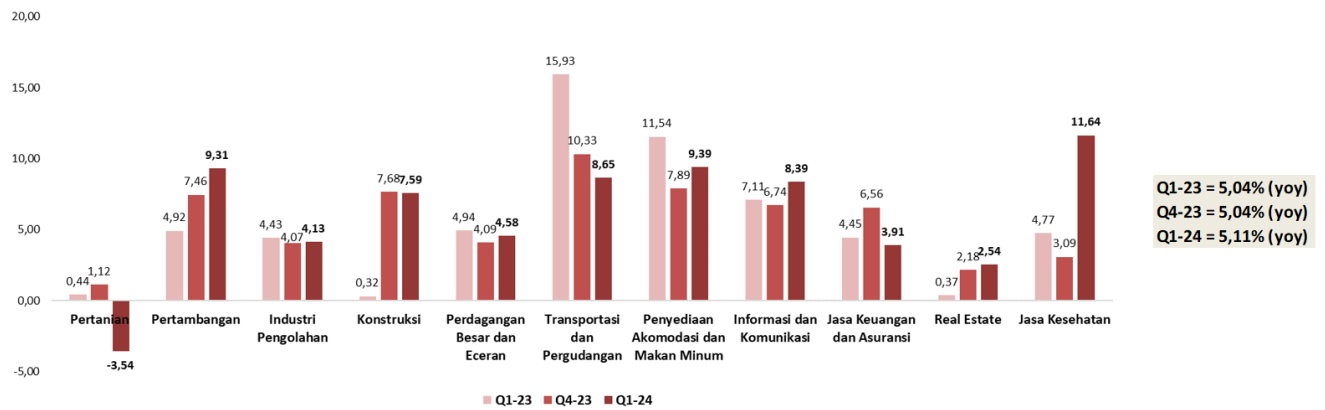
Grafik 8 Neraca Perdagangan Indonesia



Sumber: BPS

Dilihat berdasarkan lapangan usaha, penyumbang terbesar dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2024 adalah sektor konstruksi dan pertambangan yang masing-masing tumbuh 7,59% (yoy) dan 9,31% (yoy). Selain itu, sektor terkait mobilitas seperti sektor transportasi dan pergudangan serta penyediaan akomodasi dan makan minum (PAMM) juga mencatatkan pertumbuhan tinggi masing-masing sebesar 8,65% (yoy) dan 9,39% (yoy) sejalan dengan meningkatnya mobilitas menjelang Momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri dan naiknya keyakinan konsumen yang mendorong konsumsi masyarakat.

Grafik 9 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Lapangan Usaha



Sumber: BPS

Halaman ini sengaja dikosongkan

Boks 1.

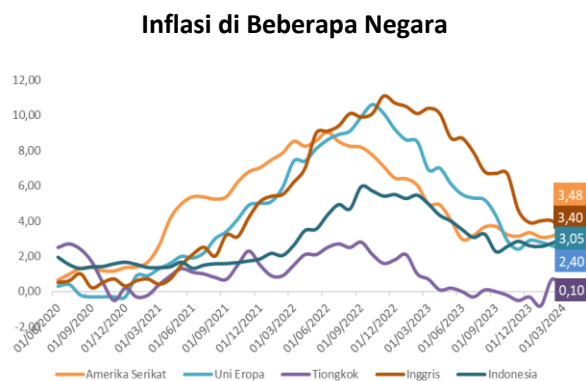
Andil Fungsi Intermediasi Perbankan dalam Menanggulangi Dampak Risiko Berlanjutnya Tekanan Gejolak Ekonomi Global dan Suku Bunga Tinggi terhadap Kinerja Korporasi

Ketidakpastian dan eskalasi ketegangan konflik geopolitik yang terus berlanjut masih menyelimuti ekonomi global memberikan dampak yang semakin terasa di berbagai aspek....

Kondisi ekonomi global masih diwarnai berbagai tantangan, risiko, dan ketidakpastian tinggi selama beberapa tahun terakhir. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap situasi ini, di mana penerapan *lockdown* massal, pembatasan mobilitas, dan disrupsi aktivitas bisnis pada saat itu telah memicu terjadinya **resesi global**. Ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih dari dampak Pandemi Covid-19 kemudian dihadapkan pada tekanan yang lebih besar akibat pecahnya konflik geopolitik Rusia vs Ukraina sejak Februari 2022. Hal ini kian memperparah **gangguan rantai pasokan** berbagai barang/produk yang menyebabkan kelangkaan bahan baku, keterlambatan pengiriman, dan **kenaikan harga** (terutama komoditas energi antara lain minyak, gas alam, dan batu bara) hingga memicu terjadinya **lonjakan inflasi global** yang terefleksi di beberapa negara seperti: Amerika Serikat, Uni Eropa, Tiongkok, Inggris, dan Indonesia pada penghujung tahun 2022.



Sumber: CEIC, diolah



Sumber: Reuters, diolah

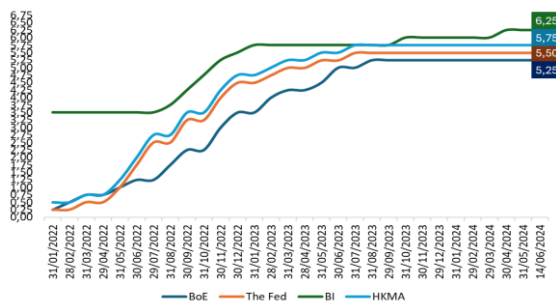
Tidak hanya itu, **eskalasi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah** yang masih berlangsung sampai dengan saat ini turut berimbas pada **peningkatan tekanan di pasar keuangan global maupun domestik**. Ketidakpastian dan risiko yang meningkat akibat ketegangan geopolitik dapat menyebabkan investor ragu-ragu untuk berinvestasi, sehingga berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi, melemahkan nilai tukar mata uang, dan memperparah inflasi. Secara lebih lanjut, ketegangan geopolitik telah mendorong terjadinya **fragmentasi geo-ekonomi** yang ditandai dengan pembentukan blok ekonomi dan peningkatan proteksionisme untuk membatasi akses pasar bagi negara-negara di luar blok. Hal ini dapat mengurangi volume perdagangan global dan merugikan negara-negara (terutama berpendapatan rendah) yang bergantung pada aktivitas perdagangan internasional dan belum memiliki daya saing yang kuat. Akibatnya, perdagangan global menjadi terganggu dan **pemulihan ekonomi global bisa semakin terhambat**.

Ancaman inflasi tinggi dorong sejumlah Bank Sentral kompak mengambil langkah kebijakan suku bunga agresif untuk menjaga stabilitas ekonomi....

The Fed telah mengambil langkah agresif dengan menaikkan suku bunga acuan sebanyak 11 (sebelas kali) sejak dimulainya pengetatan kebijakan moneter di Amerika Serikat pada Maret 2022. Kenaikan ini membawa suku bunga acuan The Fed (Fed Fund Rate/FFR) meningkat secara bertahap **dari 0,75% menjadi 5,25%**. Kenaikan suku bunga acuan tersebut merupakan langkah The Fed untuk melawan inflasi yang mencapai tingkat

tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Tidak dapat dipungkiri bahwa **arah pergerakan FFR akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan suku bunga acuan di banyak negara**. Bank Indonesia telah meningkatkan BI Rate secara bertahap dari 3,50% menjadi 6,25% atau terhitung sebanyak 8 (delapan) kali dalam kurun waktu yang sama. Kenaikan BI Rate ini bertujuan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak memburuknya risiko global serta sebagai langkah *pre-emptive* dan *forward looking* untuk memastikan inflasi berada dalam sasaran target.

Kenaikan Suku Bunga Acuan di Eropa, Amerika Serikat, Indonesia, dan Hongkong



Sumber: Reuters, diolah

Tingkat Suku Bunga Acuan BI Rate sejak Maret 2022 s.d. Juni 2024

No.	BI Rate	Periode Waktu
1.	3,50	Mar 2021 s.d. Juli 2022
2.	3,75	Agustus 2022
3.	4,25	September 2022
4.	4,75	Oktober 2022
5.	5,25	November 2022
6.	5,50	Desember 2022
7.	5,75	Januari 2023 s.d. September 2023
8.	6,00	Oktober 2023 s.d. Maret 2024
9.	6,25	April 2024 s.d. sekarang

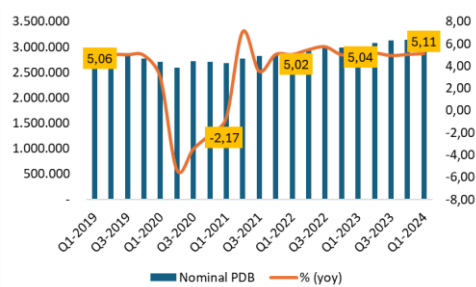
Sumber: Reuters, diolah

Sementara itu, berdasarkan hasil **Federal Open Market Committee (FOMC) meeting** pada bulan Maret 2024, The Fed memutuskan untuk **tetap mempertahankan FFR di kisaran 5,25% - 5,50%** yang merupakan level tertinggi dalam 2 (dua) dekade terakhir sebagai upaya kehati-hatian dalam menghadapi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa FFR akan tetap lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya (**high for longer**) karena **tingkat inflasi yang masih jauh dari target 2%** di tengah solidnya kinerja perekonomian Amerika Serikat. Selain itu, salah satu pertimbangan lainnya yang ditengarai melatarbelakangi kebijakan The Fed menjadi lebih *hawkish* adalah **untuk meningkatkan daya tarik mata uang USD**. Apabila FFR naik atau tetap tinggi, maka imbal hasil investasi dalam mata uang tersebut juga akan meningkat, sehingga lebih menarik bagi investor global dan selanjutnya dapat mengapresiasi nilai tukar USD terhadap mata uang negara lain sebagai **salah satu upaya meredam inflasi**.

Perkembangan ekonomi domestik masih cukup impresif meskipun tidak luput dari dampak gejolak ekonomi global....

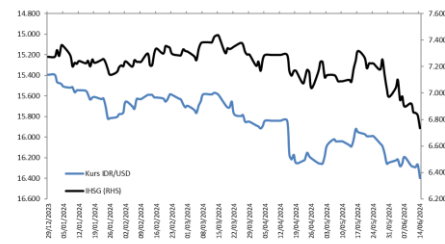
Indonesia sebagai negara berkembang yang turut berpartisipasi aktif dalam aktivitas perekonomian global yang semakin terintegrasi **tidak luput dari dampak gejolak ekonomi global dan tingginya FFR**. Meskipun demikian, hingga Maret 2024, **kondisi fundamental ekonomi Indonesia tetap tangguh** sebagaimana tecermin pada: 1) keyakinan konsumen dan kegiatan usaha (*Purchasing Manager Index Manufacture/PMI Manufacture*) yang masih terjaga pada level optimis dan zona ekspansif; 2) Indeks Penjualan Ritel yang tetap tumbuh positif dan meningkat; 3) neraca perdagangan mencatatkan surplus tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir; 4) posisi cadangan devisa yang masih jauh di atas standar batas kecukupan internasional, dan 5) pertumbuhan ekonomi nasional yang relatif tinggi (>5%). Perkembangan positif tersebut antara lain ditopang oleh **efektivitas bauran kebijakan Pemerintah yang suportif dan terstruktur** dalam memitigasi dampak rambatan ketidakpastian perekonomian global terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



Sumber: BPS, diolah

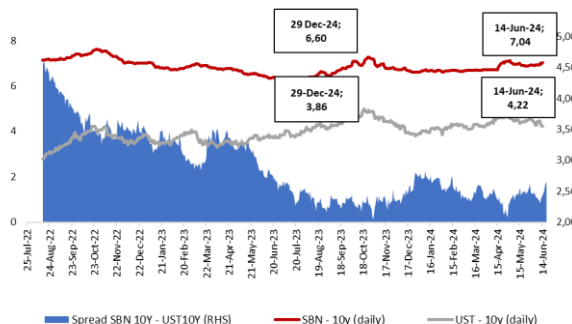
Pergerakan Kurs dan IHSG dalam Enam Bulan Terakhir



Sumber: Reuters, diolah

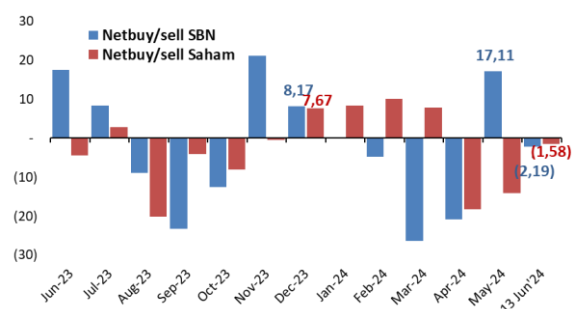
Ketidakpastian akibat kebijakan The Fed dan respons pasar terbukti meningkatkan volatilitas di pasar keuangan (saham, obligasi, dan nilai tukar) baik pada tataran global maupun domestik. Sebagaimana diketahui, perkembangan kenaikan FFR membuat investasi di surat utang Amerika Serikat (UST Bond) menjadi semakin menarik bagi investor karena imbal hasil (*yield*) yang ditawarkan lebih tinggi. Meningkatnya daya tarik terhadap UST kemudian mendorong permintaan atas USD sehingga menyebabkan mata uang lain terdepresiasi termasuk Rupiah. Selanjutnya, kenaikan USD dan *yield* UST secara bersamaan membuat investasi di pasar *emerging market* menjadi kurang menarik sehingga investor cenderung menarik dananya untuk beralih ke USD dan UST.

Spread Yield SBN dan UST 10 Y



Sumber: CEIC, diolah

Net Sell/Buy di Pasar SBN dan Saham oleh Investor Asing



Sumber: DJPPR Kemenkeu dan Reuters, diolah

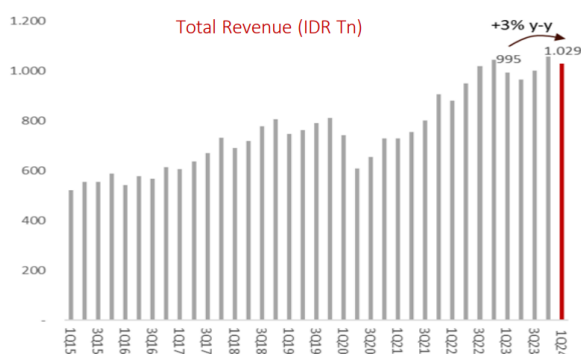
Sejauh ini, pasar keuangan domestik masih relatif terjaga namun cukup terdampak oleh sentimen negatif dari volatilitas keuangan global dan ketidakstabilan geopolitik. Hal ini ditandai dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) maupun nilai tukar IDR/USD cukup *volatile* dengan kecenderungan melemah dalam enam bulan terakhir. Di samping itu, *spread yield* SBN dan UST 10 Y terlihat semakin melebar (2,74 pada 29 Desember 2023 < 2,82% pada 14 Juni 2024) yang menunjukkan perbedaan imbal hasil yang lebih tinggi antara SBN dan UST serta mengindikasikan bahwa persepsi risiko terhadap ekonomi Indonesia meningkat sehingga membuat investor terutama asing/non residen cenderung lebih berhati-hati dalam berinvestasi di SBN dan menganggap UST sebagai *safe haven asset*. Perkembangan tersebut telah mendorong *capital outflow* (arus modal keluar asing) dari Indonesia sehingga pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan pasar saham mencatatkan *net sell* masing-masing sebesar Rp2,19 Triliun dan Rp1,58 Triliun per 13 Juni 2024.

Gejolak global dan suku bunga tinggi menghadirkan tantangan signifikan bagi korporasi domestik yang dapat menghambat perkembangan kinerja secara umum....

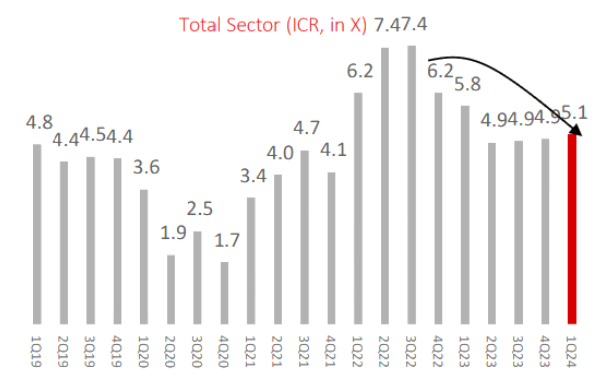
Kondisi gejolak global dan narasi *high(er) for longer* yang semakin menguat di pasar keuangan global menghadirkan berbagai tantangan bagi ekonomi Indonesia, khususnya **pada korporasi domestik (emiten)**. Sebagaimana diketahui, sumber pembiayaan korporasi selain dari permodalan utamanya berasal dari dana sendiri, diikuti pembiayaan yang berasal dari perbankan dalam negeri dan pemanfaatan fasilitas kelonggaran tarik, maupun pembiayaan dari luar perbankan dan investor asing. Adanya kenaikan suku bunga acuan berpotensi menghambat pertumbuhan *earnings* emiten melalui beberapa mekanisme. Pertama, kenaikan suku bunga acuan akan meningkatkan biaya pinjaman, biaya modal kerja, dan investasi yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan terutama yang memiliki rasio utang tinggi. Kedua, melemahkan daya beli konsumen sehingga menekan permintaan terhadap produk dan jasa korporasi. Ketiga, memengaruhi sektor-sektor yang sangat bergantung pada pinjaman seperti properti, konstruksi, dan industri manufaktur. Keempat, meningkatkan biaya impor bagi emiten terutama yang mengimpor bahan baku dari luar negeri. Pada triwulan I-2024, kinerja emiten secara umum menunjukkan perlambatan baik dari sisi pendapatan, solvabilitas, maupun likuiditas.

1. Secara agregat, **pendapatan emiten hanya tumbuh 3% (yoy)** karena pendapatan sektor komoditas berkontraksi -1% (yoy).
2. **Tingkat solvabilitas masih cukup baik** berdasarkan hasil hitung nilai *Interest Coverage Ratio* (ICR) tetapi untuk sektor-sektor yang berbasis komoditas dan sektor yang bahan bakunya berasal dari impor serta sektor yang memiliki *leverage* yang tinggi ((utang yang besar dibandingkan ekuitas) cenderung memiliki tingkat solvabilitas yang menurun (CPO, minyak dan gas, telekomunikasi, batu bara, *pulp* dan kertas, kontraktor, transportasi, rekreasi dan perhotelan, pertambangan, dan garmen).
3. Sementara itu, **dari sisi likuiditas emiten masih terlihat memadai meskipun berkontraksi -7% (yoy)**. Terdapat kebutuhan untuk mencermati sektor-sektor tertentu yang berorientasi ekspor, sektor komoditas, dan sektor yang memiliki *leverage* tinggi seperti batu bara, otomotif, transportasi, telekomunikasi, dan garmen yang mengalami tren penurunan likuiditas.
4. Di sisi lain, **belanja modal emiten tercatat meningkat 4% (yoy)**, namun sektor-sektor tertentu yang bersifat padat karya (*labor intensive*) seperti industri garmen, industri bahan bangunan, dan konstruksi cenderung menahan belanja modalnya.

Pendapatan Emiten Secara Agregat di Triwulan I-2024

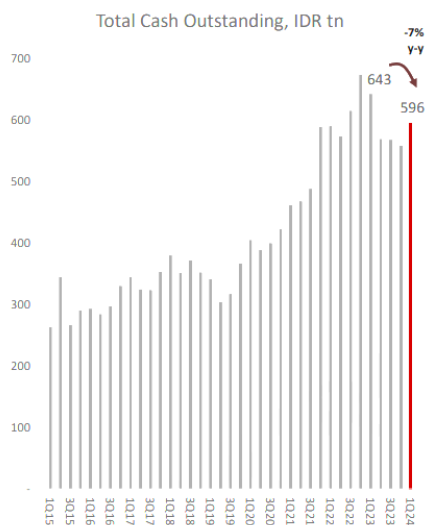


Nilai ICR Emiten Secara Agregat di Triwulan I-2024

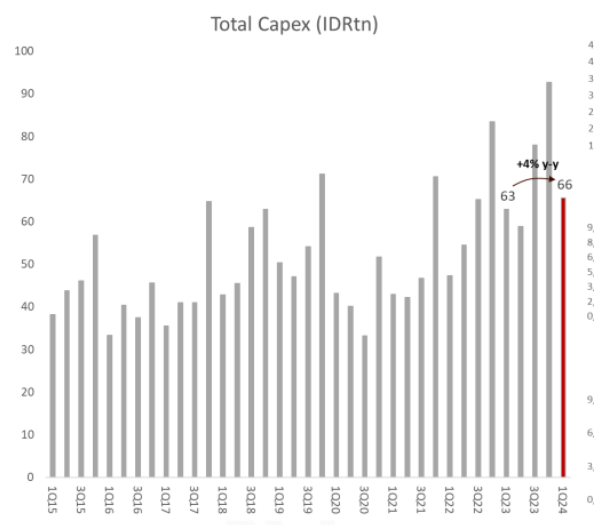


Sumber: Laporan keuangan 280 emiten yang merepresentasikan 85% kapitalisasi pasar, diolah

Perkembangan Kondisi Likuiditas Emiten Secara Agregat di Triwulan I-2024



Pertumbuhan Belanja Modal Emiten Secara Agregat di Triwulan I-2024

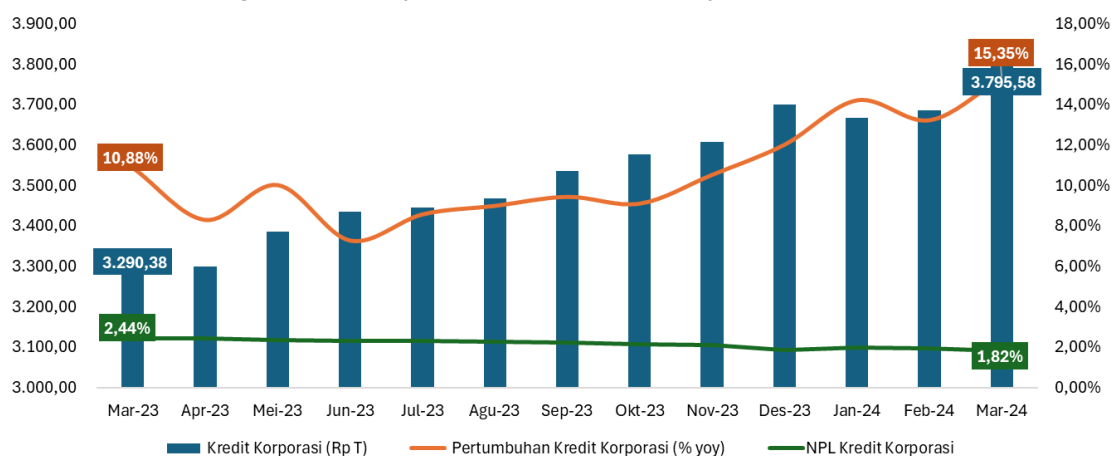


Sumber: Laporan keuangan 280 emiten yang merepresentasikan 85% kapitalisasi pasar, diolah

Perlambatan kinerja emiten dapat mendorong perusahaan untuk mencari alternatif sumber pembiayaan eksternal yang memicu peningkatan permintaan kredit khususnya dari korporasi....

Tingginya suku bunga acuan dalam jangka waktu yang relatif lama akan **meningkatkan biaya modal perusahaan** yang pada gilirannya dapat **membebani neraca keuangan emiten**. Oleh karena itu, perusahaan seringkali **mencari alternatif pembiayaan untuk mengatasi kenaikan biaya modal atau mendapatkan dana tambahan** dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak pasti. Ada berbagai alternatif pembiayaan yang tersedia, namun biasanya korporasi cenderung menjadikan pinjaman dari bank sebagai salah satu pilihan utama untuk mendukung kegiatan operasional, investasi, atau ekspansi. Hal ini selanjutnya akan berimplikasi pada meningkatnya jumlah permintaan kredit korporasi yang dicerminkan melalui kredit dengan tujuan produktif kepada debitur non-UMKM.

Perkembangan Kredit Korporasi (Kredit Produktif kepada Debitur Non-UMKM)



Sumber: LBUT, diolah

Dalam kaitan tersebut, terlihat bahwa **pertumbuhan kredit korporasi pada Maret 2024 mencapai Rp3.795,58 Triliun/15,35%** (yoy) meningkat signifikan dari Rp3.290,38/10,88% (yoy) pada periode yang sama tahun

sebelumnya sebesar. Kenaikan pertumbuhan kredit korporasi tersebut **diikuti dengan perbaikan kualitas kredit korporasi** yaitu menjadi sebesar 1,82% dari 2,44% pada Maret tahun lalu. Sebagai informasi, **nilai *outstanding* obligasi korporasi yang akan jatuh tempo di 2024** diperkirakan sebesar Rp90.11 triliun. Namun demikian, **tingginya kenaikan suku bunga menahan korporasi untuk menerbitkan obligasi dan melakukan *refinancing* dengan kredit perbankan** mengingat kondisi pasar keuangan yang tidak stabil dapat mengurangi minat investor terhadap obligasi atau saham. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi keputusan investor asing untuk menjual lebih banyak obligasi atau saham dibandingkan dengan yang mereka beli, sehingga mendorong terjadinya keluarnya modal asing dari dalam negeri.

Peningkatan permintaan kredit korporasi dapat memberikan beberapa peluang bagi bank, antara lain: 1) **meningkatkan pendapatan bunga bank** yang dapat mendorong profitabilitas bank; 2) **mendiversifikasi *portfolio* kredit** dengan memberikan pinjaman kepada perusahaan dari berbagai sektor industri agar dapat mengelola risiko kredit secara lebih seimbang; dan 3) **meningkatkan pendapatan non-bunga** dari layanan tambahan yang diberikan kepada debitur; 4) **memperluas jangkauan pasar bank** serta meningkatkan pertumbuhan *portfolio* maupun *cross selling* produk keuangan lainnya; dan 5) **memperkuat *bargaining position* di pasar keuangan domestik** dan meningkatkan citra sekaligus reputasi di mata investor dan pasar. Namun demikian, di sisi lain, bank diimbau agar tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kreditnya untuk meminimalkan potensi risiko ke depan.

Lindung nilai, adaptasi, diversifikasi, dan restrukturisasi yang efektif menjadi kunci korporasi dalam memitigasi potensi dampak risiko pasar di era globalisasi....

Perusahaan umumnya akan melakukan **diversifikasi sumber pembiayaan** dengan mencari beberapa alternatif pembiayaan. Hal ini bisa termasuk pinjaman bank, penerbitan obligasi di pasar global atau lokal, mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan multilateral, atau menarik investor modal ventura. Strategi terkait struktur pendanaan dan *leveraging* perusahaan akan sangat bergantung pada kondisi eksternal utamanya makroekonomi dan pasar keuangan, jenis industri dan ukuran perusahaan. Pada negara-negara dengan pasar obligasi yang berkembang, seperti Indonesia, perusahaan dapat **menerbitkan obligasi di pasar lokal** untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Hal ini dapat memberikan akses ke dana dari investor domestik dengan risiko mata uang yang lebih rendah dan biaya pembiayaan yang kompetitif. Diversifikasi sumber pembiayaan merupakan **strategi penting bagi perusahaan dalam mengelola risiko**, karena tidak hanya **meningkatkan fleksibilitas** keuangan perusahaan dalam menghadapi gejolak pasar dan perubahan suku bunga, tetapi juga **membantu dalam mengoptimalkan struktur modal dan memperluas basis investor**.

Globalisasi ekonomi membawa konsekuensi bahwa adanya **potensi risiko dari fluktuasi nilai tukar mata uang, suku bunga, dan harga komoditas merupakan suatu keniscayaan yang harus dihadapi** oleh seluruh dunia usaha baik di negara maju maupun berkembang. Peningkatan interkoneksi pasar keuangan global menuntut **perusahaan harus mampu cepat beradaptasi** dengan setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis global. Secara umum, entitas di negara-negara dengan ekonomi terbuka mengembangkan **strategi *hedging* (lindung nilai)** yang komprehensif dan tidak hanya melibatkan penggunaan **instrumen derivatif keuangan** (kontrak berjangka, opsi, swap suku bunga) tetapi juga berbagai instrumen lainnya seperti diversifikasi *portfolio* dan penjadwalan kembali pembayaran utang (**restrukturisasi**) untuk mengurangi eksposur terhadap fluktuasi suku bunga.

OJK senantiasa berupaya mendorong kinerja intermediasi keuangan untuk mendukung pertumbuhan korporasi dan akselerasi pemulihan ekonomi nasional....

Peran krusial industri perbankan sebagai motor utama penggerak utama ekonomi nasional sudah tidak perlu diragukan lagi. Dalam menjalankan fungsinya, **bank menyediakan pembiayaan kepada korporasi** baik berupa kredit jangka pendek maupun jangka panjang untuk **mendukung ekspansi bisnis, mengembangkan produk dan layanan baru**, atau **memenuhi kebutuhan modal kerja**. Penyaluran kredit korporasi berperan penting **dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional**. Dengan akses modal yang memadai, korporasi dapat

berinvestasi, berinovasi, dan menciptakan lapangan kerja, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi nasional. Tak heran jika fungsi intermediasi keuangan perbankan dapat **diibaratkan** **bagai denyut nadi dalam tubuh perekonomian nasional**.

Dalam rangka ikut serta **mendukung pertumbuhan ekonomi** nasional, OJK terus berupaya untuk **menciptakan iklim yang kondusif** bagi pengembangan industri perbankan di tengah masih tingginya ketidakpastian ekonomi global **dari *high(er) for longer* suku bunga maupun peningkatan tensi geopolitik**. Di samping itu, OJK juga senantiasa **mendorong kinerja intermediasi** dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan dan terjaganya likuiditas bank. Sehubungan dengan hal tersebut, **perbankan didorong untuk meningkatkan daya tahannya** melalui penguatan permodalan dan pembentukan pencadangan secara memadai. Di samping itu, **OJK juga senantiasa berupaya memperkuat mitigasi risiko secara berkelanjutan** dalam menghadapi tantangan ke depan dengan melakukan peningkatan kualitas pengawasan yang diiringi penguatan regulasi. Beberapa rekomendasi yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh bank dalam **meningkatkan ketahanan dan daya saing seraya mendukung pertumbuhan korporasi** antara lain:

1. **Menerapkan transformasi digital dan memanfaatkan *big data* dan *Artificial Intelligence (AI)*** untuk mengoptimalkan kualitas produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang serta mampu beradaptasi dengan kebutuhan nasabah yang dinamis.
2. **Menjalin kemitraan atau aliansi strategis** dengan pemain dalam ekosistem digital seperti *fintech* dan *bigtech* untuk meningkatkan peluang bagi bank dalam mendapatkan konsumen baru serta memperoleh akses data untuk pengembangan produk dan layanan.
3. **Meningkatkan kapasitas dan infrastruktur teknologi informasi**, termasuk pengembangan sistem informasi yang canggih, keamanan data yang lebih baik, dan *platform digital* untuk meningkatkan efisiensi operasional.
4. **Mengembangkan produk kredit/pembiayaan untuk mendukung sektor-sektor ekonomi prioritas** yang dapat memberikan *multiplier effect* besar bagi perekonomian.
5. **Memperluas jangkauan layanan** dengan menawarkan solusi pembiayaan yang lebih fleksibel dan inovatif serta sesuai dengan karakteristik dan risiko masing-masing sektor.

Halaman ini sengaja dikosongkan

2 Kinerja Industri Perbankan Nasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

2 Kinerja Industri Perbankan Nasional

Secara umum ketahanan perbankan pada triwulan I-2024 cukup terjaga, tecermin dari tingkat permodalan bank yang cukup solid dan ditopang ketersediaan likuiditas yang memadai. Fungsi intermediasi perbankan masih cukup baik ditandai dengan kredit dan DPK bank umum yang tumbuh meningkat dari tahun sebelumnya. Selain itu, rentabilitas dan efisiensi perbankan juga masih terjaga meskipun menurun dari tahun sebelumnya.

1. Kinerja Bank Umum

Secara umum ketahanan perbankan pada triwulan I-2024 cukup terjaga, tecermin dari tingkat permodalan bank yang cukup solid dan ditopang ketersediaan likuiditas yang memadai dengan rasio AL/NCD dan AL/DPK tercatat jauh di atas *threshold* meskipun tercatat menurun. Fungsi intermediasi perbankan membaik terlihat dari kredit dan

DPK yang masih tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, perlu diperhatikan rentabilitas dan efisiensi perbankan juga tercatat menurun tecermin dari ROA dan BOPO masing-masing sebesar 2,62% dan 80,05% yang sedikit memburuk dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 1 Indikator Umum Bank Umum

Indikator	2023		2024		qtq		yoy	
	Mar	Des	Mar	Des '23	Mar '24	Mar '23	Mar '24	
Jumlah Bank	106	105	106	-	1	(1)	-	
BUK	93	92	92	-	-	(2)	(1)	
BUS	13	13	14	-	1	1	1	
Total Aset (Rp Miliar)	10,979,992	11,765,838	11,875,828	4.73%	0.93%	8.38%	8.16%	
BUK	10,440,073	11,171,129	11,272,046	4.56%	0.90%	7.80%	7.97%	
BUS	539,919	594,709	603,782	7.95%	1.53%	20.83%	11.83%	
Kredit (Rp milyar)	6,445,457	7,090,243	7,244,637	3.70%	2.18%	9.93%	12.40%	
BUK	6,114,349	6,721,867	6,866,246	3.72%	2.15%	9.22%	12.30%	
BUS	331,108	368,376	378,391	3.26%	2.72%	24.81%	14.28%	
DPK (Rp Miliar)	8,005,579	8,457,929	8,601,220	3.81%	1.69%	7.00%	7.44%	
BUK	7,568,139	7,991,997	8,123,819	3.60%	1.65%	6.38%	7.34%	
BUS	437,440	465,932	477,401	7.69%	2.46%	19.08%	9.14%	
- Giro (Rp Miliar)	2,435,690	2,662,551	2,663,816	7.72%	0.05%	11.32%	9.37%	
BUK	2,362,772	2,588,476	2,581,485	7.53%	-0.27%	10.88%	9.26%	
BUS	72,919	74,075	82,331	14.72%	11.15%	27.82%	12.91%	
- Tabungan (Rp Miliar)	2,541,308	2,669,183	2,693,409	3.59%	0.91%	4.39%	5.99%	
BUK	2,381,557	2,492,249	2,517,540	3.18%	1.01%	3.66%	5.71%	
BUS	159,751	176,935	175,869	9.79%	-0.60%	16.64%	10.09%	
- Deposito (Rp Miliar)	3,028,580	3,126,195	3,243,996	0.88%	3.77%	5.93%	7.11%	
BUK	2,823,810	2,911,273	3,024,795	0.67%	3.90%	5.14%	7.12%	
BUS	204,770	214,922	219,201	3.86%	1.99%	18.12%	7.05%	

Sumber: SPI Maret 2024

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam basis point (bps)

1.1 Aset Bank Umum

Aset Bank Umum tumbuh 8,16% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,38% (yoy). Jika dilihat dari jenis usaha bank, BUS masih tumbuh tinggi 2 digit sebesar 11,83% (yoy), namun turun dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, aset BUK hanya tumbuh 7,97% (yoy), namun meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 7,80% (yoy).

Sebagian besar aset bank umum merupakan aset BUK dengan porsi 94,92%, sementara itu aset BUS memiliki porsi 5,08%. Meskipun masih cukup kecil, porsi aset BUS tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,92% walaupun secara nominal tumbuh melambat dari 20,83% (yoy) menjadi 11,83% (yoy).

Berdasarkan kelompok bank, perlambatan aset utamanya disebabkan oleh perlambatan kelompok Bank BUSN yang merupakan kelompok Bank dengan porsi terbesar (44,80%) yang tumbuh 6,63% (yoy) melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 8,41% (yoy). Kendati demikian, aset kelompok Bank BUMN (porsi 42,08%) tumbuh dari 9,22% (yoy) menjadi 9,73%

(yoy), meskipun belum dapat mendorong ke atas pertumbuhan aset secara umum.

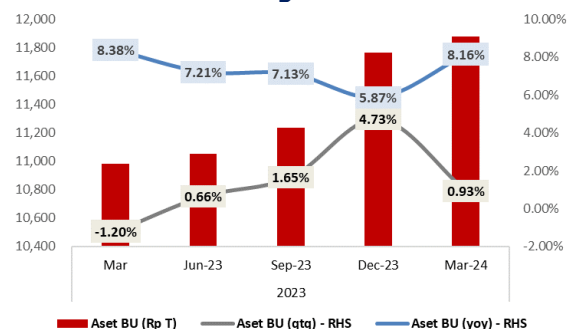
Aset perbankan Indonesia masih terkonsentrasi pada beberapa bank. Total aset empat Bank Umum terbesar mencapai 50,14% atau setengah dari aset perbankan Indonesia, dan total aset 20 Bank Umum terbesar mencapai 79,54% dari aset perbankan.

Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset Bank Umum

Periode	Aset	
	CR4 %	CR20 %
Mar '23	49.58%	79.43%
Jun '23	50.01%	79.32%
Sep '23	49.94%	79.16%
Des '23	50.61%	79.70%
Mar '24	50.14%	79.54%

Sumber: OJK

Grafik 10 Perkembangan Aset Bank Umum



Sumber: SPI Maret 2024

Tabel 3 Perkembangan Aset Bank Umum berdasarkan Kelompok Kepemilikan

Kelompok Bank	Nominal (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Mar '23	Des '23	Mar '24		Des '23	Mar '24	Mar '23	Mar '24
BUMN	4.554.379	5.014.378	4.997.325	42,08%	7,40%	-0,34%	9,22%	9,73%
BUSN	4.989.682	5.211.779	5.320.510	44,80%	2,88%	2,09%	8,41%	6,63%
BPD	918.604	985.415	972.941	8,19%	4,20%	-1,27%	4,39%	5,92%
KCBLN	517.328	554.266	585.052	4,93%	-0,02%	5,55%	7,96%	13,09%
Total	10.979.992	11.765.838	11.875.828	100%	4,73%	0,93%	8,38%	8,16%

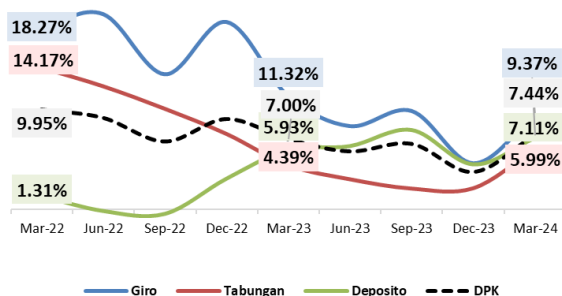
Sumber: SPI Maret 2024

1.2 Sumber Dana Bank Umum

Pada periode laporan, DPK Bank Umum tumbuh 7,44% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 7,00% (yoy). Berdasarkan jenis usaha, DPK tercatat melambat pada BUS yang tumbuh 9,14% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh sebesar 19,08% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan DPK pada BUK cenderung meningkat jika dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh dari 6,38% (yoy) menjadi 7,34% (yoy).

Peningkatan pertumbuhan DPK terjadi pada komponen deposito dan tabungan yang tercatat tumbuh masing-masing 7,11% (yoy) dan 5,99% (yoy), meningkat dari tahun lalu sebesar 5,93% (yoy) dan 4,39% (yoy). Peningkatan komponen deposito sejalan dengan tren kenaikan Suku Bunga Deposito. Di sisi lain, giro (porsi 30,97%) tumbuh 9,37% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,32% (yoy), namun tetap menjadi pendorong pertumbuhan DPK.

Grafik 11 Tren Pertumbuhan DPK per Komponen

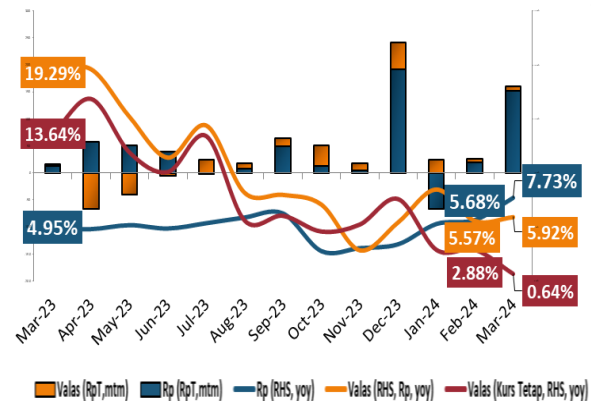


Sumber: SPI Maret 2024

Berdasarkan valuta, DPK Rupiah yang juga merupakan komponen dengan porsi terbesar (84,28%) tercatat tumbuh 7,73% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 4,95% (yoy). Di sisi lain, DPK Valas tercatat tumbuh hanya 5,92%

(yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mampu tumbuh 19,29% (yoy). Jika menggunakan kurs tetap, DPK Valas tercatat juga tumbuh sebesar 0,64% (yoy), melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 13,64% (yoy).

Grafik 12 Pergerakan DPK Berdasarkan Valuta



Sumber: SPI Maret 2024

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar DPK berada di kelompok Bank BUSN sebesar 44,44%, diikuti BUMN sebesar 43,85%. DPK BUSN tumbuh sedikit melambat menjadi 5,39% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 5,50% (yoy). DPK KCBLN berkontraksi -2,52% (yoy) setelah tahun sebelumnya mampu tumbuh 9,72% (yoy). Di sisi lain, DPK BUMN justru tumbuh 11,22% (yoy) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 9,38% (yoy), sehingga dapat menarik ke atas pertumbuhan DPK Bank Umum secara total.

Secara spasial, penghimpunan DPK masih terpusat di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara dengan total porsi 78,16%. Porsi terbesar berada di DKI Jakarta (53,21%) diikuti Jawa Timur (8,75%) dan Jawa Barat (7,78%).

Besarnya penghimpunan DPK di wilayah Jawa sejalan dengan kegiatan bisnis dan perputaran uang yang masih terpusat di Pulau Jawa.

Tabel 4 DPK Bank Umum berdasarkan Kelompok Kepemilikan Bank

Kelompok Bank	Nominal (Rp M)			Porsi (%)	qtq		yoy	
	Mar '23	Des '23	Mar '24		Des '23	Mar '24	Mar '23	Mar '24
BUMN	3,391,548	3,747,610	3,771,957	43.85	7.08%	0.65%	9.38%	11.22%
BUSN	3,626,584	3,745,302	3,822,025	44.44	2.40%	2.05%	5.50%	5.39%
BPD	725,945	730,333	752,332	8.75	-0.72%	3.01%	2.94%	3.63%
KCBLN	261,503	234,684	254,907	2.96	-7.63%	8.62%	9.72%	-2.52%
Total	8,005,579	8,457,929	8,601,220	100	3.81%	1.69%	7.00%	7.44%

Sumber: SPI Maret 2024

Tabel 5 Penyebaran DPK Bank Umum berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar

Wilayah	Nominal Rp(M)			% Pangsa terhadap total DPK
	Mar'23	Des '23	Mar '24	
DKI Jakarta	4,263,376	4,499,584	4,576,871	53.21%
Jawa Timur	700,017	736,718	752,817	8.75%
Jawa Barat	619,465	658,144	669,478	7.78%
Jawa Tengah	382,486	404,249	402,942	4.68%
Sumatera Utara	303,429	318,612	320,702	3.73%
Total DPK 5 Provinsi	6,268,772	6,617,307	6,722,810	78.16%
Total DPK	8,005,579	8,457,929	8,601,220	

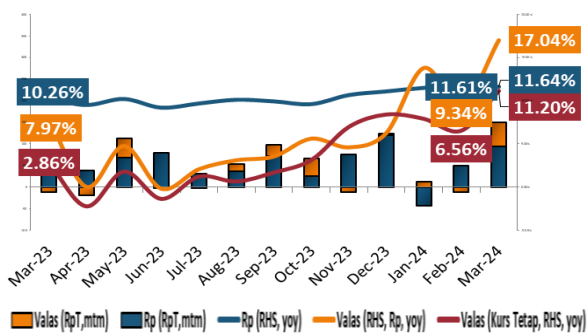
Sumber: SPI Maret 2024, diolah

1.3 Penggunaan Dana Bank Umum

Sebagian besar (61,00%) dana perbankan disalurkan dalam bentuk kredit kepada pihak ketiga bukan bank diikuti penempatan dalam bentuk surat berharga (18,23%) dan penempatan pada Bank Indonesia (7,52%).

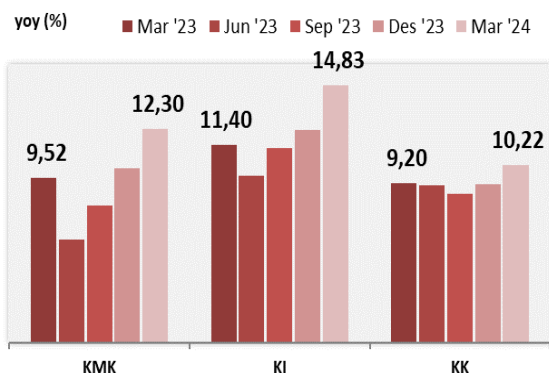
Kredit Bank Umum tumbuh 12,40% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 9,93% (yoy). Jika dilihat per jenis usaha, kredit BUK tumbuh 12,30% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 9,22% (yoy). Sementara itu, pembiayaan BUS tumbuh 14,28% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh tinggi 24,81% (yoy), meskipun dengan porsi relatif kecil (5,22%).

Berdasarkan valuta, kredit kepada pihak ketiga bukan bank didominasi dalam bentuk rupiah dengan porsi 85,32%, sedangkan kredit valas sebesar 14,68%. Secara umum, peningkatan pertumbuhan kredit didorong oleh pertumbuhan kredit rupiah yang tumbuh 11,64% (yoy) dari 10,26% (yoy) pada tahun sebelumnya. Selain itu, kredit valas juga tercatat tumbuh meningkat 17,04% (yoy) dari 7,97% (yoy) pada tahun sebelumnya. Jika menggunakan kurs tetap, kredit valas juga tercatat meningkat tumbuh 11,20% (yoy) dari 2,86% (yoy) pada tahun sebelumnya (Grafik 18).

Grafik 13 Kredit per Valuta

Sumber: SPI Maret 2024

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit didominasi kredit produktif (72,66%), yang terdiri dari kredit modal kerja (KMK) sebesar 45,18% dan kredit investasi (KI) sebesar 27,48%, sedangkan kredit konsumsi (KK) sebesar 27,34%. Secara umum, kredit tumbuh pada seluruh jenis penggunaan. Pertumbuhan kredit secara umum didorong oleh Kredit Produktif yang tercatat tumbuh 13,24% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 10,21% (yoy). Kredit konsumtif juga tumbuh 10,22% (yoy) dari 9,20% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Grafik 14 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Sumber: SPI Maret 2024

1.4 Rentabilitas Bank Umum

Pada Maret 2024, rentabilitas Bank Umum tercatat menurun ditandai dengan turunnya ROA sebesar 15 bps dari tahun sebelumnya

sebesar 2,77% menjadi 2,62%. Penurunan ROA disebabkan oleh pertumbuhan laba sebelum pajak yang melambat hanya tumbuh 1,51% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh tinggi 37,57% (yoy).

Dari sisi margin, NIM tercatat turun 18 bps menjadi sebesar 4,59% dari 4,77% pada tahun sebelumnya. Penurunan NIM seiring dengan melambatnya pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 3,49% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 13,99% (yoy).

Selain itu, efisiensi Bank Umum juga tercatat sedikit menurun tecermin dari rasio BOPO perbankan yang meningkat 69 bps dari 79,36% menjadi 80,05%. Beban operasional tercatat tumbuh melambat, dari 29,57% (yoy) menjadi 6,27% (yoy), namun di sisi lain pendapatan operasional juga tumbuh melambat menjadi 5,36% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh tinggi 31,19% (yoy), sehingga secara umum membuat BOPO meningkat.

1.5 Permodalan Bank Umum

Secara umum pada periode Maret 2024, kondisi permodalan perbankan masih cukup solid tecermin dari nilai CAR sebesar 25,96%, kendati menurun 113 bps dari tahun lalu yang mencapai 27,09%. Penurunan nilai CAR tersebut didorong oleh pertumbuhan ATMR yang tumbuh 11,49% (yoy) dan melampaui pertumbuhan modal.

Pertumbuhan ATMR utamanya dipengaruhi oleh kenaikan ATMR Kredit dan Pasar yang tumbuh cukup tinggi masing-masing sebesar 10,74% dan 105,29% (yoy). Pertumbuhan ATMR Kredit seiring dengan penyaluran kredit yang tumbuh 12,40%, sedangkan pertumbuhan ATMR Pasar

dipengaruhi adanya penyesuaian perhitungan ATMR pada tahun 2024. Sementara itu, modal tumbuh 6,85% (yoy) cenderung melambat dari tahun lalu yang tumbuh 7,98% (yoy).

Tabel 6 Komponen ATMR Bank Umum

Komponen ATMR (Rp T)	Mar '23	Des '23	Mar '24	yoy		
				Mar'23	Des'23	Mar '24
ATMR Kredit	5.601	6.081	6.202	7,53%	7,79%	10,74%
ATMR Operasional	538	537	556	-47,03%	-46,88%	3,49%
ATMR Pasar	92	98	188	9,74%	57,52%	105,29%
Total ATMR	6.223	6.708	6.938	-1,20%	0,001%	11,49%

Sumber: OJK

Tabel 7 Rasio Keuangan Bank Umum

Indikator	2023		2024		qtq		yoy	
	Mar	Dec	Mar	Des '23	Mar '24	Mar '23	Mar '24	
CAR (%)	27,09	27,65	25,96	32	(169)	230	(113)	
BUK	27,14	27,75	25,98	32	(177)	229	(116)	
BUS	26,01	25,41	25,66	27	25	288	(35)	
ROA (%)	2,77	2,74	2,62	1	(12)	58	(15)	
BUK	2,80	2,78	2,65	2	(13)	60	(15)	
BUS	2,18	1,88	2,03	(16)	15	19	(15)	
NIM / NOM (%)	4,77	4,81	4,59	(4)	(22)	24	(18)	
BUK	4,86	4,92	4,68	(4)	(24)	24	(18)	
BUS	2,91	2,55	2,73	(17)	18	38	(18)	
BOPO (%)	79,36	78,92	80,05	258	113	(99)	69	
BUK	79,48	78,94	80,16	260	122	(46)	68	
BUS	75,78	78,31	76,89	178	(142)	(1.098)	111	
NPL / NPF Gross (%)	2,49	2,19	2,25	(24)	6	(50)	(24)	
BUK	2,50	2,19	2,27	(25)	8	(50)	(23)	
BUS	2,38	2,10	2,04	(18)	(6)	(21)	(34)	
NPL / NPF Net (%)	0,72	0,71	0,77	(6)	6	(12)	5	
BUK	0,73	0,72	0,78	(5)	6	(11)	5	
BUS	0,65	0,63	0,64	(6)	1	(17)	(1)	
LDR / FDR (%)	80,51	83,83	84,23	(9)	40	214	372	
BUK	80,79	84,11	84,52	11	41	210	373	
BUS	75,69	79,06	79,26	(339)	20	347	357	
AL/DPK (%)	28,91	28,73	27,18	290	(155)	(320)	(173)	
BUK	29,22	28,65	27,03	276	(162)	(306)	(219)	
BUS	23,55	30,07	29,76	515	(31)	(527)	621	
AL/NCD (%)	128,87	127,07	121,05	1.170	(602)	(1.477)	(782)	
BUK	129,65	126,13	119,86	1110	(627)	(1.416)	(979)	
BUS	114,10	144,76	142,96	2283	(180)	(2.571)	2.886	

Sumber: SPI Maret 2024

Tabel 8 Rasio Permodalan dan Rentabilitas Bank Umum

Rasio	KBMI 1			KBMI 2		
	Mar '23	Des '23	Mar '24	Mar '23	Des '23	Mar '24
CAR	33,02%	33,44%	33,14%	38,01%	36,92%	36,48%
ROA	1,36%	1,33%	1,30%	2,20%	1,60%	1,64%
BOPO	89,08%	88,50%	87,38%	91,79%	92,96%	93,21%
NIM	4,69%	4,93%	4,59%	4,33%	4,31%	4,05%
Rasio	KBMI 3			KBMI 4		
	Mar '23	Des '23	Mar '24	Mar '23	Des '23	Mar '24
CAR	25,73%	25,80%	25,32%	23,65%	24,77%	21,94%
ROA	1,85%	1,78%	1,87%	3,73%	3,85%	3,54%
BOPO	79,68%	79,98%	79,59%	70,08%	70,07%	71,81%
NIM	3,83%	3,79%	3,65%	5,35%	5,41%	5,19%

Sumber: SPI Maret 2024

Overview Kinerja BPR dan BPRS

Fungsi intermediasi BPR dan BPRS secara umum masih dalam kondisi yang cukup baik tecermin dari kredit/pembiayaan dan DPK yang masih tumbuh cukup baik. Aset BPR dan BPRS tumbuh relatif stabil sebesar 7,34% (yoy). DPK BPR dan BPRS tumbuh 8,60% (yoy) lebih tinggi dari tahun lalu yang tumbuh 7,20% (yoy). Kredit/pembiayaan BPR dan BPRS juga masih tumbuh 9,42% (yoy), meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 9 Perkembangan Kinerja BPR dan BPRS

Indikator	Nominal		qtq		yoy	
	Mar '23	Des '23	Mar '24	Des '23	Mar '24	Mar '23
Total Aset (Rp Miliar)	201.911	218.161	216.737	2,77%	-0,65%	7,47%
BPR	181.603	194.984	193.992	2,45%	-0,51%	6,39%
BPRS	20.307	23.177	22.745	5,55%	-1,87%	18,20%
Kredit/Pembiayaan (Rp milyar)	147.970	157.816	161.905	2,18%	2,59%	10,87%
BPR	132.625	140.791	144.210	2,04%	2,43%	9,77%
BPRS	15.345	17.025	17.696	3,30%	3,94%	21,41%
DPK (Rp Miliar)	140.682	153.179	152.781	2,77%	-0,26%	7,20%
BPR	127.088	137.909	137.662	2,40%	-0,18%	6,22%
BPRS	13.594	15.270	15.119	6,16%	-0,99%	17,21%
Tabungan	42.531	47.608	45.220	6,24%	-5,02%	5,47%
BPR	38.406	42.617	40.690	5,26%	-4,52%	4,68%
BPRS	4.125	4.991	4.530	15,46%	-9,25%	13,43%
Deposito	98.150	105.571	107.561	1,27%	1,88%	7,96%
BPR	88.682	95.293	96.971	1,18%	1,76%	6,91%
BPRS	9.469	10.279	10.590	2,17%	3,02%	18,94%

Sumber: OJK

2. Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

Pada periode Maret 2024, kinerja BPR masih menunjukkan kondisi yang cukup positif. DPK tercatat tumbuh meningkat melampaui pertumbuhan periode sebelumnya dan diikuti oleh kredit yang juga tumbuh walaupun melambat. Ketahanan BPR juga cukup solid didukung dengan permodalan yang masih tinggi di atas *threshold* meskipun

tercatat sedikit turun dibanding tahun lalu. Namun demikian, kinerja BPR perlu diperhatikan seiring dengan penurunan laba dan efisiensi dibandingkan tahun sebelumnya, yang juga disertai adanya peningkatan risiko kredit pada periode laporan.

Tabel 10 Indikator Umum BPR

Indikator	Nominal		qtq		yoy		
	Mar '23	Des '23	Mar'24	Des '23	Mar '24	Mar '23	Mar'24
Jumlah BPR	1,426	1,402	1,392	(9)	(10)	(36)	(34)
Total Aset (Rp milyar)	181,603	194,984	193,992	2.45%	-0.51%	6.39%	6.82%
Kredit (Rp milyar)	132,625	140,791	144,210	2.04%	2.43%	9.77%	8.73%
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	127,088	137,909	137,662	2.40%	-0.18%	6.22%	8.32%
- Tabungan (Rp milyar)	38,406	42,617	40,690	5.26%	-4.52%	4.68%	5.95%
- Deposito (Rp milyar)	88,682	95,293	96,971	1.18%	1.76%	6.91%	9.35%
CAR (%)	32.73	29.98	32.60	(96)	262	(544)	(13)
ROA (%)	1.82	1.00	0.89	(34)	(11)	6	(93)
BOPO (%)	84.37	89.37	91.35	217	198	(39)	698
NPL Gross (%)	8.51	9.87	10.70	(18)	83	107	219
NPL Net (%)	5.77	6.51	7.33	(39)	82	84	156
LDR (%)	76.98	76.56	77.37	(32)	81	267	39
CR (%)	12.34	13.65	12.45	44	(120)	(62)	11

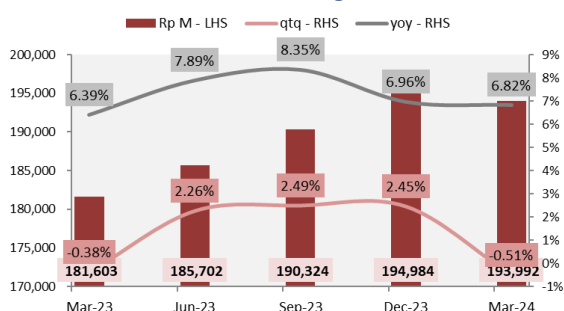
Sumber: SPI, Maret 2024

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

2.1 Aset BPR

Aset BPR pada Maret 2024 tumbuh 6,82% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 6,39% (yoy). Peningkatan pertumbuhan aset tersebut sejalan dengan DPK yang juga tumbuh dibandingkan periode yang sama dari tahun sebelumnya.

Grafik 15 Perkembangan Aset BPR



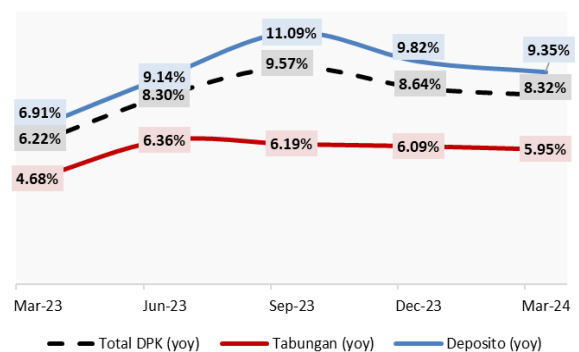
Sumber: SPI, Maret 2024

2.2 Sumber Dana BPR

DPK BPR pada Maret 2024 tumbuh 8,32% (yoy) menjadi Rp137,662 miliar meningkat dibandingkan dengan Maret 2023 yang tercatat tumbuh 6,22% (yoy). Pertumbuhan DPK tersebut didorong oleh seluruh

komponen DPK yaitu tabungan serta deposito di mana masing-masing tercatat tumbuh sebesar 5,95% (yoy) dan 9,35% (yoy), meningkat dari periode tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 4,68% (yoy) dan 6,91% (yoy). Adapun peningkatan pertumbuhan deposito antara lain dipengaruhi kenaikan suku bunga deposito BPR.

Grafik 16 Perkembangan DPK BPR



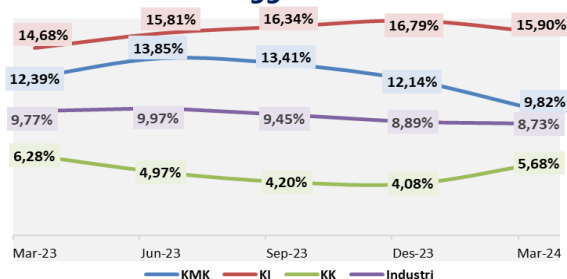
Sumber: SPI Maret 2024

2.3 Penggunaan Dana BPR

Kredit BPR pada Maret 2024 tumbuh 8,73% (yoy), melambat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mampu tumbuh 9,77% (yoy). Ditinjau dari jenis penggunaan, mayoritas kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif (56,75%) yang terdiri dari Kredit Modal Kerja/KMK (48,19%) dan Kredit Investasi/KI (8,56%) sedangkan sisanya untuk Kredit Konsumsi/KK (43,25%).

Pertumbuhan kredit BPR ditopang oleh semua jenis penggunaan di mana KMK tumbuh 9,82% (yoy), mengalami perlambatan dari 12,39% (yoy), dan untuk KI tercatat tumbuh 15,90% (yoy), meningkat dari 14,68% (yoy). Selaras dengan KMK, kredit konsumtif juga tumbuh melambat sebesar 5,68% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 6,28% (yoy).

Grafik 17 Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: SPI, Maret 2024

2.4 Rentabilitas BPR

Rentabilitas BPR pada Maret 2024 turun dibanding tahun sebelumnya, tecermin dari rasio ROA sebesar 0,89% atau turun 93 bps dibandingkan tahun sebelumnya (1,82%).

Seiring dengan penurunan rentabilitas, efisiensi BPR juga tercatat menurun, tecermin dari naiknya rasio BOPO sebesar 698 bps menjadi 91,35% dari 84,37% pada tahun sebelumnya. Peningkatan rasio BOPO disebabkan oleh kenaikan beban operasional yang cukup tinggi yaitu tercatat tumbuh sebesar 14,89% (yoy) dan melampaui pertumbuhan pendapatan operasional sebesar 6,12% (yoy).

2.5 Permodalan BPR

Permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari indikator CAR BPR yang tinggi, jauh di atas KPMM yaitu sebesar 32,60%, sedikit menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 32,73%. Penurunan CAR diakibatkan oleh melambatnya pertumbuhan modal sejalan dengan turunnya laba pada periode laporan.

3. Kinerja Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)

Kinerja BPRS pada Maret 2024 masih tetap terjaga dengan baik tecermin dari aset, DPK, dan pembiayaan BPRS yang tetap tumbuh walaupun melambat dibanding tahun sebelumnya, yaitu masing-masing sebesar 12,00% (yoy), 15,32% (yoy), dan 11,22% (yoy). Selain itu, perlu diperhatikan risiko pembiayaan BPRS tercatat sedikit meningkat

tecermin dari adanya peningkatan rasio NPF *gross* pada periode laporan. Ketahanan BPRS juga masih terjaga yang tecermin pada permodalan yang masih cukup baik dan masih meningkat dibanding tahun sebelumnya. Rentabilitas dan efisiensi BPRS juga tercatat menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 11 Indikator Umum BPRS

Indikator	Nominal		qtq		yoy	
	Mar '23	Des '23	Mar '24	Des '23	Mar '24	Mar '23
Jumlah BPRS	171	173	174	1	1	6
Total Aset (Rp Miliar)	20.307	23.177	22.745	5,55%	-1,87%	18,20%
Pembiayaan (Rp Miliar)	15.345	17.025	17.696	3,30%	3,94%	21,41%
Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)	13.594	15.270	15.119	6,16%	-0,99%	17,21%
- Tabungan iB (Rp Miliar)	4.125	4.991	4.530	15,46%	-9,25%	13,43%
- Deposito iB (Rp Miliar)	9.469	10.279	10.590	2,17%	3,02%	18,94%
CAR (%)	22,78	23,21	23,57	(491)	36	(131)
ROA (%)	1,70	2,05	1,63	(13)	(42)	(4)
BOPO (%)	85,69	85,79	93,82	72	803	(34)
NPF Gross (%)	7,12	6,49	7,44	(96)	95	7
FDR (%)	112,88	111,50	117,04	(309)	554	390

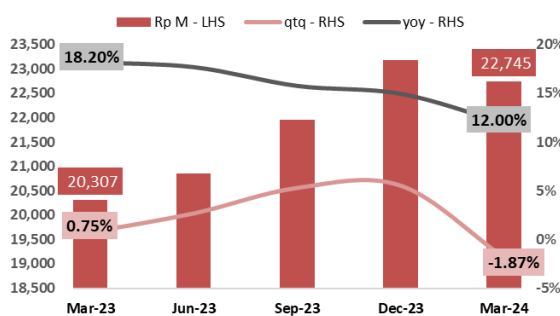
Sumber: SPS Maret 2024

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

3.1 Aset BPRS

Pada Maret 2024, aset BPRS tercatat sebesar Rp22,75 triliun atau tumbuh 12,00% (yoy), melambat dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 18,20% (yoy).

Sebagian besar BPRS memiliki total aset >Rp10 Miliar (166 BPRS dari 174 BPRS). Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya di mana jumlah BPRS dengan total aset pada kelompok ini sebanyak 161 BPRS.

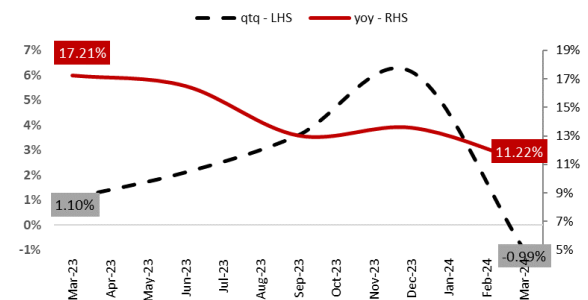
Grafik 18 Tren Aset BPRS

Sumber: SPS Maret 2024

3.2 Sumber Dana BPRS

Sumber dana BPRS didominasi oleh DPK sebesar Rp15,12 triliun. Pada Maret 2024, DPK BPRS tumbuh 11,22% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 17,21% (yoy).

Berdasarkan komposisi, porsi DPK BPRS terbesar berada pada deposito iB akad *Mudharabah* yakni 70,04% yang sebagian besar dalam tenor 12 bulan (36,04% atau senilai Rp5,45 triliun). Secara keseluruhan deposito iB BPRS tumbuh 11,84% (yoy) melambat dibandingkan dengan tahun lalu yang tumbuh 18,94% (yoy). Sejalan dengan perlambatan pada deposito iB, tabungan iB BPRS juga tumbuh 9,80% (yoy) melambat dari tahun lalu yang tumbuh 13,43% (yoy).

Grafik 19 Tren Pertumbuhan DPK BPRS

Sumber: SPS Maret 2024

3.3 Penggunaan Dana BPRS

Pada Maret, pembiayaan BPRS mencapai Rp17,70 triliun, tumbuh sebesar 15,32% (yoy) melambat dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tumbuh 21,41% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, pembiayaan BPRS mayoritas disalurkan ke sektor konstruksi (15,94%) dan perdagangan (14,23%). Pembiayaan ke sektor konstruksi tumbuh tinggi 53,12% (yoy) dari tahun sebelumnya 43,31% (yoy). Sedangkan sektor perdagangan justru berkontraksi -7,52% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh tinggi 40,25% (yoy).

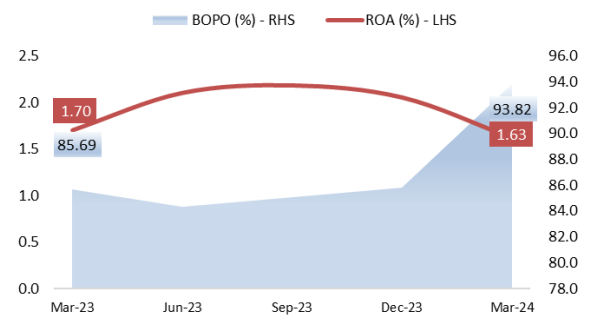
Berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan BPRS didominasi pembiayaan produktif sebesar 58,70% di mana pembiayaan modal kerja (porsi 47,59%) masih tumbuh cukup tinggi 20,72% (yoy), meski melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang dapat tumbuh 31,18% (yoy). Sejalan dengan pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi juga tumbuh melambat sebesar 4,46% (yoy) dibandingkan tahun lalu tumbuh 12,26% (yoy). Selain itu, pembiayaan konsumtif juga tumbuh melambat 12,66% (yoy) setelah tahun sebelumnya dapat tumbuh 14,92% (yoy).

3.4 Rentabilitas BPRS

Pada periode laporan, rentabilitas BPRS mengalami penurunan yang tercermin dari rasio ROA turun 7 bps menjadi 1,63% dari 1,70% pada tahun sebelumnya, disebabkan

oleh melambatnya laba BPRS. Penurunan rentabilitas sejalan dengan pemburukan efisiensi BPRS tercermin dari rasio BOPO yang meningkat tinggi 813 bps menjadi 93,92%, jauh meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 85,69%.

Grafik 20 Tren ROA dan BOPO BPRS



Sumber: SPS Maret 2024

3.5 Permodalan BPRS

Permodalan BPRS masih cukup solid dengan CAR sebesar 23,57%, meningkat sebesar 79 bps dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 22,78%. Peningkatan CAR didorong oleh pertumbuhan modal BPRS yang lebih besar dari pertumbuhan ATMR BPRS. CAR BPRS tersebut masih cukup tinggi untuk dapat menyerap potensi risiko yang dihadapi BPRS, atau masih jauh di atas *threshold*.

Halaman ini sengaja dikosongkan

3 Penyaluran Kredit/Pembiayaan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

3 Penyaluran Kredit/Pembiayaan Perbankan

Pada triwulan I-2024, perkembangan kredit/pembiayaan perbankan (Bank Umum) masih cukup baik sejalan dengan aktivitas usaha yang masih berada pada level ekspansif dan konsumsi rumah tangga yang juga meningkat. Dilihat dari kenaikan nominal kredit secara tahunan, kredit/pembiayaan Bank Umum pada triwulan ini utamanya didorong oleh sektor rumah tangga dan perdagangan. Sementara pada BPR dan BPRS kredit/pembiayaan mengalami perlambatan utamanya pada sektor perdagangan, restoran, dan hotel namun sektor *real estate* tumbuh relatif tinggi menahan perlambatan yang semakin dalam.

A. Penyaluran Kredit/Pembiayaan Bank Umum (BUK dan BUS)

1. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi

Penyaluran kredit/pembiayaan Bank Umum (selanjutnya disebut kredit) pada triwulan I-2024 masih tumbuh baik sebesar 13,42% (yoy) meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 9,93% (yoy). Secara triwulanan, kredit tumbuh 3,11% (qtq), meskipun melambat jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,70% (qtq). Peningkatan pertumbuhan kredit secara tahunan antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi domestik dari 5,04% (yoy) pada triwulan I-2023 menjadi 5,11% (yoy) pada triwulan I-2024. Hal ini didorong oleh permintaan yang solid tecermin pada pertumbuhan konsumsi dan investasi serta tumbuhnya pengeluaran pemerintah.

Porsi terbesar penyaluran kredit Bank Umum masih kepada sektor bukan lapangan usaha - rumah tangga (porosi 23,56%). Penyaluran kredit pada sektor ini tumbuh 10,35% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 9,15% (yoy). Pertumbuhan kredit pada sektor ini utamanya didorong oleh sektor rumah tangga untuk pemilikan rumah

tinggal yang tumbuh sebesar 6,87% (yoy), utamanya pada pemilikan rumah tinggal tipe di atas 70 (porosi 2,87%) yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 23,18% (yoy) dari 0,39% (yoy) pada Maret 2023. Selain itu, pertumbuhan kredit sektor rumah tangga juga didorong oleh pemilikan rumah tinggal tipe 22 s.d. 70 (porosi 6,11%) yang tumbuh 3,72% (yoy) meski melambat dari tahun lalu yang tumbuh 9,00% (yoy). Kredit rumah tangga untuk pemilikan kendaraan bermotor juga tumbuh sebesar 12,74% (yoy), utamanya didorong oleh pertumbuhan pemilikan mobil roda empat yang tumbuh 15,37% (yoy) meskipun melambat dari tahun lalu yang tumbuh 19,28% (yoy).

Sementara itu untuk kredit produktif, sektor ekonomi dengan porosi penyaluran kredit terbesar adalah sektor perdagangan besar dan eceran (porosi 15,97%). Kredit pada sektor ini tumbuh 10,88% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 5,28% (yoy). Peningkatan pada sektor ini sebagian besar didorong oleh tumbuhnya kredit perdagangan besar makanan, minuman, dan

tembakau yang tumbuh 36,58% (yoy), meningkat dari tahun lalu yang terkontraksi -8,68% (yoy). Pertumbuhan kredit perdagangan besar dan eceran juga didorong oleh kredit Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat, Serta Produk Sejenis yang tercatat meningkat signifikan sebesar 93,20% (yoy) dari pertumbuhan tahun lalu yang terkontraksi -8,50% (yoy).

Sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit kedua terbesar yaitu sektor industri pengolahan (porsi 15,58%) tumbuh 9,13% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 6,50% (yoy). Adapun peningkatan kredit pada sektor ini utamanya terjadi pada subsektor makanan dan minuman (porsi: 4,50%) yang tumbuh 13,74% (yoy) dari 6,45% (yoy) atau naik sebesar Rp39,41 triliun. Selain itu, industri kertas, barang dari kertas dan sejenisnya (porsi: 1,66%) juga mengalami peningkatan kredit sebesar Rp20,98 triliun atau tumbuh

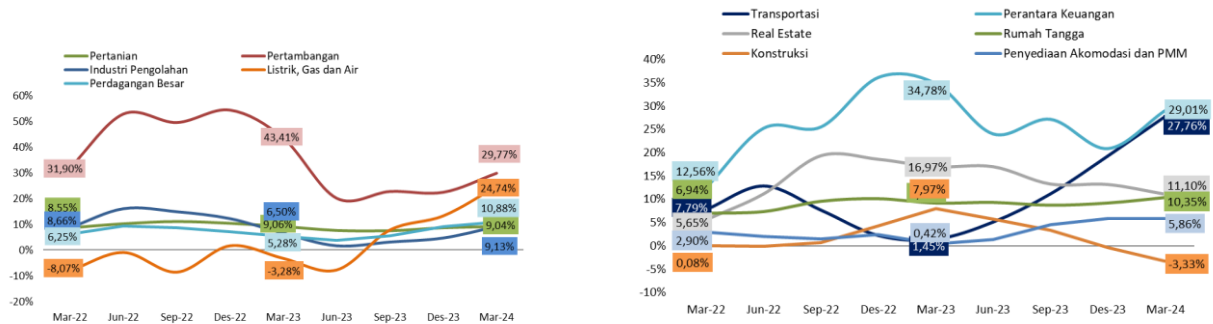
sebesar 21,17% (yoy) dari 13,59% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Kredit yang disalurkan ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan juga masih cukup besar dengan porsi 6,96% dari total penyaluran kredit perbankan. Kredit ke sektor ini tumbuh 9,04% (yoy), sedikit melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh 9,06% (yoy). Dampak dari fenomena El Nino yang terjadi menyebabkan pola cuaca menjadi tidak menentu, sehingga meningkatkan risiko gagal panen ditengarai menjadi salah satu faktor yang membuat bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya kepada sektor pertanian. Adapun pertumbuhan kredit pada sektor ini masih ditopang oleh subsektor pertanian dan perburuan, utamanya pada subsektor perkebunan kelapa sawit yang tumbuh 10,07% (yoy) serta pembibitan dan budidaya unggas yang tumbuh 14,53% (yoy).

Tabel 12 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi

No	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp T)		qtq		yoy		Porsi	
		Mar'23	Des'23	Mar'24	Des'23	Mar'24	Mar'23		Mar'24
Lapangan Usaha									
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	462,30	497,66	504,08	3,56%	1,29%	9,06%	9,04%	6,96%
2	Perikanan	19,58	20,80	20,73	0,33%	-0,31%	3,20%	5,88%	0,29%
3	Pertambangan dan Penggalian	237,22	290,47	307,84	7,58%	5,98%	43,41%	29,77%	4,25%
4	Industri Pengolahan	1.034,11	1.117,34	1.128,54	3,42%	1,00%	6,50%	9,13%	15,58%
5	Listrik, gas dan air	151,46	183,96	188,93	6,27%	2,70%	-3,28%	24,74%	2,61%
6	Konstruksi	403,52	395,10	390,06	-1,16%	-1,27%	7,97%	-3,33%	5,38%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	1.052,20	1.139,16	1.166,72	3,02%	2,42%	5,28%	10,88%	16,10%
8	Penyediaan akomodasi dan PMM	122,70	130,79	129,88	2,02%	-0,70%	0,42%	5,86%	1,79%
9	Transportasi	303,26	373,42	387,44	5,32%	3,75%	1,45%	27,76%	5,35%
10	Perantara Keuangan	318,21	369,67	410,52	6,94%	11,05%	34,78%	29,01%	5,67%
11	Real Estate	318,86	356,07	354,26	3,17%	-0,51%	16,97%	11,10%	4,89%
12	Admistrasi Pemerintahan	42,80	65,29	66,28	20,47%	1,52%	26,41%	54,87%	0,91%
13	Jasa Pendidikan	14,89	16,88	17,12	5,19%	1,43%	1,74%	14,99%	0,24%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	32,31	37,41	37,98	2,26%	1,53%	15,51%	17,56%	0,52%
15	Jasa Kemasyarakatan	130,95	158,56	149,49	9,36%	-5,72%	33,56%	14,16%	2,06%
16	Jasa Perorangan	3,97	4,00	3,89	0,14%	-2,74%	3,66%	-1,95%	0,05%
17	Badan Internasional	0,02	0,02	0,02	-9,12%	-6,09%	-92,68%	-31,77%	0,00%
Bukan Lapangan Usaha									
18	Rumah Tangga	1.546,49	1.664,20	1.706,56	3,03%	2,55%	9,15%	10,35%	23,56%
19	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	250,60	269,46	274,28	2,72%	1,79%	9,50%	9,45%	3,79%
Industri		6.445,46	7.090,24	7.244,64	3,70%	2,18%	9,93%	12,40%	100,00%

Sumber: SPI Maret 2024

Grafik 21 Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi**Tabel 13 Rincian Kredit/Pembiayaan Bank Umum pada Sektor Rumah Tangga**

No.	Subsektor Rumah Tangga	Kredit (Rp T)			qtq		yoy		Porsi
		Mar'23	Des'23	Mar'24	Mar'23	Mar'24	Mar'23	Mar'24	
1.	Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Tinggal	596,90	659,77	637,90	1,76%	-3,31%	7,34%	6,87%	9,35%
2.	Rumah Tangga untuk Pemilikan Flat atau Apartemen	27,95	29,55	29,63	0,01%	0,27%	5,29%	6,02%	0,41%
3.	Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Toko (Ruko) atau Rumah Kantor (Rukan)	20,74	22,48	70,11	-1,22%	211,95%	-0,66%	238,08%	0,38%
4.	Rumah Tangga untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor	119,56	131,42	134,79	3,11%	2,57%	15,43%	12,74%	1,86%
5.	Rumah Tangga untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya	11,20	14,37	16,35	4,42%	13,74%	19,19%	46,01%	0,23%
6.	Rumah Tangga untuk Keperluan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	81,63	107,54	111,73	10,57%	3,90%	59,62%	36,88%	1,54%

Sumber: SPI Maret 2024

Sektor ekonomi pertambangan dan penggalan (porsi 4,25%) tercatat tumbuh tinggi 29,77% (yoy), meski melambat dari pertumbuhan tahun sebelumnya 43,41% (yoy). Pertumbuhan pada sektor ini didorong oleh subsektor pertambangan batubara, penggalan gambut, dan gasifikasi batubara serta subsektor pertambangan logam dan bijih timah yang tumbuh tinggi masing-masing 56,79% (yoy) dan 69,88% (yoy).

Penyaluran kredit ke sektor perantara keuangan juga masih cukup tinggi (porsi 5,67%), yaitu tumbuh 29,01% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 34,78% (yoy). Pertumbuhan di sektor ini didorong oleh subsektor perantara keuangan lainnya (non-bank) yang tumbuh 34,03% (yoy) melambat dari tahun sebelumnya 38,78% (yoy), utamanya tumbuh pada perantara keuangan lainnya (non bank) selain *leasing*.

Kredit sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi (porsi 5,35%) juga mencatatkan pertumbuhan yang meningkat menjadi 27,76% (yoy) dari tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 1,45% (yoy). Pertumbuhan sektor ini antara lain didorong oleh pertumbuhan pada subsektor jasa penunjang angkutan serta pos dan telekomunikasi yang tumbuh masing-masing 48,29% (yoy) dan 18,55% (yoy), jauh meningkat dari pertumbuhan tahun lalu sebesar 9,55% (yoy) dan 0,36% (yoy).

Sementara itu, penyaluran kredit pada sektor konstruksi justru berkontraksi -3,33% (yoy) dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 7,97% (yoy). Penurunan kredit pada sektor konstruksi utamanya terdapat pada subsektor konstruksi gedung dan bangunan sipil yaitu dari 7,75% (yoy) menjadi -3,21% (yoy). Tidak hanya itu, penyaluran kredit pada subsektor instalasi gedung dan bangunan sipil juga berkontraksi dari 11,85% (yoy) menjadi -5,20% (yoy).

2. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Lokasi Proyek (Spasial)

Pada triwulan I-2024, distribusi penyaluran kredit/pembiayaan (selanjutnya disebut kredit) Bank Umum berdasarkan wilayah penyebaran (spasial) masih didominasi oleh Jawa dan Sumatera dengan porsi masing-masing sebesar 68,54% dan 13,56%. Penyaluran kredit pada wilayah Jawa tercatat tumbuh 13,56% (yoy), meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,60% (yoy). Selanjutnya, penyaluran kredit pada wilayah Sumatera juga tumbuh meskipun sedikit melambat dari triwulan I-2023 sebesar 7,71% (yoy) menjadi 7,38% (yoy).

Penyaluran kredit di wilayah Jawa didominasi oleh provinsi DKI Jakarta dengan porsi 47,17%, dan mengalami peningkatan pertumbuhan kredit yaitu sebesar 18,96% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 12,12% (yoy). Penyaluran kredit pada provinsi tersebut secara nominal meningkat sebesar Rp373,25 triliun. Peningkatan kredit pada provinsi DKI Jakarta utamanya didorong oleh sektor perantara keuangan yang tumbuh 30,91% (yoy) dengan kenaikan nominal kredit sebesar Rp89,76 triliun. Selain Provinsi DKI Jakarta, peningkatan kredit pada wilayah Jawa juga didorong oleh Provinsi Jawa Barat dengan porsi 18,95%. Kredit pada Provinsi Jawa Barat meningkat dari 7,92% (yoy) menjadi 11,61% (yoy). Peningkatan kredit pada provinsi tersebut utamanya didorong oleh sektor pertambangan dan penggalian yang meningkat sebesar Rp15,28 triliun atau tumbuh dari 142,42% (yoy) menjadi 196,22% (yoy).

Penyaluran kredit di wilayah Sumatera didominasi oleh provinsi Sumatera Utara

dengan porsi 26,72%. Penyaluran kredit Sumatera Utara secara nominal naik Rp12,65 triliun atau tumbuh meningkat dari 2,68% (yoy) menjadi 5,06% (yoy). Peningkatan pertumbuhan kredit di Sumatera Utara utamanya didorong oleh sektor Industri Pengolahan yang naik Rp1,88 triliun atau tumbuh 21,34% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 18,02% (yoy). Sementara itu, provinsi yang menyumbang perlambatan kredit pada Pulau Sumatera adalah provinsi Riau dengan porsi 15,41% yang secara nominal penyaluran kreditnya naik Rp11,46 triliun namun melambat dari 15,65% (yoy) pada triwulan I-2023 menjadi 8,19% (yoy). Melambatnya pertumbuhan kredit di Provinsi Riau utamanya akibat sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang turun sebesar Rp345,64 miliar, berkontraksi -4,24% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 19,61% (yoy).

Penyaluran kredit di wilayah Kalimantan juga tumbuh melambat yaitu dari 14,86% (yoy) menjadi 8,77% (yoy) meskipun porsinya hanya sebesar 6,43%. Penyaluran kredit di pulau ini sebagian besar disalurkan pada Provinsi Kalimantan Timur dengan porsi 43,04% dan tumbuh 10,58% (yoy), melambat dari 18,35% (yoy) pada tahun lalu. Perlambatan kredit di Kalimantan Timur utamanya pada sektor pertanian yang turun Rp2,94 triliun atau berkontraksi -7,18% (yoy) dari tahun lalu yang tumbuh 10,61% (yoy). Tidak hanya itu, penyaluran kredit pada sektor real estate juga turun Rp473,14 miliar sehingga menyebabkan terjadinya kontraksi dari 9,70% (yoy) menjadi -10,13% (yoy). Hal ini sejalan dengan kontribusi sektor real

estate terhadap PDRB yang juga tercatat melambat dari 4,01% (yoy) menjadi 3,22% (yoy), namun dengan porsi relatif kecil hanya sebesar 0,8%.

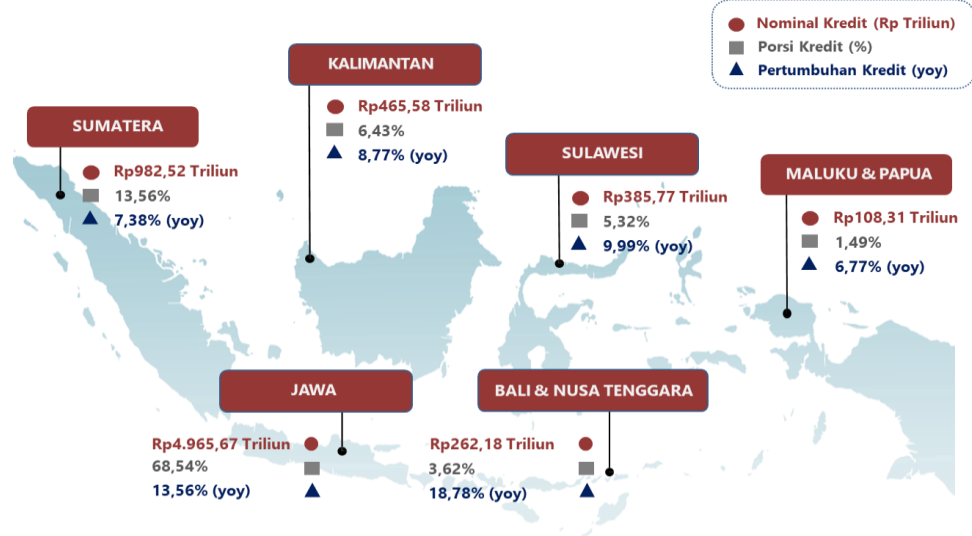
Penyaluran kredit di wilayah Sulawesi (porsi: 5,32%) tumbuh meningkat dari 9,74% (yoy) menjadi 9,99% (yoy). Penyaluran kredit di pulau ini sebagian besar disalurkan pada Provinsi Sulawesi Selatan (porsi: 44,41%) dan tumbuh meningkat dari 7,13% (yoy) menjadi 9,85% (yoy). Peningkatan kredit pada provinsi tersebut utamanya didorong sektor rumah tangga yang meningkat Rp5,67 triliun sehingga mendorong pertumbuhan kredit dari 6,17% (yoy) menjadi 10,99% (yoy).

Tidak hanya itu saja, penyaluran kredit di wilayah Papua dan Maluku (porsi: 1,49%) juga tumbuh meningkat dari 4,22% (yoy) menjadi 6,77% (yoy). Penyaluran kredit di wilayah tersebut didominasi oleh Provinsi Papua dengan porsi sebesar 38,62% dan tumbuh meningkat dari -3,83% (yoy) menjadi 8,78% (yoy). Peningkatan kredit di Papua didorong oleh sektor pertanian sebesar Rp1,74 triliun atau tumbuh dari 34,05% (yoy) menjadi 39,40% (yoy). Penyaluran kredit sektor pertanian yang tumbuh lebih tinggi pada periode laporan ditengarai merupakan bentuk dukungan industri perbankan terhadap upaya Pemerintah Papua dalam menggalakkan pengembangan ekonomi hijau. Sebaliknya, Provinsi Maluku Utara (porsi: 23,17%) justru mencatatkan pertumbuhan kredit yang melambat dari 8,51% (yoy) menjadi 7,79% (yoy) meskipun

secara nominal naik Rp1,81 triliun. Adapun penurunan kredit terbesar di Maluku Utara terdapat pada sektor *Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan sebesar Rp447,99 miliar atau berkontraksi -70,82% (yoy).

Di sisi lain, penyaluran kredit pada wilayah Bali dan Nusa (porsi: 3,62%) justru mencatatkan pertumbuhan yang meningkat cukup signifikan dari 3,57% (yoy) menjadi 18,78% (yoy). Sebagai informasi, penyaluran kredit pada wilayah tersebut didominasi oleh Provinsi Bali dengan porsi 44,11% yang tumbuh 9,22% (yoy), meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 1,86% (yoy). Pertumbuhan kredit yang lebih tinggi di provinsi tersebut didorong oleh sektor perdagangan besar dan eceran yang meningkat Rp1,90 triliun dan tumbuh meningkat dari 2,90% (yoy) menjadi 6,80% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, Provinsi Nusa Tenggara Barat (porsi: 35,69%) juga mencatatkan pertumbuhan kredit yang lebih tinggi sebesar 35,69% (yoy) dibandingkan triwulan I-2023 yang berkontraksi -2,99% (yoy). Peningkatan kredit di provinsi tersebut utamanya pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp17,32 triliun atau tumbuh cukup signifikan dari -29,43% (yoy) menjadi 112,21% (yoy). Sebagaimana diketahui, selama ini Provinsi Nusa Tenggara Barat berfokus pada pengelolaan potensi sektor pertambangan sebagai pondasi ekonomi di provinsi tersebut.

Grafik 22 Persebaran Kredit/Pembiayaan Bank Umum menurut Lokasi Proyek (Spasial)



Sumber: LBUT, diolah

Tabel 14 Porsi Kredit/Pembiayaan berdasarkan Sektor Ekonomi menurut Lokasi Proyek (Spasial)

No.	Sektor Ekonomi	Porsi					
		Pulau Jawa	Pulau Sumatera	Pulau Kalimantan	Pulau Sulawesi	Bali dan Nusa Tenggara	Papua dan Maluku
Lapangan Usaha							
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	3,45%	16,69%	24,89%	7,17%	5,43%	9,10%
2	Perikanan	0,20%	0,37%	0,35%	1,01%	0,47%	0,54%
3	Pertambangan dan Penggalian	2,59%	3,74%	14,80%	4,68%	14,22%	5,51%
4	Industri Pengolahan	17,31%	16,89%	6,55%	7,75%	3,88%	8,64%
5	Listrik, gas dan air	2,71%	2,27%	1,63%	5,01%	1,69%	0,08%
6	Konstruksi	6,58%	2,51%	3,54%	3,24%	2,09%	2,25%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	15,83%	15,61%	13,02%	19,00%	20,67%	16,90%
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	1,56%	1,40%	1,13%	1,58%	9,32%	2,11%
9	Transportasi, perdagangan dan komunikasi	6,74%	2,31%	3,30%	1,26%	1,13%	2,99%
10	Perantara Keuangan	8,05%	0,25%	0,25%	0,32%	0,32%	0,18%
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	6,24%	1,98%	1,83%	2,25%	1,70%	1,33%
12	Admistrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,26%	0,01%	0,05%	0,07%	0,01%	0,49%
13	Jasa Pendidikan	0,26%	0,22%	0,11%	0,19%	0,23%	0,02%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,57%	0,57%	0,13%	0,33%	0,73%	0,18%
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan lainnya	2,20%	1,53%	1,66%	2,29%	2,39%	1,79%
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	0,04%	0,06%	0,03%	0,09%	0,10%	0,46%
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya							
19	Rumah Tangga	21,03%	29,46%	25,78%	35,22%	27,35%	41,09%
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	3,37%	4,12%	0,95%	8,54%	8,29%	6,33%
Total		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Ket: Shading hijau menunjukkan lima sektor dengan porsi terbesar di wilayah tersebut

Sumber: LBUT, diolah

3. Perkembangan Penyaluran Kredit/Pembiayaan UMKM

Pada triwulan I-2024, kredit UMKM tumbuh 8,12% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,63% (yoy). Porsi penyaluran kredit UMKM per Maret 2024 tercatat sebesar 20,27% terhadap total kredit bank umum.

Penyaluran kredit UMKM masih terfokus pada sektor perdagangan besar dan eceran

(porsi 46,92%) yang tumbuh 4,32% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 6,92% (yoy) dan mendorong perlambatan atas pertumbuhan kredit UMKM. Selain itu, sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit UMKM terbesar kedua yakni pertanian, perburuan dan kehutanan (porsi 17,05%) tercatat tumbuh

relatif tinggi sebesar 14,75% (yoy), walaupun juga melambat dari 23,25% (yoy) pada tahun sebelumnya.

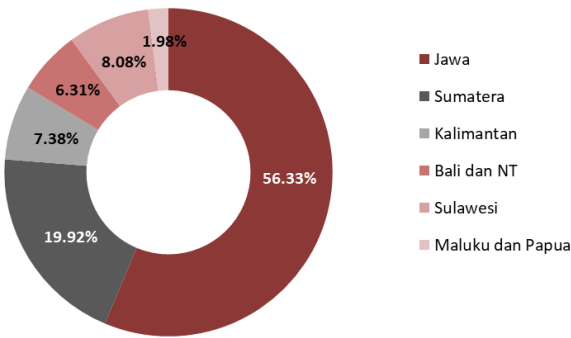
Meskipun kredit UMKM melambat, kualitas kredit UMKM masih terjaga dengan rasio NPL di bawah *threshold* 5% yaitu sebesar 3,98%, meskipun sedikit naik dari tahun sebelumnya sebesar 3,72%. Adapun kenaikan rasio NPL utamanya terjadi pada sektor jasa perorangan yang melayani rumah tangga yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 2,54% menjadi 3,56%. Selain itu, NPL sektor real estate dan jasa perusahaan naik dari 4,00% menjadi 4,85%, dengan porsi NPL masing-masing sebesar 0,23% dan 4,68% dari total NPL UMKM. Sementara itu, terdapat perbaikan NPL kredit UMKM antara lain pada sektor konstruksi; listrik, gas, dan air; pertambangan; dan perantara keuangan.

Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 56,33%, terutama di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara itu, porsi kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) sebesar 23,74%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 20,38% (yoy), meningkat dari tahun lalu sebesar 10,85%

(yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM di Jawa Timur sebagai wilayah dengan porsi penyaluran kredit UMKM terbesar (14,82%), tumbuh 7,41% (yoy) walaupun melambat dari tahun sebelumnya sebesar 9,18% (yoy).

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (62,92%) yang tumbuh 7,45% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya sebesar 10,69% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM kelompok bank BUSN dan BPD tumbuh masing-masing 7,22% (yoy) dan 18,35% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya masing-masing 3,62% (yoy) dan 13,16% (yoy). Di sisi lain, kredit UMKM kelompok KCBLN berkontraksi lebih dalam menjadi -17,85% (yoy) dibanding tahun sebelumnya yang berkontraksi -12,60% (yoy).

Grafik 23 Penyebaran Kredit/Pembiayaan UMKM



Sumber: SPI Maret 2024

Tabel 15 Kredit/Pembiayaan UMKM berdasarkan Kelompok Bank

Kelompok Bank	Baki Debet (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Mar '23	Des '23	Mar '24		Des '23	Mar'24	Mar '23	Mar'24
BUMN	859.748	917.478	923.789	62,92%	2,18%	0,69%	10,69%	7,45%
BUSN	406.242	431.542	435.577	29,67%	2,70%	0,93%	3,62%	7,22%
BPD	91.917	108.053	108.786	7,41%	1,94%	0,68%	13,16%	18,35%
KCBLN	78	59	64	0,00%	0,22%	9,94%	-12,60%	-17,85%
Total UMKM	1.357.985	1.457.132	1.468.216	100%	2,28%	0,76%	8,63%	8,12%

Sumber: SPI Maret 2024

Terkait dengan kredit UMKM dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR), menurut data dari Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, realisasi penyaluran KUR selama tahun 2024 sampai dengan 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp70,66 triliun (23,55% dari target tahun 2024 sebesar Rp300 triliun) dan diberikan kepada 1,21 juta debitur. KUR disalurkan oleh Bank dan Non-Bank.

Berdasarkan jenisnya, sebagian besar KUR disalurkan kepada KUR Mikro sebesar Rp47,42 triliun (67,12%), diikuti KUR Kecil Rp22,85 triliun (32,34%), KUR Super Mikro Rp381,81 miliar (0,54%), dan KUR Pekerja Migran Indonesia (PMI) Rp5,59 miliar (0,01%).

B. Penyaluran Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS

1. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi

Kredit/pembiayaan BPR dan BPRS (selanjutnya disebut kredit) pada triwulan I - 2024 tumbuh 9,42% (yoy), melambat dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 10,87% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, salah satu kredit terbesar antara lain disalurkan ke sektor Perdagangan, Restoran, dan Hotel dengan porsi 21,82%. Kredit pada sektor ini tumbuh sebesar 6,47% (yoy), melambat dari 12,13% (yoy) pada tahun sebelumnya, sehingga menyebabkan perlambatan kredit BPR dan BPRS. Selain itu, penyaluran ke sektor bukan lapangan usaha - rumah tangga juga cukup besar dengan porsi 11,83% dan tumbuh sebesar 4,32% (yoy), melambat dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 16,34% (yoy). Sektor konstruksi (porsi 6,74%) meskipun tumbuh melambat namun masih mencatatkan

pertumbuhan yang tinggi sebesar 28,91% (yoy) dari tahun lalu tumbuh 32,28% (yoy). Meski demikian, kredit BPR dan BPRS masih tumbuh baik antara lain didukung oleh penyaluran kredit pada sektor *real estate*, usaha persewaan, dan jasa perusahaan yang tumbuh 18,44% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 15,30% (yoy). Secara nominal, sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan (porsi: 6,35%) serta transportasi, pergudangan, dan komunikasi (porsi: 3,49%) juga menjadi penyokong pertumbuhan kredit BPR dan BPRS dimana kedua sektor tersebut masing-masing mampu tumbuh 7,31% (yoy) dan 31,61% (yoy) pada Maret 2024. Selain itu, jumlah penyaluran kredit ke sektor industri pengolahan dengan porsi sebesar 3,40%, ikut mendorong pertumbuhan kredit BPR dan BPRS yang tercatat sebesar 21,06% (yoy).

Tabel 16 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan BPR/BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi

No	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp M)		qtq		yoy		Porsi	
		Mar'23	Des-23	Mar'24	Des-23	Mar'24	Mar'23		Mar'24
1	Pertanian, Perburuhan, dan Kehutanan	9.575	9.896	10.275	8,00%	3,83%	18,79%	7,31%	6,35%
2	Perikanan	614	645	630	2,46%	-2,34%	26,90%	2,46%	0,39%
3	Pertambangan dan Penggalian	1.115	1.410	1.350	14,57%	-4,23%	36,38%	21,11%	0,83%
4	Industri Pengolahan	4.543	5.186	5.499	1,36%	6,04%	29,22%	21,06%	3,40%
5	Listrik, Gas dan Air	220	239	216	-4,58%	-9,78%	22,68%	-1,60%	0,13%
6	Konstruksi	8.467	10.687	10.915	5,92%	2,14%	32,28%	28,91%	6,74%
7	Perdagangan, Restoran dan Hotel	33.186	34.809	35.334	0,68%	1,51%	12,13%	6,47%	21,82%
8	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	4.290	5.336	5.646	5,76%	5,82%	32,25%	31,61%	3,49%
9	Perantara Keuangan	1.834	1.969	2.273	-8,13%	15,47%	55,77%	23,94%	1,40%
10	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	6.608	7.552	7.827	3,83%	3,65%	15,30%	18,44%	4,83%
11	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan Dan Jaminan Sosial Wajib	225	249	242	-0,06%	-2,89%	-20,58%	7,28%	0,15%
12	Jasa Pendidikan	429	508	515	7,06%	1,28%	1,79%	20,04%	0,32%
13	Jasa Sosial/Masyarakat	11.258	11.671	11.406	1,11%	-2,27%	-6,87%	1,31%	7,04%
14	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	241	200	190	-4,89%	-4,79%	-35,32%	-21,10%	0,12%
15	Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya	8	13	15	-3,80%	17,89%	-86,63%	104,45%	0,01%
16	Bukan Lapangan Usaha - Rumah Tangga	18.362	18.570	19.155	2,13%	3,15%	16,34%	4,32%	11,83%
17	Bukan Lapangan Usaha - Lainnya	46.994	48.877	50.417	1,27%	3,15%	3,85%	7,28%	31,14%
Total		147.970	157.816	161.905	2,18%	2,59%	10,87%	9,42%	100%

Sumber: SPI dan SPS Maret 2024

2. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Lokasi (Spasial)

Berdasarkan lokasi, sebagian besar kredit BPR dan BPRS disalurkan ke wilayah Jawa dengan porsi sebesar 60,23%. Kredit di wilayah ini tumbuh 9,15% (yoy), melambat dari tahun lalu yang tumbuh 10,68% (yoy). Meski demikian, pertumbuhan di wilayah ini masih didorong utamanya oleh Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah yang masing-masing tumbuh 16,96% (yoy); 8,78% (yoy) dan 4,04% (yoy). Besarnya kredit di wilayah Jawa sejalan dengan mayoritas BPR dan BPRS di Indonesia beroperasi di wilayah tersebut.

Selain itu, kredit kedua terbesar terdapat di wilayah Sumatera dengan porsi 19,11%.

Kredit di wilayah ini tumbuh 13,02% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 12,87% (yoy). Peningkatan utamanya didorong oleh Provinsi Kepulauan Riau yang tumbuh 22,33% (yoy).

Dilihat dari pertumbuhannya, kredit di wilayah Kalimantan tumbuh tertinggi sebesar 16,90% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 46,58% (yoy), namun dengan porsi yang relatif kecil hanya sebesar 3,00% dari total kredit BPR dan BPRS. Pertumbuhan di wilayah ini terutama didorong oleh Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang masing-masing tumbuh 50,01% (yoy) dan 10,57% (yoy).

Tabel 17 Persebaran Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS menurut Lokasi (Spasial)

	Kredit (RP M)			qtq		yoy		Porsi
	Mar'23	Des'23	Mar-24	Des'23	Mar'24	Mar'23	Mar'24	
Jawa	89.350	94.817	97.523	1,46%	2,85%	10,68%	9,15%	60,23%
Sumatera	27.374	29.967	30.939	3,03%	3,24%	12,87%	13,02%	19,11%
Kalimantan	4.156	4.758	4.858	14,71%	2,11%	46,58%	16,90%	3,00%
Bali - Nusra	15.510	16.257	16.458	2,58%	1,24%	5,30%	6,11%	10,17%
Sulampua	11.580	12.018	12.128	0,83%	0,91%	6,05%	4,73%	7,49%
Total	147.970	157.816	161.905	2,18%	2,59%	10,87%	9,42%	100%

Sumber: SPI dan SPS Maret 2024

Halaman ini sengaja dikosongkan

4 Profil Risiko Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

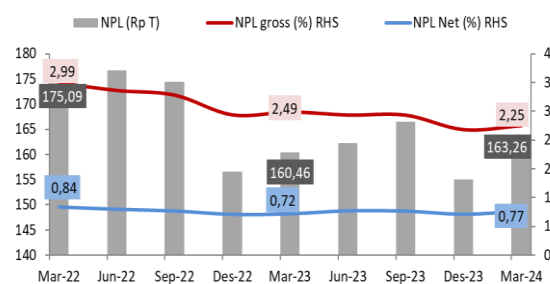
4 Profil Risiko Perbankan

Pada periode laporan, profil risiko bank umum cukup terkelola dengan baik, tecermin dari risiko kredit yang menurun serta kondisi likuiditas yang cukup memadai. Selain itu, risiko pasar juga cukup terjaga seiring upaya bank menyeimbangkan portofolio SSB (*bonds' portfolio rebalancing*) yang dimiliki. Ke depan, risiko akibat kenaikan suku bunga perlu tetap diwaspadai seiring dengan sentimen suku bunga global yang masih tetap tinggi serta ketidakpastian global.

1. Risiko Kredit

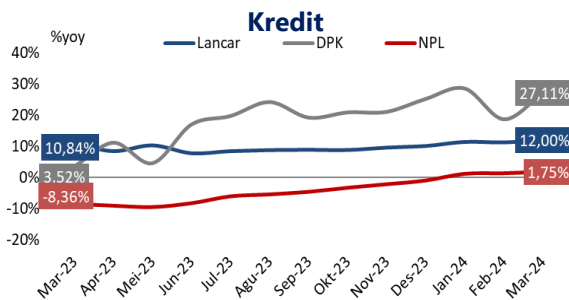
Pada Maret 2024, risiko kredit membaik tecermin dari rasio NPL *gross* tercatat sebesar 2,25%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,49%. Sementara itu, rasio NPL *net* sedikit meningkat namun masih relatif terjaga sebesar 0,77%. Peningkatan NPL *net* tersebut seiring dengan nominal NPL yang tumbuh 1,75% (yoy), sedangkan CKPN NPL berkontraksi -5,65% (yoy), meskipun membaik dari tahun sebelumnya yang berkontraksi sebesar -9,41% (yoy).

Grafik 24 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net



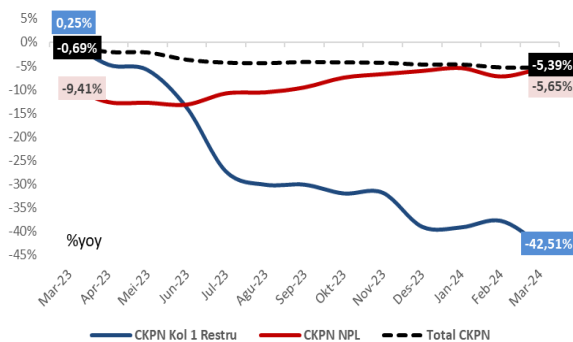
Sumber: SPI Maret 2024

Grafik 25 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit



Sumber: SPI Maret 2024

Secara total CKPN turun -5,39% (yoy), dibandingkan tahun lalu yang berkontraksi -0,69% (yoy), utamanya dipengaruhi oleh turunnya CKPN kredit restrukturisasi kualitas lancar sebesar -42,51% (yoy). Sementara itu, CKPN kredit non restrukturisasi kualitas lancar tumbuh 0,93% (yoy). Adapun turunnya CKPN kredit restrukturisasi kualitas lancar sejalan dengan berakhirnya stimulus kredit restrukturisasi yang telah dihentikan sepenuhnya pada 31 Maret 2024. Meskipun CKPN menurun, namun *coverage* CKPN terhadap kredit restrukturisasi kualitas Lancar dan *coverage* CKPN terhadap kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK) masih memadai masing-masing sebesar 15,60% dan 44,10%. Selain itu, *coverage* total CKPN terhadap NPL juga masih cukup baik sebesar 205,55%. Hal ini mengindikasikan bahwa antisipasi bank terhadap risiko kredit masih memadai.

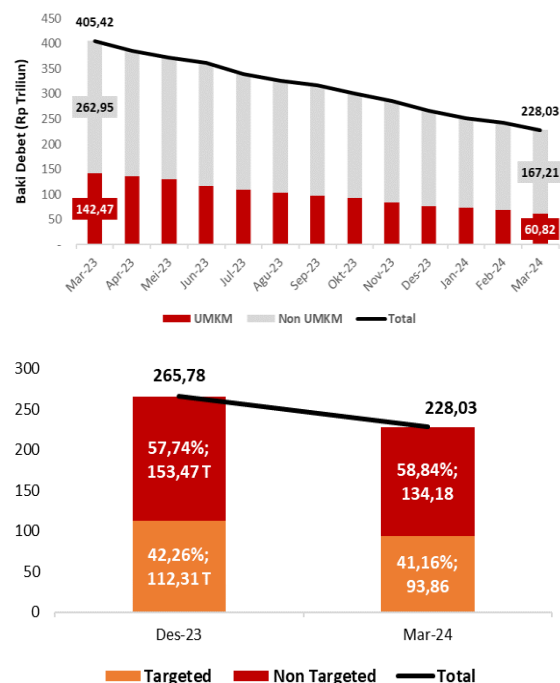
Grafik 26 Pertumbuhan CKPN

Sumber: LBUT

Di sisi lain, kredit restrukturisasi perbankan sudah turun sebesar -21,67% (yoy) menjadi sebesar Rp556,60 Triliun. Hal ini sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19 dan menjelang berakhirnya kebijakan stimulus restrukturisasi. Adapun kredit restrukturisasi masih didominasi oleh kredit restrukturisasi kualitas Lancar sebesar Rp283,75 Triliun atau 50,98% terhadap total kredit restrukturisasi. Kredit restrukturisasi kualitas Lancar tersebut turun -37,92% (yoy) lebih dalam dibandingkan tahun sebelumnya yang turun -30,25% (yoy). Porsi kredit restrukturisasi kualitas Lancar terhadap total kredit juga mulai menunjukkan tren penurunan menjadi 3,92% dari 8,19% pada Maret 2023. Penurunan kredit restrukturisasi kualitas Lancar tersebut menyebabkan rasio *Loan at Risk* menurun menjadi sebesar 11,10%, dari tahun sebelumnya 13,94%. Namun demikian, naiknya kredit kualitas Dalam Perhatian Khusus perlu diwaspadai karena berpotensi memburuk menjadi NPL.

Lebih lanjut, kredit restrukturisasi terdampak Covid-19 berada dalam tren penurunan. Pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp228,03 Triliun, atau berkontraksi -43,76% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar Rp405,42 Triliun. Adapun kredit restrukturisasi ke sektor *targeted* sebesar Rp93,86 Triliun (porasi

41,16%) menurun dari Rp112,31 Triliun (porasi 42,26%) dari posisi Desember 2023. Penurunan kredit restrukturisasi tersebut menunjukkan kemampuan membayar debitur yang membaik seiring dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi dan perbaikan mobilitas masyarakat. Hal ini juga terlihat dari turunnya jumlah debitur kredit restrukturisasi terdampak Covid-19 menjadi sejumlah 818,92 ribu debitur dari tahun sebelumnya sejumlah 1,84 juta debitur.

Grafik 27 Tren Kredit Restrukturisasi terkait COVID-19

Sumber: SLIK OJK

Meskipun kondisi risiko kredit mulai membaik, namun perbankan harus tetap mengedepankan aspek prudensial dan mengantisipasi terjadinya pemburukan kualitas kredit ke depan di tengah masih tingginya ketidakpastian global seperti risiko suku bunga global yang masih tinggi, perkembangan ekonomi Tiongkok, serta kenaikan tensi geopolitik yang dapat berpotensi meningkatkan tekanan ekonomi domestik.

Tabel 18 Perkembangan Kualitas Kredit

Kualitas Kredit (Rp T)	Mar'23	Des'23	Mar'24	Porsi	qtq		yoy	
					Des'23	Mar'24	Mar'23	Mar'24
1. Lancar	6.004	6.629	6.724	92,82%	4,34%	1,43%	10,84%	12,00%
- Non Restru	5.547	6.315	6.440	88,90%	5,03%	1,99%	16,50%	16,11%
- Restru	457	314	284	3,92%	-7,72%	-9,77%	-30,25%	-37,92%
2. DPK	281	306	357	4,93%	-3,64%	16,67%	3,52%	27,11%
3. Kurang Lancar	19	23	22	0,31%	2,01%	-4,55%	-5,27%	17,04%
4. Diragukan	31	25	30	0,41%	-16,39%	20,28%	10,72%	-3,00%
5. Macet	111	107	111	1,54%	-6,23%	4,04%	-12,98%	0,45%
Nominal NPL	160	155	163		-6,91%	5,34%	-8,36%	1,75%
Rasio NPL Gross %	2,49%	2,19%	2,25%		-25	7	-50	-24
Rasio NPL Net %	0,72%	0,71%	0,77%		-6	6	-12	5
Kredit DPK + Restru Kredit Lancar	738	621	641		-5,75%	3,27%	-20,36%	-13,16%
Rasio Kredit DPK + Restru Kredit Lancar %	11,45%	8,75%	8,85%		-88	9	-435	-260
Loan at Risk (LaR)	898	776	804		-5,99%	3,69%	-18,45%	-10,50%
Rasio Loan at Risk (LaR) %	13,94%	10,94%	11,10%		-113	16	-485	-284
Total Kredit	6.445	7.090	7.245		3,70%	2,18%	9,93%	12,40%

Sumber: SPI Maret 2024

Keterangan: Perubahan (qtq dan yoy) untuk data rasio dalam *basis point* (bps)

1.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Pada periode laporan, terjadi penurunan risiko kredit pada jenis penggunaan modal kerja dan investasi secara yoy. Rasio NPL Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi

(KI) masing-masing turun menjadi 2,83% dan 1,76% dari 3,37% dan 1,89% pada tahun sebelumnya. Sementara itu, rasio NPL Kredit Konsumsi (KK) sedikit meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,64% menjadi 1,80%.

Tabel 19 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Kredit (Rp T)	Mar'23	Des'23	Mar'24	yoy	
				Mar'23	Mar'24
KMK	2.915	3.236	3.273	9,54%	12,30%
KI	1.733	1.921	1.991	11,41%	14,83%
KK	1.797	1.934	1.981	9,18%	10,22%
Total Kredit	6.445	7.090	7.245	9,93%	12,40%

Sumber: SPI Maret 2024

Berdasarkan kelompok bank, penurunan rasio NPL KMK, utamanya didorong oleh Bank Persero dari tahun sebelumnya sebesar 3,64% menjadi 2,69% serta Bank Swasta yang turun dari tahun lalu 3,03% menjadi 2,78%. Sementara itu, perbaikan rasio NPL KI terjadi pada seluruh kelompok bank, dengan penurunan terbesar pada Bank Swasta dan KCBLN yang masing-masing turun dari

Tabel 20 Rasio NPL Gross per Jenis Penggunaan

NPL Gross %	Mar'23	Des'23	Mar'24	yoy	
				Mar'23	Mar'24
NPL KMK	3,37	2,78	2,83	-65	-54
NPL KI	1,89	1,68	1,76	-70	-13
NPL KK	1,64	1,69	1,80	-5	16
Total NPL	2,49	2,19	2,19	-50	-30

1,82% dan 1,53% menjadi 1,52% dan 1,39%. Sementara itu, kenaikan NPL KK tertinggi terdapat pada kelompok KCBLN menjadi 4,15% dari tahun lalu 2,05% yang diikuti dengan kelompok Bank Persero dari 1,55% menjadi 1,80%.

Rasio NPL KMK pada BPD masih tercatat sebagai yang tertinggi dibandingkan kelompok bank lainnya dan tercatat

meningkat dari 6,47% pada periode yang sama tahun sebelumnya menjadi 7,01%. Namun demikian, rasio NPL KI BPD tercatat relatif stabil dari tahun lalu yaitu sebesar 2,36%. Sementara itu, rasio NPL KK BPD tercatat yang terendah sebesar 1,08% namun sedikit meningkat dari tahun lalu yaitu 1,02%. Tingginya NPL KMK pada BPD antara lain karena keterbatasan sarana dan prasarana

BPD dalam penyaluran kredit produktif seperti infrastruktur dalam melakukan *monitoring*, serta kompetensi dan *knowledge* SDM BPD yang lebih difokuskan pada KK utamanya kredit bagi pegawai Pemerintah Daerah. Secara keseluruhan, NPL BPD masih terjaga pada level 2,43%, walau sedikit meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 2,28%.

Tabel 21 Rasio NPL Gross berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank

Kelompok Kepemilikan Bank	KMK			KI			KK			NPL (%)
	Kredit (Rp M)	Porsi KMK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KI Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	
Bank Persero	1.472.431	44,43	2,69	979.824	29,57	1,93	861.864	26,01	1,80	2,24
Bank Swasta	1.528.246	48,70	2,78	895.783	28,54	1,52	714.155	22,76	2,20	2,29
BPD	120.305	19,72	7,01	86.462	14,18	2,36	403.160	66,10	1,08	2,43
KCBLN	152.287	83,49	1,40	28.456	15,60	1,39	1.664	0,91	4,15	1,42
TOTAL	3.273.269	45,18	2,83	1.990.525	27,48	1,76	1.980.842	27,34	1,80	2,25

Sumber: SPI Maret 2024

1.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi

Perbaikan risiko kredit berdasarkan penurunan rasio NPL terbesar terdapat pada beberapa sektor antara lain: penyediaan akomodasi dan makan minum (PMM); perikanan; pertambangan; industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran; listrik gas, dan air; transportasi; serta perantara keuangan.

Risiko kredit pada sektor PMM tercatat menurun dari 4,71% menjadi 3,30% dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp1,49 Triliun (yoy). Perbaikan tersebut utamanya didorong oleh subsektor penyediaan akomodasi hotel bintang sejalan dengan meningkatnya rata-rata Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Indonesia dalam setahun terakhir dari 48,67% pada Maret 2023 menjadi 51,10% pada Maret 2024. Adapun Kalimantan Timur menjadi provinsi dengan rata-rata TPK hotel berbintang tertinggi nasional dalam setahun

terakhir yaitu sebesar 20,23 kemudian diikuti oleh DI Yogyakarta dan Bali masing-masing sebesar 57,35 dan 56,12. Selain itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) juga meyakini bahwa permintaan sewa kamar hotel di berbagai wilayah saat musim libur Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2024 akan melonjak signifikan seiring adanya tradisi mudik.

Penurunan rasio NPL terbesar diikuti oleh sektor perikanan meskipun masih tergolong tinggi yakni dari 6,90% menjadi 5,56%. Hal tersebut seiring dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp198,53 Miliar (yoy) yang utamanya didorong oleh subsektor penangkapan biota di laut. Perbaikan tersebut ditengarai didorong oleh peningkatan kinerja sektor perikanan nasional dari tahun lalu yang masih berlanjut. Sejalan dengan prospek pasar perikanan global yang meningkat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan capaian produksi perikanan nasional sebesar

30,85 Juta ton dengan nilai ekspor USD7,20 Miliar untuk tahun 2024 meningkat dari tahun sebelumnya yakni 24,74 Juta ton yang meliputi perikanan tangkap, budi daya, dan rumput laut.

Pemerintah melalui KKP telah mencanangkan model pembangunan kelautan perikanan ekonomi biru (*blue economy*) sebagai salah satu strategi utama untuk memajukan perekonomian Indonesia. Konsep *blue economy* merupakan pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan bagi laju pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kesehatan ekosistem laut yang dituangkan dalam lima kebijakan yaitu: 1) memperluas kawasan konservasi laut; 2) penangkapan ikan secara terukur; 3) pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; 4) pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan 5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan. Bentuk dukungan industri perbankan dalam pengembangan penerapan *blue economy* di antaranya dapat dilakukan melalui penyaluran dana kepada berbagai usaha yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan seperti usaha: perikanan tangkap dan budidaya; pengolahan hasil perikanan dan kelautan; pariwisata bahari; dan jasa kelautan.

Rasio NPL sektor pertambangan dan penggalian tercatat membaik dari 2,31% menjadi 1,24% dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp1,66 Triliun (yoy). Perbaikan rasio NPL tersebut utamanya didorong oleh subsektor pertambangan batubara, penggalian gambut, gasifikasi batubara, dan pembuatan briket batubara. Sejalan dengan perkembangan tersebut, berdasarkan data

Minerba One Data Indonesia (MODI) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), produksi batubara Indonesia telah mencapai lebih dari 100 Juta ton sejak Januari 2024, tepatnya 118,79 Juta ton per 7 Maret 2024. Optimisme terhadap peningkatan produksi batubara nasional sepanjang tahun ini masih relatif terjaga mengingat produksi batubara nasional tahun lalu berhasil mencapai 775 Juta ton (rekor tertinggi dalam beberapa dekade terakhir) melebihi target 695 Juta ton.

Rasio NPL sektor industri pengolahan tercatat membaik dari Maret 2023 sebesar 3,99% menjadi 3,22% sejalan dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp4,98 Triliun (yoy). Perbaikan tersebut utamanya didorong oleh subsektor industri karet, barang dari karet, dan barang dari plastik serta industri tekstil. Secara umum, perbaikan kualitas risiko kredit pada sektor industri pengolahan ini sejalan dengan kegiatan manufaktur yang masih ekspansif sebagaimana tecermin pada Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia berada di level 54,2 pada Maret 2024, meningkat dibandingkan Maret tahun lalu yang berada di level 51,9. Di samping itu, data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga mencatat bahwa Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Maret 2024 juga berada pada fase ekspansif yakni mencapai 53,50. Peningkatan kinerja sektor industri pengolahan secara umum antara lain didorong oleh kondisi ekonomi makro Indonesia yang tetap terjaga stabil, kebijakan pemerintah yang akomodatif dalam mendorong kepercayaan industri untuk meningkatkan produksi dan investasi, serta permintaan domestik dan ekspor yang menguat, sehingga memberikan optimisme

bagi para pelaku industri terhadap prospek bisnis di masa depan.

Rasio NPL sektor perdagangan besar dan eceran tercatat membaik dari 3,83% menjadi 3,39% dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp649,05 Miliar (yoy). Perbaikan rasio NPL tersebut utamanya didorong oleh subsektor perdagangan besar dalam negeri selain ekspor dan impor (kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor). Perkembangan tersebut sejalan dengan kinerja penjualan eceran tahunan sebagaimana tercermin pada Indeks Penjualan Riil (IPR) yang tercatat sebesar 235,4 pada Maret 2024 atau tumbuh 9,3% (yoy). Kinerja penjualan eceran yang tetap kuat didorong oleh pertumbuhan penjualan subkelompok sandang (20,6% yoy), suku cadang dan aksesoris (17,3% yoy), serta makanan, minuman, dan tembakau (10,4% yoy). Adapun peningkatan kinerja subsektor perdagangan besar dalam negeri pada Maret 2024 ini sejalan dengan peningkatan kegiatan masyarakat saat bulan Ramadhan, persiapan perayaan Idul Fitri dan program potongan harga serta optimisme konsumen yang tetap terjaga sebagaimana tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Indonesia yang berada pada level 123,8 per Maret 2024.

Rasio NPL sektor listrik, gas, dan air juga tercatat membaik dari 0,47% menjadi 0,16% sejalan dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp415,06 Miliar (yoy). Perbaikan rasio NPL tersebut utamanya didorong oleh subsektor ketenagalistrikan dari 0,23% menjadi 0,04% seiring penurunan nominal NPL sebesar Rp232,97 Miliar. Subsektor gas juga mencatatkan perbaikan rasio NPL dari 3,63% menjadi 1,40% seiring penurunan nominal NPL sebesar Rp199,35 Miliar.

Sebagai informasi, Pemerintah melalui Kementerian ESDM tengah serius menggarap potensi besar Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia sebagai sumber energi andalan di masa depan, salah satunya melalui akselerasi pengembangan EBT baik listrik maupun non listrik.

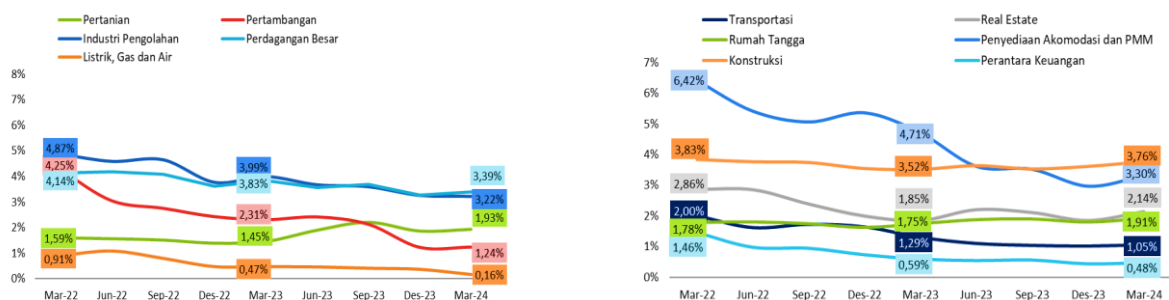
NPL sektor transportasi tercatat membaik dari 1,29% menjadi 1,05% didorong oleh pertumbuhan kredit pada sektor tersebut yang meningkat cukup signifikan yakni dari 1,45% (yoy) pada Maret 2023 menjadi 27,76% (yoy) pada Maret 2024 meskipun secara nominal NPL naik sebesar Rp158,86 Miliar (yoy). Perbaikan rasio NPL tersebut utamanya didorong oleh subsektor angkutan air untuk penyeberangan domestik. Perkembangan tersebut sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri pada Maret 2024 adalah sebanyak 1,52 juta orang atau naik 4,11% (yoy) dari 1,46 juta orang dibandingkan Maret tahun sebelumnya. Secara kumulatif, jumlah penumpang angkutan dalam negeri selama Januari-Maret 2024 mencapai 4,7 Juta orang atau naik 8,85% (ctc) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan jumlah penumpang tersebut seiring dengan pemulihan ekonomi nasional yang mendorong peningkatan mobilitas masyarakat termasuk penggunaan angkutan laut dalam negeri untuk keperluan bisnis maupun wisata. Selain itu, bersamaan dengan momentum mudik lebaran, banyak masyarakat Indonesia yang melakukan perjalanan mudik atau wisata bahari sehingga mendorong peningkatan permintaan terhadap transportasi laut. Beberapa maskapai pelayaran juga kerap menawarkan promo dan diskon harga tiket

pada periode tersebut sehingga menarik minat masyarakat untuk menggunakan angkutan laut sebagai pilihan moda transportasi.

Terakhir, perbaikan kualitas risiko kredit juga terjadi pada sektor perantara keuangan seiring peningkatan penyaluran kredit pada sektor tersebut sebesar Rp92,31 Triliun meskipun secara nominal NPL naik sebesar Rp67,88 Miliar. Hal ini ditandai dengan rasio NPL dari 0,59% pada Maret 2023 menjadi 0,48% pada Maret 2024. . Perbaikan rasio NPL tersebut utamanya didorong oleh subsektor perantara keuangan kecuali asuransi dan dana pensiun utamanya pada perantara keuangan lainnya (non bank).

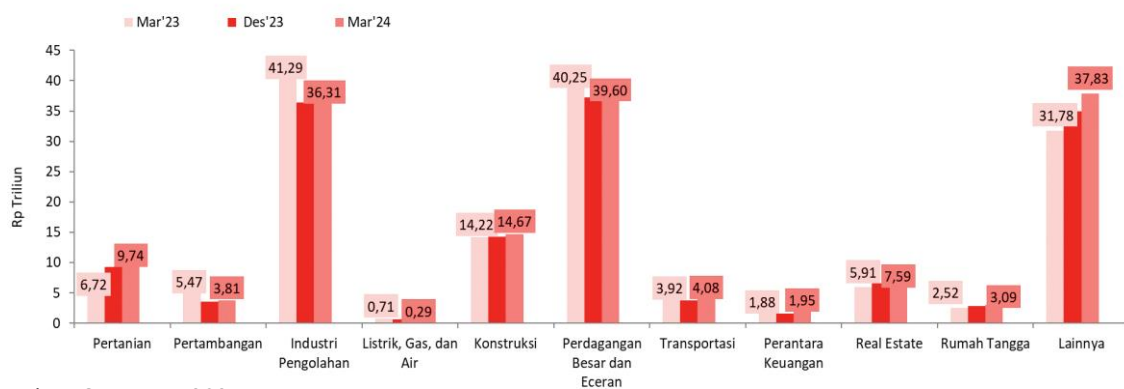
Di tengah perbaikan NPL tersebut, perlu diperhatikan adanya kenaikan rasio NPL pada sektor konstruksi dari 3,52% menjadi 3,76% pada tahun lalu dengan peningkatan nominal NPL sebesar Rp459,47 Miliar. Hal tersebut sejalan dengan penyaluran kredit pada sektor tersebut yang menurun sebesar Rp13,46 Triliun atau berkontraksi menjadi -3,33% (yoy) dari Maret tahun lalu sebesar 7,97% (yoy). Dalam hal ini, subsektor konstruksi gedung dan bangunan sipil mencatatkan peningkatan nominal NPL terbesar yaitu Rp460,79 Miliar dan mendorong kenaikan rasio NPL subsektor tersebut dari 3,49% menjadi 3,73%. Meski demikian, kenaikan rasio NPL pada sektor konstruksi secara umum masih relatif terjaga dan berada di bawah *threshold* 5%

Grafik 28 Tren NPL Gross per Sektor Ekonomi



Sumber: SPI Maret 2024, diolah

Grafik 29 Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi



Sumber: SPI Maret 2024

1.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial)

Berdasarkan lokasi proyek, perbaikan risiko kredit terjadi di hampir seluruh wilayah (kecuali Sulawesi) sejalan dengan momentum pemulihan ekonomi domestik yang masih terus berlanjut dan menunjukkan penguatan sehingga mendorong kenaikan mobilitas masyarakat, pemulihan kinerja, aktivitas sektor usaha, dan meningkatkan permintaan kredit.

Rasio NPL pada wilayah Jawa tercatat membaik seiring pertumbuhan kredit yang lebih tinggi yaitu 13,56% (yoy) pada Maret 2024 dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,60% (yoy). Hal ini selanjutnya mendorong perbaikan rasio NPL dari 2,56% pada Maret 2023 menjadi 2,33% pada Maret 2024 meskipun secara nominal NPL naik sebesar Rp3,73 Triliun. Perbaikan rasio NPL di wilayah Jawa utamanya didorong oleh turunnya nominal NPL pada Provinsi Banten sebesar Rp1,48 Triliun (porsi kredit Prov Banten: 9,46% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Jawa) dengan perbaikan rasio NPL dari 3,34% pada Maret 2023 menjadi 2,76% pada Maret 2024. Penurunan nominal NPL Provinsi Banten utamanya didorong oleh sektor industri pengolahan sebesar Rp1,39 Triliun atau secara rasio membaik dari 7,31% menjadi 5,70%. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia Ditjen Perbendaharaan Kanwil DJPb Provinsi Banten, sektor industri pengolahan merupakan *leading sector* yang memberikan kontribusi terbesar pada penerimaan pajak di provinsi tersebut sebesar 39,91%. Tidak hanya itu, sektor industri pengolahan juga mendominasi pembentukan nilai Pembentukan Domestik Regional Bruto

(PDRB) Banten dengan kontribusi sebesar 30,64% serta mampu tumbuh 5,81% (yoy) pada triwulan I-2024 lebih tinggi dibandingkan triwulan dan periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing sebesar 5,41% (yoy) dan 4,01% (yoy).

Selanjutnya, wilayah Sumatera juga mencatatkan perbaikan rasio NPL dari 2,51% pada Maret 2023 menjadi 2,18% pada Maret 2024 dengan nominal NPL yang turun sebesar Rp1,52 Triliun. Perbaikan rasio NPL di wilayah tersebut utamanya didorong oleh turunnya nominal NPL pada Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp1,81 Triliun (porsi kredit Provinsi Sumatera Selatan: 16,64% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Sumatera) atau secara rasio membaik dari 4,30% pada Maret 2023 menjadi 2,66% pada Maret 2024. Penurunan nominal NPL provinsi Sumatera Selatan utamanya ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan kontributor terbesar PDRB di provinsi tersebut. Sebagai daerah dengan potensi sumber daya energi yang cukup besar dan beragam, Sumatera Selatan bahkan dicanangkan menjadi Lumbung Energi Nasional. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus memacu pembangunan energi terbarukan agar berkontribusi dalam upaya mencapai target *Zero Net Emission* pada tahun 2060, terutama melalui sektor pertambangan.

Perbaikan rasio NPL juga terlihat pada wilayah Kalimantan dari 1,59% menjadi 1,57% meskipun secara nominal NPL naik sebesar Rp512,6 Miliar. Perbaikan rasio NPL di wilayah tersebut utamanya didorong oleh pertumbuhan kredit yang lebih tinggi daripada pertumbuhan NPL. Adapun penurunan rasio NPL didorong oleh Provinsi

Kalimantan Timur (porsi kredit: 43,04% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Kalimantan) yang secara rasio membaik dari 1,38% pada Maret 2023 menjadi 1,25% pada Maret 2024. Dalam hal ini, penurunan nominal NPL di provinsi tersebut utamanya dipengaruhi oleh turunnya nominal NPL sektor pertanian sebesar Rp339,08 Miliar dengan rasio NPL yang membaik dari 0,96% pada Maret 2023 menjadi 0,14% pada Maret 2024. Perkembangan tersebut seiring dengan tingkat kesejahteraan petani di Provinsi Kalimantan Timur yang meningkat karena adanya kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) Maret 2024 sebesar 137,21 atau tumbuh sebesar 3,16% (yoy) dibandingkan Maret tahun sebelumnya sebesar 133,01.

Pada wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Bali Nusra) juga terjadi perbaikan rasio NPL dari 2,72% menjadi 1,64% dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp1,71 Triliun. Perbaikan rasio NPL di wilayah tersebut utamanya didorong oleh penurunan nominal NPL di Provinsi Bali sebesar Rp1,91 Triliun (porsi kredit Provinsi Bali: 44,11% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Bali Nusra) atau secara rasio NPL membaik dari 3,89% menjadi 1,91%. Penurunan nominal NPL di Provinsi Bali antara lain dipengaruhi oleh sektor PMM, *real estate*, perdagangan besar, dan transportasi. Rasio NPL sektor PMM dan *real estate* masing-masing turun dari 9,1% dan 6,9% menjadi 0,6% dan 4,4%. Demikian halnya dengan rasio NPL sektor perdagangan besar serta sektor transportasi yang masing-masing turun dari 2,8% dan 1,6% menjadi 2,2% dan 0,4%. Sebagai informasi, berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia Ditjen Perbendaharaan Kanwil DJPb Provinsi Bali, pada Maret 2024, penerimaan pajak di

provinsi tersebut utamanya ditopang oleh sektor perdagangan besar dengan kontribusi 18,21% atau sebesar Rp623,34 Miliar.

Terakhir, rasio NPL pada wilayah Papua dan Maluku menunjukkan perbaikan dari 2,33% menjadi 2,15% dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp38,70 Miliar. Perbaikan rasio NPL terbesar di wilayah tersebut utamanya didorong oleh Provinsi Maluku dengan nominal penurunan NPL sebesar Rp147,22 Miliar (porsi kredit Provinsi Maluku: 18,00% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Papua dan Maluku). Penurunan tersebut utamanya didorong oleh sektor perikanan Rp245,74 Miliar dengan perbaikan rasio NPL dari 53,63% menjadi 3,49%. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Ambon menyebutkan bahwa ekspor ikan hidup dari Provinsi Maluku meningkat hingga 50,82% (ctc) pada triwulan I-2024, yakni mencapai 121.969 ekor selama periode Januari-Maret 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sejumlah 80.873 ekor.

Di sisi lain, kenaikan rasio NPL terlihat pada wilayah Sulawesi dari 2,88% menjadi 2,97% dengan kenaikan nominal NPL sebesar Rp1,36 Triliun. Kenaikan rasio NPL terbesar utamanya dipengaruhi oleh Provinsi Gorontalo (porsi: 5,10% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Sulawesi) sebesar Rp299,38 Miliar dengan rasio NPL yang meningkat dari 4,17% menjadi 5,42%. Peningkatan rasio NPL tersebut utamanya dipengaruhi oleh sektor pertanian sebesar Rp208,10 Miliar dengan kenaikan rasio NPL dari 14,90% menjadi 26,10%.

Penurunan kualitas kredit pada sektor tersebut ditengarai salah satunya dipengaruhi oleh kendala struktural yang

masih dihadapi petani Gorontalo, seperti kurangnya fasilitas pengolahan dan

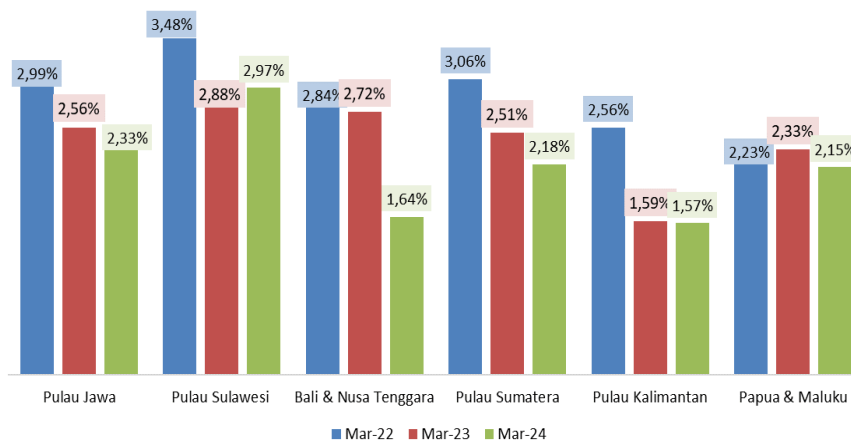
pemasaran sehingga nilai tambah dari hasil panen kurang optimal.

Tabel 22 NPL Gross Lokasi Berdasarkan Sektor Ekonomi Periode Maret 2024

		Pertanian	Pertambangan	Industri Pengolahan	Listrik, Gas dan Air	Konstruksi	Perdagangan Besar	Transportasi	Rumah Tangga	Perantara Keuangan	Total
Jawa	NPL %	2,18%	1,91%	3,66%	0,19%	3,09%	3,35%	1,00%	2,11%	0,41%	2,33%
Sumatera	NPL %	2,08%	1,42%	1,46%	0,03%	6,76%	3,91%	1,14%	1,71%	5,71%	2,18%
Kalimantan	NPL %	0,52%	0,83%	0,48%	0,10%	6,31%	3,25%	0,81%	1,65%	1,21%	1,57%
Sulawesi	NPL %	5,84%	1,42%	6,83%	0,03%	6,22%	4,37%	3,08%	1,59%	1,40%	2,97%
Bali & Nusa Tenggara	NPL %	2,17%	0,00%	1,11%	0,24%	13,49%	2,63%	1,17%	1,19%	1,01%	1,64%
Papua & Maluku	NPL %	0,66%	0,02%	0,52%	4,48%	14,28%	3,57%	4,98%	1,36%	5,97%	2,15%
Total		1,93%	1,24%	3,22%	0,16%	3,76%	3,39%	1,05%	1,91%	0,48%	2,25%

Sumber: LBUT, diolah

Grafik 30 Tren Rasio NPL Gross berdasarkan Lokasi Proyek (Spasial)



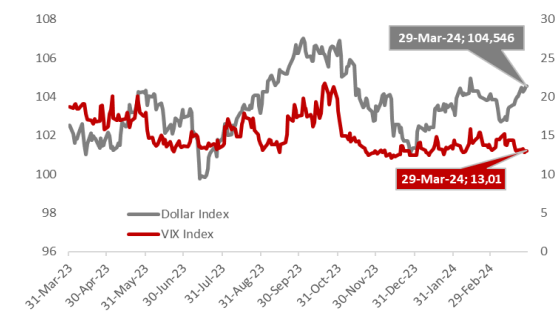
Sumber: LBUT, diolah

2. Risiko Pasar

Pada triwulan I-2024, risiko pasar tetap terjaga di tengah kondisi tingginya suku bunga global, menguatnya indeks dollar, dan gejolak geopolitik di wilayah Eropa dan Timur Tengah. Terjaganya tekanan di pasar keuangan global juga tecermin dari *volatility index* (VIX) yang cenderung melandai pada Maret 2024. Sementara itu, diumumkannya keputusan The Fed pada *Federal Open Market Committee* (FOMC) bulan Maret 2024 yang mempertahankan suku bunga di level 5,00% - 5,25% (*high for longer*) berpengaruh pada kecenderungan naiknya *US Treasury yield*. Selain itu, perkembangan data inflasi yang kembali

meningkat dan data tenaga kerja yang menguat di AS juga mendorong kondisi suku bunga acuan *high for longer* dan penguatan *dollar index*. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan *capital outflow* dari negara *emerging* ke negara maju, khususnya ke pasar keuangan AS (*dollar USD* sebagai *safe-haven asset*) yang kemudian dapat berdampak pada penguatan USD dibandingkan mata uang lainnya.

Grafik 31 Dolar Index dan VIX Index



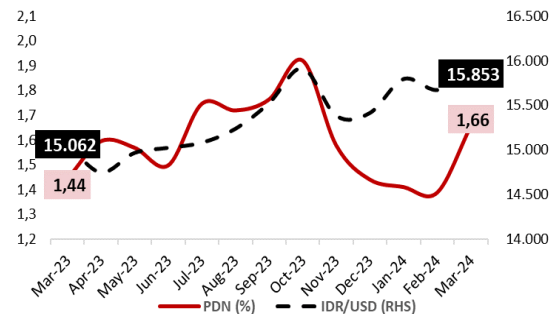
Sumber: Reuters

2.1 Risiko Nilai Tukar

Pada akhir Maret 2024, nilai tukar Rupiah terhadap USD tercatat sebesar Rp15.850/USD, melemah 5,74% dari posisi akhir Maret 2023 sebesar Rp14.990/USD. Meski demikian pelemahan nilai tukar Rupiah masih lebih rendah dibandingkan dengan pelemahan negara lain seperti Jepang dan Thailand yang melemah masing-masing sebesar 13,95% dan 6,47% *point-to-point* posisi akhir Maret 2024 terhadap akhir Maret 2023.

Di tengah pelemahan nilai tukar tersebut, Posisi Devisa Neto (PDN) perbankan pada Maret 2024 masih terjaga rendah sebesar 1,66%, meski meningkat dari tahun lalu sebesar 1,44%. PDN, masih berada pada posisi *Long* dan dampaknya terhadap pendapatan perbankan masih positif. Rasio PDN tersebut menunjukkan eksposur risiko nilai tukar terhadap portofolio valuta asing bank terjaga dan masih berada pada level rendah jauh di bawah *threshold* 20%. Berdasarkan individu bank, sebagian besar bank devisa (58 bank) memiliki rasio PDN yang rendah (<2%).

Grafik 32 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar

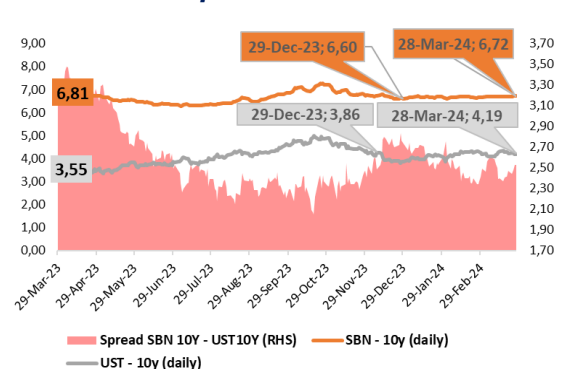


Sumber: Bank Indonesia

2.2 Risiko Suku Bunga

Di tengah sentimen suku bunga yang masih bertahan pada level tinggi, *US Treasury yield* (UST) menunjukkan tren kenaikan dari periode Desember 2023 hingga Maret 2024. Kenaikan UST *yield* tersebut dipengaruhi oleh adanya kebijakan The Fed untuk mempertahankan suku bunga global di level tinggi dan menguatnya nilai tukar dollar Amerika. Kenaikan UST *yield* pada periode laporan tersebut membuat *spread* UST *yield* dengan *yield* SBN menyempit sehingga dapat menyebabkan keluarnya arus modal asing dari domestik.

Grafik 33 Spread Yield UST dan SBN

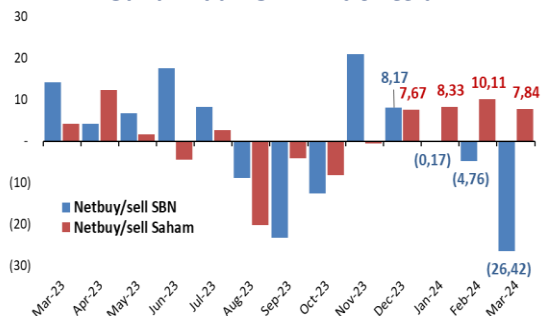


Sumber: PHEI dan Reuters

Pada pasar keuangan, transaksi di pasar SBN mencatatkan *capital outflow* atau *net sell* transaksi non-residen sebesar Rp10,29 Triliun dalam setahun terakhir seiring dengan *spread* yang menyempit. Hal

tersebut turut menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah. Kendati demikian, pelemahan lebih dalam tertahan oleh transaksi investor asing atau non-residen di pasar saham yang mencatatkan *net buy* sebesar Rp13,47 Triliun.

Grafik 34 Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia

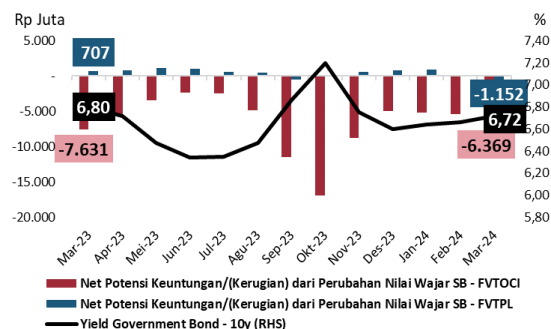


Sumber: DJPPR dan BEI

Di perbankan, risiko suku bunga yang dilihat dari nilai wajar berdasarkan *mark-to-market* masih terjaga. Pada Maret 2024, *yield* SBN turun menjadi 6,72% dibandingkan dengan posisi tahun lalu (Maret 2023) sebesar 6,80%. Meskipun nilai wajar portofolio obligasi kategori *Fair Value Through Profit or Loss* (FVTPL) menunjukkan kerugian, namun di sisi lain, potensi kerugian dari obligasi kategori *Fair Value Through Other Comprehensive Income* (FVTOCI) menunjukkan penurunan

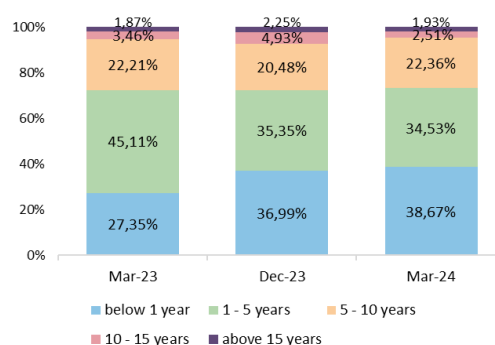
seiring dengan penurunan *yield*. Selain itu, terdapat penurunan rata-rata sisa jatuh tempo SSB pada Maret 2024 dibandingkan Maret 2023 sehingga mengurangi fluktuasi nilai wajar SSB bank jika terjadi pergerakan suku bunga.

Grafik 35 Potensi Keuntungan/Kerugian Kepemilikan Surat Berharga Perbankan



Sumber: Reuters dan LBUT

Grafik 36 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan (FVTPL dan FVTOCI) berdasarkan Tenor



Sumber: LBUT

Tabel 23 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan berdasarkan Kategori

Kategori SSB	Nominal SSB (Rp T)			Porsi SSB (%)		
	Mar-23	Dec-23	Mar-24	Mar-23	Dec-23	Mar-24
FVTOCI	911,11	928,47	1.028,26	47,36%	46,71%	47,50%
FVTPL	132,04	157,71	199,62	6,86%	7,93%	9,22%
AC	880,65	901,62	936,83	45,78%	45,36%	43,28%
Total Industri	1.923,81	1.987,80	2.164,72	100%	100%	100%

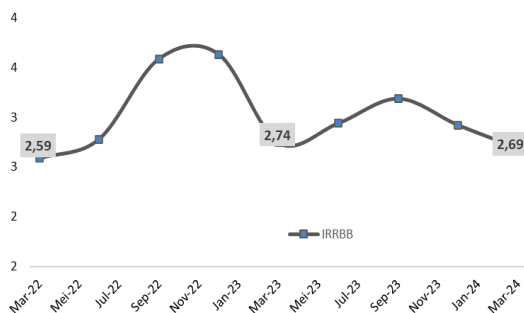
Sumber: LBUT

Risiko suku bunga yang berasal dari portofolio *banking book* juga masih terjaga tecermin dari *Interest Rate Risk in the Banking Book* (IRRBB) yang berada pada

level rendah yaitu sebesar 2,69%, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 2,74%. Penurunan IRRBB didorong oleh kewajiban dengan suku bunga tetap jangka panjang

yang tumbuh melambat sebesar 5,02% (yoy) (tahun lalu tumbuh 43,08%, yoy) utamanya karena turunnya simpanan berjangka dan pinjaman. Di sisi lain, aset dengan suku bunga tetap jangka panjang tumbuh 6,99% (yoy), walaupun melambat dari tahun lalu yang tumbuh tinggi 34,93% (yoy). Pertumbuhan aset tersebut utamanya didorong oleh kenaikan kredit. Sementara itu, aset jangka panjang dalam bentuk surat berharga yang dimiliki oleh perbankan turun sebesar -5,55% (yoy) melanjutkan kontraksi dari tahun sebelumnya -5,25% (yoy).

Grafik 37 Perkembangan Parameter IRRBB



Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK

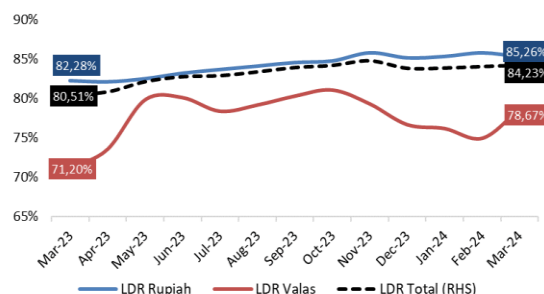
3. Risiko Likuiditas

Pada periode laporan, kondisi likuiditas perbankan masih relatif memadai di tengah tumbuhnya penyaluran kredit. Hal ini tecermin dari rasio LDR yang masih terjaga berada dalam *range* (78%-92%). Kemampuan likuiditas bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek juga tetap terjaga, tecermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masih berada jauh di atas *threshold*, rasio LCR di atas 100%, serta kemampuan bank dalam mengelola dana stabil atau *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang masih berada di atas *threshold* (100%). Selain itu, adanya kebijakan insentif likuiditas dari bank sentral juga

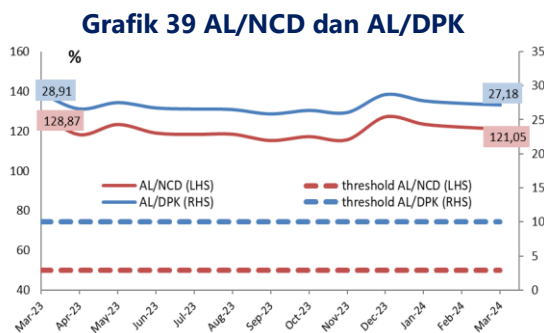
mengurangi kebutuhan dana jangka pendek oleh Bank. Kendati demikian, perlu diperhatikan kenaikan suku bunga transaksi PUAB yang mendorong penurunan pada volume transaksi, yang mencerminkan semakin mahalnya dana antarbank.

Pada Maret 2024, LDR perbankan tercatat sebesar 84,23%, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 80,51%. Peningkatan LDR didorong oleh naiknya LDR rupiah menjadi 85,26% dari tahun sebelumnya sebesar 82,28%. Selain itu, rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing masih terjaga sebesar 121,05% dan 27,18%, jauh berada di atas *threshold* (masing-masing sebesar 50% dan 10%), walaupun menurun dari tahun sebelumnya masing-masing sebesar 128,87% dan 28,91%. Penurunan antara lain dipengaruhi oleh pertumbuhan DPK dan *Non Core Deposit* (NCD) yang melampaui pertumbuhan alat likuid. Kendati alat likuid per Maret 2024 tumbuh relatif rendah yaitu hanya sebesar 1,02% (yoy), namun sudah membaik dibandingkan tahun lalu yang sempat berkontraksi -3,67% (yoy).

Grafik 38 LDR berdasarkan Valuta



Sumber: LBUT



Sumber: Bank Indonesia

Selanjutnya, untuk mengantisipasi penarikan dana dalam jangka pendek (30 hari ke depan), likuiditas perbankan masih terpantau memadai. Hal tersebut tecermin dari *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) perbankan yang berada jauh di atas 100% yaitu sebesar 218,63% meskipun menurun dibandingkan tahun lalu sebesar 244,28%. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh *Net Cash Outflow* (NCO) yang tumbuh sebesar 13,93% (yoy) melampaui *High Quality Liquid Asset* (HQLA) yang tumbuh sebesar 1,97% (yoy).

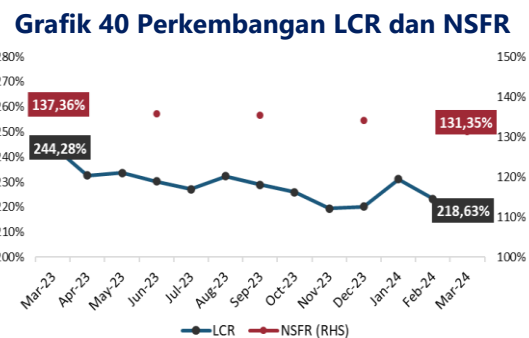
Tabel 24 Perkembangan LCR Perbankan

Kelompok	HQLA (Rp T)		
	Mar-23	Des-23	Mar-24
KBMI 1	101	270	289
KBMI 2	464	460	487
KBMI 3	709	623	673
KBMI 4	1.516	1.410	1.396
TOTAL HQLA	2.791	2.763	2.846

Kelompok	NCO (Rp T)		
	Mar-23	Des-23	Mar-24
KBMI 1	34	115	119
KBMI 2	157	187	190
KBMI 3	292	275	282
KBMI 4	660	677	710
TOTAL NCO	1.143	1.255	1.302

Kelompok	LCR (%)		
	Mar-23	Des-23	Mar-24
KBMI 1	297,83	234,40	242,05
KBMI 2	296,21	245,49	256,25
KBMI 3	243,32	226,55	238,98
KBMI 4	229,61	208,17	196,56
LCR Industri	244,28	220,18	218,63

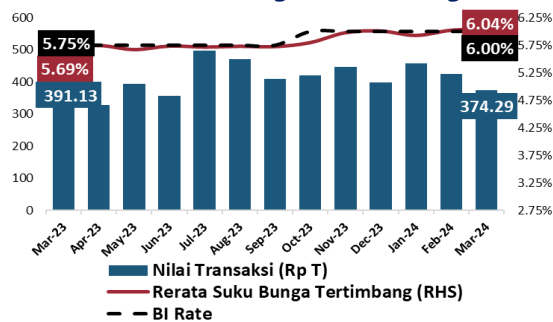
Sumber: OJK



Sumber: APOLO

Lebih lanjut, kemampuan bank dalam memelihara pendanaan yang stabil juga masih memadai, tecermin dari rasio pendanaan stabil bersih atau *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang terjaga pada level 131,35%, meski menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 137,36%.

Untuk memenuhi kondisi likuiditas jangka pendek, bank juga dapat meminjam dan/atau menyalurkan dana melalui Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Akses bank terhadap sumber likuiditas di PUAB masih cukup terjaga, meskipun volume transaksi menurun diiringi suku bunga rata-rata tertimbang yang meningkat. Peningkatan suku bunga PUAB terjadi seiring dengan meningkatnya suku bunga acuan BI *Rate* dalam setahun terakhir sebesar 25 bps menjadi 6,00% pada periode laporan. Selain itu, menurunnya volume transaksi PUAB juga antara lain dapat dipengaruhi oleh adanya Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial yang diterbitkan oleh Bank Indonesia melalui pengurangan giro bank di Bank Indonesia dalam rangka pemenuhan GWM dalam Rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata, sehingga bank memiliki excess likuiditas.

Grafik 41 Perkembangan Suku Bunga PUAB

Sumber: LBUT Harian

4. Risiko Hukum

4.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Selama Triwulan I-2024, terdapat 3 Kantor Bank (KB) dengan 5 Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang diterima dari satuan kerja pengawasan bank. Selanjutnya terhadap PKP yang telah diterima pada triwulan I maupun pada periode sebelumnya, sebanyak 2 KB dengan 2 PKP sedang dalam proses, 2 KB dengan 3 PKP ditindaklanjuti dengan langkah-langkah pengawasan dan sebanyak 4 KB dengan 4 PKP telah selesai diproses dan selanjutnya dilimpahkan kepada Satuan Kerja Penyidikan.

Tabel 25 Statistik Penanganan Penyimpangan Ketentuan Perbankan

Tahapan Kegiatan	Triwulan I-2024	
	Total	
	KB	PKP
1. PKP yang diterima	3	5
2. PKP dalam proses *)	2	2
3. PKP yang dikembalikan *)	2	3
4. PKP yang dilimpahkan kepada Penyidik OJK *)	4	4

*) Termasuk *carryover* PKP yang diterima dari periode sebelumnya

Sumber: OJK

Selain itu, dalam rangka melakukan pendalaman terhadap indikasi penyimpangan ketentuan perbankan yang ditemukan oleh satuan kerja pengawasan

bank, telah dilaksanakan Pemeriksaan Khusus Indikasi Penyimpangan Ketentuan Perbankan (Riksus IPKP) bersama pengawas terhadap 8 kantor bank.

4.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi

Dalam rangka memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum (APH), selama triwulan I-2024 telah diberikan pemberian keterangan ahli dan keterangan saksi pelapor sebanyak 10 kali. Pemberian keterangan ahli tersebut merupakan pemenuhan atas 5 permintaan dari Polri dan 3 permintaan dari Kejaksaan RI. Sedangkan pemberian keterangan saksi pelapor merupakan pemenuhan atas 1 permintaan dari Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan (DPJK) dan 1 permintaan dari Kejaksaan RI untuk hadir dalam persidangan.

Tabel 26 Pemberian Keterangan Ahli/Saksi

No.	APH	Permintaan		
		Ahli	Saksi	Total
1	Polri	5	0	5
2	Kejaksaan RI	3	1	4
3	Penyidik OJK	0	1	1
Total		8	2	10

Sumber: OJK

Keterangan ahli yang diberikan merupakan kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri dan Kejaksaan RI. Pemberian keterangan ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank.

Halaman ini sengaja dikosongkan

5 Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

5 Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

Pada periode laporan, OJK menerbitkan tiga ketentuan terkait perbankan yaitu dalam bentuk POJK. Selain itu, OJK juga menerbitkan satu Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) terkait dengan Penyesuaian Batas Waktu Penyampaian Laporan Perbankan dan Laporan Debitur melalui SLIK Tahun 2024. OJK juga senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders* antara lain dengan mempercepat proses perizinan terkait kelembagaan perbankan.

1. Pengaturan Perbankan

Pada triwulan I-2024, OJK menerbitkan tiga ketentuan terkait perbankan, yaitu dalam bentuk Peraturan OJK (POJK), antara lain sebagai berikut:

1.1 POJK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat

POJK tersebut merupakan penyempurnaan atas POJK No.33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perekonomian Rakyat yang dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan penyesuaian peraturan mengenai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) serta kegiatan usaha yang diperkenankan sesuai dengan Undang-Undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, ketentuan terkait prinsip kehati-hatian BPR, ketentuan Bank Umum, serta perubahan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.

Dalam POJK ini diatur tentang:

- 1) Penyempurnaan pengaturan mengenai AYDA, termasuk tindak lanjut Kebijakan Khusus AYDA;
- 2) Penambahan pengaturan mengenai kualitas aset produktif berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, serta penyertaan modal;
- 3) Pembentukan cadangan menggunakan *incurred loss concept* (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai);
- 4) Pengelolaan properti terbengkalai; dan
- 5) Penyempurnaan pengaturan mengenai *one obligor concept*.

1.2 POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

POJK ini diterbitkan dalam rangka mewujudkan pilar ke-3 dalam *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah 2023-2027 yaitu Penguatan Karakteristik Perbankan Syariah khususnya untuk strategi Penguatan Tata Kelola Syariah, serta pilar ke-5 mengenai Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Perbankan Syariah khususnya untuk strategi Pengaturan yang Berorientasi pada Ketahanan, Daya Saing dan *Dampak Socio-Economic*, dengan memperhatikan *best practice* dan/atau standar internasional.

Selain itu, POJK ini juga diterbitkan dalam rangka melengkapi *framework* tata kelola di Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang akan mencakup tata kelola umum dan tata kelola syariah.

POJK ini mengatur mengenai penerapan kerangka tata kelola syariah yang diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, penerapan fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, fungsi audit intern syariah, dan pelaksanaan kaji ulang ekstern syariah, pengaturan mengenai laporan pelaksanaan tata kelola syariah, tindak lanjut ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah, dan pemberlakuan ketentuan.

1.3 POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum (POJK Kluster Stabilitas Sistem Keuangan/SSK) diterbitkan dalam rangka harmonisasi dan sebagai tindak lanjut dari amanat pengaturan sebagaimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dalam upaya untuk memperkuat pengawasan bank dan tindak lanjut pengawasan, penanganan permasalahan bank, serta peningkatan koordinasi sesuai kewenangan antarlembaga.

POJK Kluster SSK yang berlaku bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri ini disusun

secara komprehensif dengan memuat empat topik ketentuan utama yaitu: 1) pengkinian mekanisme dan koordinasi antara lembaga dalam penetapan Bank Sistemik; 2) penetapan status dan tindakan pengawasan bank; 3) rencana aksi pemulihan (*recovery plan*); dan 4) pendirian Bank Perantara dalam rangka resolusi bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

1.4 Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP)

Pada triwulan I-2024, OJK juga menerbitkan satu Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) OJK, yaitu:

Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) OJK Nomor S-13/D.03/2024 perihal Penyesuaian Batas Waktu Penyampaian Laporan Perbankan dan Laporan Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Tahun 2024

Menunjuk Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 terdapat kebutuhan relaksasi batas waktu penyampaian laporan bank dan laporan Kantor Akuntan Publik kepada OJK yang jatuh tempo pada masa libur dan cuti bersama.

Pokok – pokok kebijakan antara lain:

- a. Terhadap beberapa laporan bank dilakukan penyesuaian batas waktu penyampaian laporan a.l laporan publikasi suku bunga dasar kredit, laporan KPMM dan ATMR-Bank secara individu, Laporan

liquidity coverage ratio-Bank secara individu, Laporan berkala *bancassurance*, dan Laporan BMPK dan penyediaan dana besar Bank secara individu yang sebelumnya disampaikan maksimal 16 April 2024 disesuaikan menjadi 19 April 2024.

- b. Batas waktu penyampaian laporan kepada OJK selain laporan yang disebutkan sebagaimana di atas tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank dihimbau agar menyampaikan laporan lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan.

dan 301 unit menjadi 90.601 unit terminal perbankan elektronik dan 18.847 unit Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) pada triwulan – I 2024.

2. Kelembagaan Perbankan

2.1 Bank Umum Konvensional (BUK)

2.1.1 Perizinan

Pada triwulan I-2024, telah diselesaikan empat perizinan kelembagaan BUK, terdiri dari satu perizinan pembukaan jaringan kantor wilayah, dua perizinan pemindahan alamat kantor pusat, dan satu perizinan peningkatan status Kantor Cabang Pembantu (KCP) menjadi KC.

2.1.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan I-2024, terdapat 114.500 jaringan kantor BUK, terdiri dari 114.435 jaringan kantor di dalam negeri dan 65 jaringan kantor di luar negeri. Jaringan kantor terbanyak masih didominasi oleh terminal perbankan elektronik (ATM/CDM/CRM) sebanyak 90.601 unit.

Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat pengurangan sebanyak 1.039 jaringan kantor, terutama pada terminal perbankan elektronik (ATM/CDM/CRM) dan Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) yang masing-masing turun sebesar 811 unit

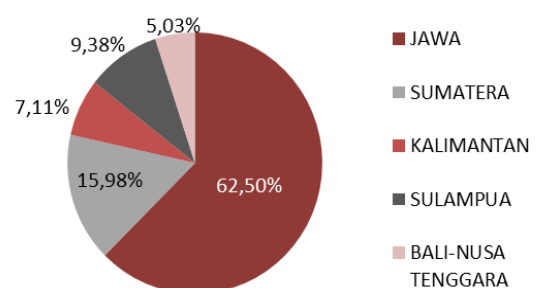
Tabel 27 Jaringan Kantor BUK

JARINGAN KANTOR		2023 TW IV	2024 TW I	Δ
1	Kantor Pusat Operasional	37	37	-
2	Kantor Pusat Non Operasional	53	53	-
3	Kantor Cabang dari bank yang berkedudukan di Luar Negeri (KCBLN)	7	7	-
4	Unit Usaha Syariah	20	18	(2)
5	Kantor Wilayah	152	138	(14)
6	Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2.705	2.629	(76)
7	Kantor Cabang (Luar Negeri)	17	16	(1)
8	Kantor Cabang Pembantu dari bank yang berkedudukan di Luar Negeri	19	19	-
9	Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	19.148	18.847	(301)
10	Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	7	7	-
11	Kantor Fungsional (KF)	1.168	1.165	(3)
12	Kantor dibawah KCP KCBLN yg tidak termasuk KF	9	9	-
13	Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	5	5	-
14	Terminal Perbankan Elektronik (ATM/CDM/CRM)	91.412	90.601	(811)
JARINGAN KANTOR UUS		-	-	-
15	Kantor Cabang (Dalam Negeri)	190	142	(48)
16	Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	236	222	(14)
17	Kantor Kas	-	-	-
18	Kantor Fungsional	189	189	-
19	Payment Point	-	-	-
20	Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung	-	-	-
21	Terminal Elektronik (ATM/CDM/CRM)	165	164	(1)
22	Layanan Syariah Bank Umum	-	231	231
TOTAL		115.539	114.500	(1.039)

Sumber: APOLO OJK

Ket: merupakan jaringan kantor BUK di seluruh Indonesia

Berdasarkan pembagian wilayah untuk jaringan kantor BUK di dalam negeri, sebaran jaringan kantor tersebut sebagian besar berada di pulau Jawa sejumlah 71.521 jaringan kantor (62,50%), diikuti pulau Sumatera 18.289 (15,98%), Sulampua 10.730 (9,38%), Kalimantan 8.134 (7,11%), dan Bali-Nusa Tenggara 5.761 (5,03%). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penurunan jaringan kantor pada seluruh wilayah dengan penurunan terbanyak di wilayah Jawa dan Sumatera.

Grafik 42 Penyebaran Jaringan Kantor BUK

Sumber: APOLO OJK

2.2 Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

2.2.1 Perizinan

Pada triwulan I-2024, terdapat dua jenis permohonan perizinan BPR yang telah disetujui, yaitu permohonan penggabungan dan pencabutan izin usaha, dengan rincian sebagai berikut:

1. Persetujuan penggabungan BPR, yaitu pada:
 - a. PT BPR Rarat Ganda dan PT BPR Tahap Ganda ke dalam PT BPR Tiurganda
2. Pencabutan izin usaha BPR, yaitu pada:
 - a. Koperasi BPR Wijaya Kusuma
 - b. PT BPR Usaha Madani Karya Mulia.
 - c. PT BPR Bank Pasar Bhakti.
 - d. Perumda BPR Bank Purworejo
 - e. PT BPR EDCCASH
 - f. PT BPR Aceh Utara

2.2.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan I-2024, terdapat 1.389 BPR dengan 8.547 jaringan kantor. Dari jaringan kantor tersebut, 6.035 di antaranya merupakan kantor bank yang meliputi Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), dan Kantor Kas (KK). Terdapat perbedaan data perubahan jumlah BPR dengan data perizinan disebabkan antara lain terdapat perbedaan antara periode perizinan dengan periode efektif berlakunya perizinan karena adanya masa proses transisi, termasuk *carry over* hasil perizinan periode sebelumnya.

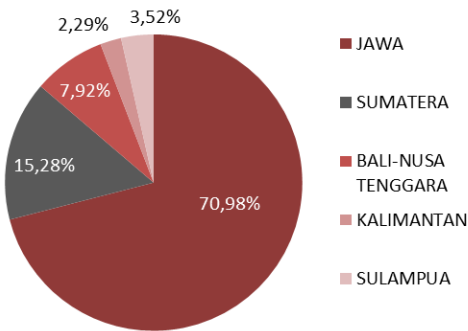
Tabel 28 Jaringan Kantor BPR

JARINGAN KANTOR	2023 TW IV	2024 TW I	Δ
- Kantor Pusat (KP)	1.402	1.389	(13)
- Kantor Cabang (KC)	1.938	1.939	1
- Kantor Kas (KK)	2.707	2.707	-
- ATM	386	390	4
- <i>Payment Point</i>	2.090	2.122	32
TOTAL	8.523	8.547	24

Sumber: OJK

Berdasarkan lokasi, penyebaran jaringan kantor BPR (termasuk ATM dan *payment point*) masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 70,98% (6.067 jaringan kantor), diikuti wilayah Sumatera sebesar 15,28% (1.306 jaringan kantor). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penambahan jaringan kantor hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan terbanyak di wilayah Sumatera, sementara terdapat penurunan jumlah jaringan kantor di wilayah Sulampua serta Bali-Nusa Tenggara.

Grafik 43 Penyebaran Jaringan Kantor BPR



Sumber: OJK

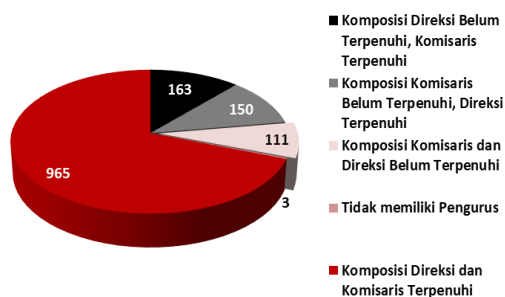
2.2.3 Tata Kelola

Penerapan tata kelola BPR dan BPRS diatur dalam masing-masing POJK Nomor 4/POJK.03/2015 (BPR) dan POJK Nomor 24/POJK.03/2018 (BPRS) dan dibedakan sesuai besaran modal inti. Besaran modal inti BPR dan BPRS akan menentukan antara lain syarat pemenuhan minimal jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan jumlah DPS.

Pada Maret 2024, terdapat 965 BPR yang sudah memenuhi masing-masing jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sementara itu, masih terdapat 111 BPR yang belum memenuhi jumlah anggota keduanya untuk Direksi dan Dewan Komisaris sesuai persyaratan.

Tantangan dalam pemenuhan Direksi dan Dewan Komisaris BPR umumnya dipengaruhi oleh faktor lokasi BPR yang berada di *remote area*, persaingan remunerasi dengan LJK lain, serta keterbatasan SDM yang memiliki persyaratan minimal pengalaman dan sertifikasi profesi sebagaimana dipersyaratkan ketentuan. Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola BPR, OJK juga secara aktif melakukan sosialisasi kepada BPR.

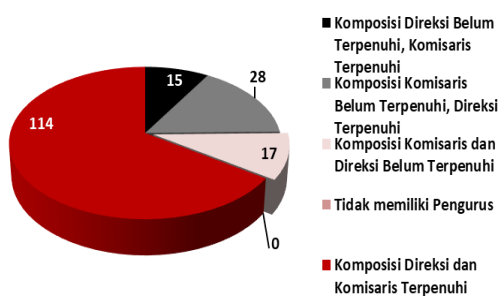
Grafik 44 Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris



Sumber: OJK

Untuk BPRS, sampai dengan Maret 2024, terdapat 114 BPRS yang sudah memenuhi masing-masing jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sementara itu, masih terdapat 17 BPRS yang belum memenuhi jumlah anggota keduanya untuk Direksi dan Dewan Komisaris sesuai persyaratan.

Grafik 45 Jumlah BPRS berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris



Sumber: OJK

2.3 Perbankan Syariah

2.3.1 Perizinan

Pada triwulan I-2024, telah diselesaikan dua permohonan perizinan kelembagaan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), terdiri dari satu pembukaan Kantor Wilayah (Kanwil) dan satu pencabutan izin usaha UUS.

Untuk perizinan BPRS, pada triwulan I-2024 terdapat dua jenis permohonan perizinan BPRS yang telah disetujui, yaitu permohonan perubahan kegiatan usaha PT BPR Rizky Barokah menjadi PT BPR Syariah Rizky Barokah serta pencabutan izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda).

2.3.2 Jaringan Kantor

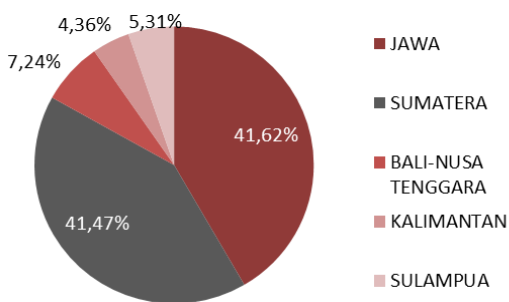
Pada triwulan I-2024, terdapat 6.856 jaringan kantor BUS, dengan tiga di antaranya merupakan jaringan kantor luar negeri (dua KC dan satu terminal elektronik). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, secara total terdapat peningkatan sebanyak 74 jaringan kantor BUS, dengan peningkatan terbanyak pada Kantor Cabang dalam negeri dan terminal elektronik.

Tabel 29 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah

JARINGAN KANTOR	2023 TW IV	2024 TW I	Δ
1 Kantor Pusat Operasional Bank Umum Syariah	7	7	-
2 Kantor Pusat Non Operasional Bank Umum Syariah	7	8	1
3 Kantor Wilayah Bank Umum Syariah	17	21	4
4 Kantor Cabang (Dalam Negeri) Bank Umum Syariah	378	411	33
5 Kantor Cabang (Luar Negeri) Bank Umum Syariah	2	2	-
6 Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) Bank Umum Syariah	1.574	1.580	6
7 Kantor Fungsional Bank Umum Syariah	347	344	(3)
8 Kantor Perwakilan Bank Umum Syariah di Luar Negeri	-	-	-
9 Terminal Elektronik (ATM/CDM/CRM) Bank Umum Syariah	4.450	4.483	33
Layanan Syariah Bank Umum	6.782	6.856	74

Sumber: APOLO OJK

Sebaran jaringan kantor BUS dalam negeri sebagian besar berada di wilayah Jawa dan Sumatera masing-masing memiliki porsi 41,62% (2.852 kantor) dan 41,47% (2.842 kantor). Selanjutnya diikuti Bali-Nusa Tenggara (7,24%, 496 kantor), Sulampua (5,31%, 364 kantor), dan Kalimantan (4,36%, 299 kantor). Terdapat peningkatan jaringan kantor di seluruh wilayah, dengan peningkatan terbanyak pada wilayah Jawa dan Sumatera.

Grafik 46 Penyebaran Jaringan Kantor BUS

Sumber: APOLO OJK

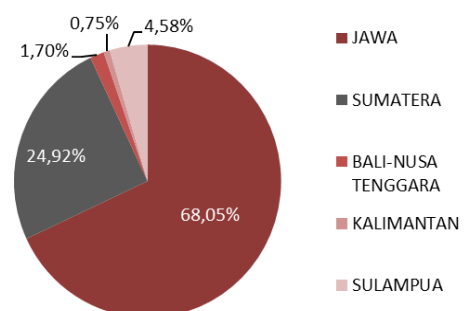
Untuk BPRS, pada periode laporan terdapat 939 jaringan kantor, berkurang lima jaringan kantor dari triwulan sebelumnya.

Lebih lanjut, sebaran jaringan kantor BPRS umumnya terkonsentrasi di wilayah Jawa (68,05%, 639 kantor), diikuti Sumatera (24,92%, 234 kantor), Sulampua (4,58%, 43 kantor), Bali-Nusa Tenggara (1,70%, 16 kantor), dan Kalimantan (0,75%, 7 kantor).

Tabel 30 Jaringan Kantor BPRS

JARINGAN KANTOR	2023 TW IV	2024 TW I	Δ
- Kantor Pusat (KP)	173	174	1
- Kantor Cabang (KC)	219	217	(2)
- Kantor Kas (KK)	301	296	(5)
- ATM	74	71	(3)
- Payment Point	177	181	4
TOTAL	944	939	(5)

Sumber: Laporan Bulanan BPRS, diolah

Grafik 47 Penyebaran Jaringan Kantor BPRS

Sumber: OJK

Halaman ini sengaja dikosongkan

6 Koordinasi Antar Lembaga terkait Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

6 Koordinasi Antar Lembaga Terkait Perbankan

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK terus melakukan koordinasi dengan lembaga/otoritas terkait, baik secara bilateral maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Indonesia pada triwulan I-2024 masih dalam kondisi terjaga, didukung oleh kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan yang stabil. Selain itu, OJK juga turut aktif dalam fora internasional, antara lain *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)*, *Asia-Pacific High-Level Meeting (HLM) on Banking Supervision*, *Working Committee-ASEAN Banking Integration Framework (WC-ABIF)*, dan *Financial Sector Assessment Program (FSAP) Review Indonesia 2023/2024*. Pada periode laporan juga terdapat pengembangan industri perbankan melalui diterbitkannya Panduan *Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS)* untuk mendukung pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia .

1. Koordinasi Multi-Lembaga dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), maka Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melakukan koordinasi secara berkala

dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan.

Pada Selasa, 30 April 2024, Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner LPS melaksanakan Rapat Berkala KSSK II tahun 2024. Dalam siaran Pers KSSK tersebut disimpulkan bahwa, **Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Indonesia pada triwulan I-2024 masih dalam kondisi terjaga, didukung oleh kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan yang stabil.** Namun, terdapat peningkatan ketidakpastian dan gejolak geopolitik global yang mendorong peningkatan tekanan di pasar keuangan global dan domestik. OJK bersama dengan KSSK akan terus melakukan asesmen *forward looking* atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan terkini seiring risiko ketidakpastian ekonomi global yang meningkat serta gejolak geopolitik dunia yang eskalatif.

Dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan meningkatkan peran sektor jasa keuangan bagi pertumbuhan ekonomi

nasional, OJK mengambil langkah kebijakan sebagai berikut:

- 1) OJK akan tetap mencermati perkembangan risiko pasar LJK dan juga pembiayaan ke sektor-sektor yang memiliki eksposur tinggi terkait dampak peningkatan ketegangan geopolitik di Timur Tengah, termasuk mencermati kondisi individual LJK. Di samping itu, OJK terus melakukan pengawasan secara optimal untuk memastikan bahwa risiko nilai tukar maupun suku bunga terhadap masing-masing LJK dapat termitigasi dengan baik;
- 2) Seiring dengan aktivitas ekonomi yang membaik pasca-pandemi dan semakin menurunnya kebutuhan atas kebijakan restrukturisasi kredit yang tercermin dari jumlahnya yang terus menurun, maka OJK mengakhiri kebijakan relaksasi yang diberikan untuk memitigasi scarring effect pandemi, termasuk kebijakan restrukturisasi kredit akibat dampak lanjutan Covid-19 untuk industri perbankan dan perusahaan pembiayaan sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya. Berakhirnya kebijakan ini diperkirakan tidak berdampak signifikan bagi stabilitas sektor jasa keuangan mengingat industri jasa keuangan telah membentuk pencadangan di level yang memadai;
- 3) Untuk mendukung terlaksananya penguatan pengawasan dan penanganan permasalahan Bank melalui respons kebijakan yang tepat, relevan, dan tepat waktu dalam rangka meningkatkan daya saing perbankan nasional serta menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK menerbitkan perubahan POJK mengenai Penetapan Status

Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum. OJK juga telah menerbitkan POJK Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka;

- 4) Dalam upaya mewujudkan industri perusahaan pembiayaan yang sehat, kuat, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, OJK telah meluncurkan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan (PP) periode 2024-2028;
- 5) Saat ini OJK sedang melakukan proses pendaftaran bagi Penyelenggara ITSK dari klaster model bisnis *Innovative Credit Scoring* (ICS) yang telah ditetapkan untuk diatur dan diawasi oleh OJK sebagai tindak lanjut implementasi POJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK); dan
- 6) Selain itu, OJK sedang merumuskan kebijakan terkait penerapan *Artificial Intelligence* (AI) di sektor keuangan termasuk sektor ITSK. OJK berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga dan asosiasi di sektor ITSK terkait dengan penerapan AI dan *Generative AI* dalam mengoptimalkan inovasi di ekosistem sektor keuangan.

OJK berkomitmen untuk mengeluarkan kebijakan yang dibutuhkan LJK dan para pelaku pasar secara tepat waktu terutama untuk memitigasi peningkatan ketidakpastian ke depan.

KSSK berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dalam mengantisipasi risiko ketidakpastian ekonomi global dan potensi ketegangan geopolitik dunia yang eskalatif terutama rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik, termasuk memperkuat *coordinated policy response* dan kewaspadaan untuk memitigasi berbagai risiko bagi perekonomian dan SSK.

Dengan telah diundangkannya UU P2SK, Pemerintah, BI, OJK, dan LPS berkomitmen untuk menyelesaikan perumusan peraturan pelaksanaan amanat UU P2SK secara kredibel dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pelaku industri keuangan dan masyarakat.

KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala pada bulan Juli 2024.

2. Koordinasi Bilateral

2.1. OJK dan BI

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) mengamanatkan OJK dan BI untuk berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing Lembaga. Amanat UU dimaksud ditindaklanjuti dengan Nota Kesepahaman (NK) antara Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisiner OJK. Pada triwulan I-2024, OJK dan BI telah melakukan beberapa koordinasi antara lain terkait:

- 1) Pembahasan dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Koordinasi dan Kerjasama BI dan OJK pada Maret 2024;
- 2) Pelaksanaan dan pembahasan isu-isu terkait pertukaran data dan/atau informasi;

- 3) Evaluasi pemeriksaan bank tahun 2023 dan rencana pemeriksaan bank pada tahun 2024;
- 4) Pemantauan pencapaian realisasi dan target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi bank umum;
- 5) Pembahasan rencana bisnis bank tahun 2024 sampai dengan tahun 2026;.
- 6) Pembahasan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama mengenai koordinasi dalam rangka pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) pada Februari 2024;
- 7) Pembahasan dan penyampaian tanggapan tertulis dalam rangka penerbitan peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan oleh kedua lembaga; dan
- 8) Sosialisasi ketentuan terkait sektor perbankan.

2.2. OJK dan LPS

Sesuai dengan amanat UU PPKSK serta bentuk respons atas diterbitkannya UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, terdapat beberapa aspek kerjasama dan koordinasi antara OJK dan LPS yang memerlukan koordinasi yang lebih intensif sesuai dengan Nota Kesepahaman (NK) antara OJK dan LPS.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada triwulan I-2024 telah dilaksanakan beberapa koordinasi antara OJK dan LPS yaitu:

- 1) Pertukaran data dan pengkinian kondisi Bank Umum maupun BPR/BPRS;
- 2) Persiapan dan pelaksanaan resolusi BPR/BPRS;

- 3) Pembahasan rencana pengembangan aplikasi Laporan Keuangan Tahunan BPR/BPRS;
- 4) Pembahasan rencana pengembangan sistem IT untuk peningkatan pengawasan BPR/BPRS;
- 5) Penyampaian tanggapan tertulis dalam rangka penerbitan rancangan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) Diskusi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kedua lembaga.

OJK, BI dan LPS juga melakukan koordinasi dalam hal pemutakhiran Bank Sistemik untuk periode April s.d. Oktober 2024. Selain itu, ketiga Lembaga tersebut bekerja dalam hal pembahasan perpanjangan NK BI, OJK, dan LPS mengenai Pembangunan dan Pemeliharaan Integrasi Pelaporan di Sektor Perbankan.

3. Partisipasi OJK dalam Fora Internasional

3.1. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)

OJK merupakan anggota BCBS dan terlibat aktif dalam berbagai pembahasan baik di BCBS Level 1 maupun *Groups* BCBS di Level 2 dan Level 3 yaitu *Supervisory Cooperation Group* (SCG), *Policy and Standard Group* (PSG), *Risk and Vulnerability Assessment Group* (RVG), *Task Force on Climate-related Financial Risk* (TCFR), *Accounting and Audit Expert Group* (AAEG), dan *Financial and Technology Group* (FTG). Pada Triwulan I-2024, OJK aktif berpartisipasi dalam menghadiri berbagai pertemuan dan menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- 1) *BCBS Committee*
Pertemuan *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) *meeting* pada 21 – 22 Februari 2024 di Madrid, Spanyol yang membahas *exchange of views on market and supervisory developments*, finalisasi terhadap revisi *basel core principles*, *G-SIBs framework*, implementasi *Basel III reforms*, *climate-related financial risks*, persetujuan rencana kerja *Risk and Vulnerability Assessment Group* (RVG) dan *Task Force on Climate-related Financial Risk* (TCFR), *disclosure dan data collection*, serta menjajagi rencana kerja terkait *Central Bank Digital Currencies* (CBDC).
- 2) *Policy and Standard Group* (PSG)
Pertemuan pada tanggal 7 Februari 2024 secara virtual, yang antara lain membahas *exchange of views on recent development*, terutama mengenai isu kegagalan bank di Amerika Serikat, asesmen terhadap kerangka *G-SIBs*, dan implementasi *Basel III reforms*.
- 3) *Risk and Vulnerability Assessment Group* (RVG)
Pertemuan virtual pada tanggal 21 Maret 2024 dengan topik pembahasan hasil survei kepada anggota atas risiko perbankan di masing-masing yuridiksi, diskusi terkait risiko atas penerapan *Generative AI*, hasil pendalaman atas risiko *interconnectedness* antara bank dengan IKNB, dan hasil pendalaman untuk meningkatkan komparabilitas hasil *global stress test*.

4) *Supervisory and Cooperation Group (SCG)*

- a. Pertemuan *hybrid* pada 24-25 Januari 2024 yang dilaksanakan di Singapura membahas mengenai pertukaran informasi perkembangan isu pengawasan perbankan, *update* dari *joint task force* SCG-PSG terkait industri keuangan non-bank, *stocktaking* isu terkait risiko likuiditas, *update* pekerjaan terkait risiko kredit, pengawasan *Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)*, *Business Model Analysis*, *Booking Models*, dan tindak lanjut atas pekerjaan terkait *supervisory judgement and effectiveness*.
- b. Pertemuan virtual pada 14 Maret 2024 yang membahas mengenai pemantauan risiko ekonomi dan keuangan yang berdampak pada pengawasan bank, referensi indikator pemantauan risiko likuiditas, *review high level* untuk dokumen *Principles for the Management of Credit Risk* dan mitigasi risiko atas kerja sama antara bank dengan IKNB.

5) *Task Force on Climate-related Financial Risk (TFCR)*

- a. Pertemuan virtual pada 22 Januari 2024 dengan topik pembahasan *update* mengenai risiko materialitas dan konsentrasi terkait iklim terhadap bank, *update* terkait rencana transisi, dan pemaparan memaparkan tinjauan literatur mengenai dampak risiko terkait perubahan iklim terhadap bank yang diterbitkan sebagai makalah

BIS di Desember 2023 dilanjutkan dengan penyajian publikasi IMF terkait "*Data for a greener world*".

- b. Pertemuan *hybrid* pada 26-27 Maret 2024 yang dilaksanakan di Rio de Janeiro, Brazil dengan mengundang perwakilan industri (antara lain lembaga pemeringkat seperti *Fitch* dan *S&P*, asosiasi bank internasional seperti *American Bankers Association*, serta auditor seperti *EY* yang membahas tujuan & interoperabilitas kerangka *Pilar 3* untuk risiko keuangan terkait iklim, metrik kualitatif dan kuantitatif dalam mengukur dampak risiko iklim terhadap bank, serta pengungkapan atas *forecasting* yang dilakukan bank untuk menilai risiko konsentrasi.

6) *Financial and Technology Group (FTG)*

Pertemuan virtual FTG pada 26 Maret 2024 yang membahas perkembangan isu-isu terkini (*horizon scanning discussion*) seperti ancaman *malware*, regulasi terkait *open banking / open finance* di AS dan Uni Eropa, potensi risiko *digital fraud* dari penggunaan kecerdasan buatan *Sora* yang dibikin oleh *OpenAI*, dan *draft analytical report on the digitalisation on finance* yang akan diterbitkan oleh BCBS pada Triwulan II 2024. Laporan ini akan berisi hasil survei dari setiap yurisdiksi BCBS yang menanyakan penggunaan teknologi di sektor perbankan, bagaimana bank memitigasi risikonya, model bisnis bank yang beroperasi secara digital, regulasi atau peraturan terkait, dan tantangan pengawasan

terhadap penggunaan teknologi seperti API dan *cloud computing* oleh bank.

7) *Accounting and Audit Expert Group (AAEG)*

Pertemuan virtual pada 20 Februari 2024 yang membahas rencana kerja AAEG untuk tahun 2024, permintaan tanggapan oleh *International Accounting Standards Board (IASB)* terkait perubahan IAS 32, IFRS 7, dan IAI khususnya terkait *Financial Instruments with Characteristics of Equity (FICE)*, *stance* AAEG terhadap revisi ISA 240 mengenai *The Auditor's Responsibilities relating to Fraud in an Audit of Financial Statements*.

3.2. Asia-Pacific High-Level Meeting (HLM) on Banking Supervision

Pertemuan tahunan ini merupakan HLM ke-18 yang diselenggarakan secara bersama-sama oleh *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)*, *Financial Stability Institute (FSI) of the Bank for International Settlements (BIS)*, dan *Executives' Meeting of East Asia-Pacific Central Banks Working Group on Banking Supervision (EMEAP WGBS)*.

Pada tahun ini pertemuan dihadiri oleh perwakilan Gubernur Bank Sentral dan Pimpinan Otoritas Pengawasan Sektor Jasa Keuangan, antara lain Australia, China, Eropa, Hong Kong, India, Jepang, Korea, Makau, Malaysia, Nepal, New Zealand, Pakistan, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Swiss, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam.

Dalam pertemuan ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) mewakili OJK sebagai panelis dalam sesi berjudul *"The 2023 banking turmoil and lessons for bank*

regulation and supervision". Sejalan dengan penerbitan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, KEPP menekankan bahwa bank harus terus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan prinsip-prinsip kehati-hatian. KEPP mendorong adanya penguatan manajemen Bank dan memberikan kerangka kerja regulasi yang lebih jelas tentang perilaku dan kewenangan Pemegang Saham Pengendali Bank. PSP Bank diwajibkan untuk mendukung kegiatan bisnis yang sehat dan kompetitif serta manajemen Bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, sambil juga mempromosikan implementasi budaya risiko yang efektif.

3.3. Working Committee – ASEAN Banking Integration Framework (WC-ABIF)

OJK bersama Bank Indonesia (BI) dan *State Bank of Vietnam (SBV)* menjadi ketua bersama (Co-chairs) WC-ABIF periode 2022-2024 hingga pertemuan ke-15 WC-ABIF yang telah dilaksanakan pada 22 Februari 2024 di Laos. Pada pertemuan tersebut, Co-chair OJK memimpin jalannya pertemuan untuk membahas *ABIF review progress* yang bersifat *multi years*. Co-chairs WC-ABIF periode 2022-2024 terus melanjutkan proses penyempurnaan *ABIF Guidelines* sesuai dengan *timeline* yang disepakati.

Pada pertemuan ke-15 WC-ABIF, OJK telah berkoordinasi dengan BI menyampaikan hasil *mini-survey on ABIF review guideline* yang memuat pandangan dari ASEAN *Member State (AMS)* terkait konsep *new ABIF* yang akan dikembangkan ke depannya. AMS melihat bahwa konsep *new ABIF* yang mengedepankan digitalisasi layanan

Perbankan yang bersifat lintas batas merupakan alternatif utama penguatan integrasi keuangan di kawasan. Namun di sisi lain, perbedaan kerangka pengaturan antar AMS menjadi salah satu tantangan utama. Oleh sebab itu, AMS sepakat untuk mempersiapkan *regulatory coherence* antar anggota sebagai pondasi awal implementasi *new* ABIF. Selain itu, pada pertemuan ke-15 WC-ABIF *Co-chair* OJK juga menyampaikan transisi peralihan kepemimpinan kepada *Co-chairs* baru, yaitu Malaysia dan Kamboja. Hasil pertemuan dimaksud akan dipresentasikan dalam *Senior Level Committee* (SLC) pada Triwulan II 2024 untuk dapat memperoleh persetujuan dan arahan lebih lanjut.

3.4. Financial Sector Assessment Program (FSAP) Review Indonesia 2023/2024

Financial Sector Assessment Program (FSAP) merupakan suatu program bersama antara IMF dan World Bank yang dimulai pada tahun 1999 untuk menganalisis secara komprehensif dan mendalam mengenai sektor keuangan suatu negara. FSAP dilakukan sebagai respon atas krisis keuangan pada tahun 1990an untuk menilai sistem keuangan mengingat bahwa kondisi kesehatan dan fungsi sektor keuangan suatu negara akan mempengaruhi perekonomian negara tersebut dan dapat berimbas pada kinerja sektor keuangan dan ekonomi negara lain. Bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan global, FSAP dibangun sebagai suatu mekanisme untuk: (i) mengidentifikasi kekuatan dan kerentanan sistem keuangan suatu negara untuk mengurangi krisis; (ii) menentukan bagaimana sumber-sumber risiko utama dikelola; (iii) memastikan pengembangan dan *technical assistance*

yang dibutuhkan di sektor keuangan, dan (iv) membantu memprioritaskan respons kebijakan. Indonesia, sebagai anggota G20 dan salah satu *systemically important financial sector* (SIFS), wajib menjalani FSAP setiap 5 tahun sekali oleh IMF dan World Bank. Sebelumnya, Indonesia sudah menjalani FSAP sebanyak 2 kali yaitu pada 2009/2010 dan 2016/2017.

FSAP Indonesia 2023/2024 meliputi 16 area asesmen yang terbagi dalam dua kunjungan, yaitu *First Mission* (sudah dilaksanakan pada tanggal 20 September s.d. 16 Oktober 2023) dan *Second (Main) Mission*. Pelaksanaan *Second Mission* terbagi menjadi dua kunjungan (*visit*), yaitu *1st visit* pada 22 Januari s.d. 6 Februari 2024 dan *2nd visit* pada 5 s.d. 18 Maret 2024.

First Mission melakukan asesmen terhadap delapan area, yaitu: i) *Banking supervision and regulation: Basel core principles* (BCP) dan *Core principles for islamic finance regulation* (CPIFR); ii) *Systemic liquidity management* (SLM); iii) *Financial safety nets and crisis management* (FSN-CM); iv) *Systemic risk analysis/stress-test* (ST); v) *Longterm finance and capital markets development* (LTF); vi) *Climate-related and environmental risks and opportunities* (CERO); vii) *Payment systems* (RTGS); dan viii) *Non-payment system financial market infrastructures* (BI-SSSS). OJK terlibat pada hampir seluruh area, kecuali RTGS dan BI-SSSS.

Pada *Second Mission*, OJK telah menanggapi kuesioner serta permintaan data dan informasi pada delapan area asesmen, yaitu: i) *Corporate Sector Analysis*; ii) *Macroprudential Policy*; iii) *Capital Market Oversight* (IOSCO); iv) *Insurance Oversight*

and Pension Fund; v) Market Conduct Overview; vi) Financial Infrastructure/Access to Finance; vii) Role of the State; dan viii) Fintech and Financial Digitalization.

Selama TW 1 2024 yang beriringan dengan agenda FSAP *Second Mission*, OJK melakukan diskusi di area lain yang meliputi *macroprudential policy* dan *systemic risk analysis* atau *stress testing*, dan *climate change physical risk and transition risk analysis*. Selain itu, OJK juga melakukan diskusi intensif dengan tim asesor untuk memfinalisasi *Detailed Assessment Report* (DAR) FSAP BCP yang akan dipublikasikan di *website* IMF dan *World Bank*.

Seluruh rangkaian pertemuan dan penilaian untuk FSAP Indonesia tahun 2023-2024 ditutup pada pertemuan tim asesor FSAP dengan pimpinan OJK, Kemenkeu, BI, LPS pada 18 Maret 2024.

4. Pengembangan Industri Perbankan

4.1 Penerbitan Panduan *Climate Risk Management and Scenario Analysis* (CRMS)

Pada tanggal 4 Maret 2024, OJK terus mewujudkan dukungan nyata terhadap pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia, salah satunya dengan penerbitan Panduan *Climate Risk Management and Scenario Analysis* (CRMS) sebagai bentuk dukungan kebijakan dari OJK untuk pengelolaan risiko perubahan iklim.

CRMS merupakan kerangka terpadu yang meliputi aspek tata kelola, strategi, manajemen risiko, dan pengungkapan untuk menilai ketahanan model bisnis dan strategi bank dalam menghadapi perubahan iklim

dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Panduan CRMS ini terdiri atas enam buku, dimana keenam buku dalam Panduan CRMS ini merupakan satu kesatuan yang saling mendukung. Buku pertama merupakan kerangka manajemen risiko iklim yang didukung dengan lima buku lainnya yaitu mengenai:

- 1) Panduan teknis pengukuran risiko iklim;
- 2) Metodologi perhitungan emisi karbon;
- 3) Data pendukung potensi risiko fisik Indonesia;
- 4) Data pendukung proyeksi makroekonomi Indonesia; dan
- 5) Penyusunan Panduan CRMS telah memperhatikan *common practice* dan standar internasional yang disesuaikan dengan konteks Indonesia dan kepentingan nasional.

Panduan CRMS dilatarbelakangi oleh berbagai faktor antara lain kerentanan geografis Indonesia, perkembangan komitmen global, dan standar internasional terkait isu perubahan iklim khususnya pada sektor perbankan. Sejalan dengan arah kebijakan global tersebut, beberapa negara di dunia juga telah menginisiasi penerapan manajemen risiko iklim kepada perbankan dan industri keuangan lainnya. Untuk memperkuat penerapan manajemen risiko iklim, OJK telah memberikan mandat integrasi risiko iklim di sektor perbankan melalui penerbitan POJK No. 17/2023 tentang Tata Kelola Bank Umum yang mengatur kewajiban penerapan risiko iklim pada aspek tata kelola, strategi, dan manajemen risiko perbankan.

Penyusunan Panduan CRMS telah memperhatikan *common practice* dan

standar internasional yang disesuaikan dengan konteks Indonesia dan kepentingan nasional. Dengan adanya standardisasi kerangka manajemen risiko iklim, penetapan skenario dan kerangka metodologi yang seragam, serta didukung sumber data dan referensi, panduan CRMS diharapkan dapat membantu bank dalam mengukur dampak iklim pada kinerja dan keberlanjutan bisnisnya. Tentunya panduan CRMS ini akan bersifat *living document* yang akan diperbarui secara berkala sesuai dengan *global policies direction*, praktik terbaik di industri keuangan dan tuntutan *stakeholders*.

Pada tahap implementasi awal CRMS, OJK akan melakukan *pilot project* CRMS pada Juli 2024 untuk 18 bank besar dengan Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 3 dan 4. Hasil dari *piloting* tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran dampak iklim pada kinerja keuangan perbankan sebagai dasar *Regulatory Climate Impact Studies* untuk Perbankan Indonesia.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Lampiran

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN I

Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko

No.	Nama	Rumus
Indikator Kinerja Perbankan		
1.	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	$\frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}}$
2.	<i>Return on Asset (ROA)</i>	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata – rata Total Aset}}$
3.	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	$\frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}}$
4.	<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
5.	<i>Net Operation Margin (NOM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Operasional Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
6.	<i>Cash Ratio (CR)</i>	$\frac{\text{Total Alat Likuid}}{\text{Total Hutang Lancar}}$
Risiko Kredit		
7.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Gross</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
8.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Net</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah – CKPN atas Kredit/Pby Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
9.	Rasio <i>Loan at Risk (LaR)</i>	$\frac{\text{Restru Kredit kol. 1 + Kredit kol. 2 + Kredit NPL}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
Risiko Pasar		
10.	Rasio PDN	$\frac{\text{Posisi Devisa Netto}}{\text{Total Modal}}$
11.	Rasio <i>Interest Risk Rate in the Banking Book (IRRBB)</i>	$\frac{\text{Kewajiban Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}{\text{Aset Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}$
Risiko Likuiditas		
12.	<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	$\frac{\text{Total Kredit kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
13.	<i>Finance to Deposit Ratio (FDR)</i>	$\frac{\text{Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
14.	AL/DPK	$\frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
15.	AL/NCD	$\frac{\text{Alat Likuid}}{30\% \text{ Tabungan} + 30\% \text{ Giro} + 10\% \text{ Deposito}}$
16.	<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i>	$\frac{\text{High Quality Liquid Assets (HQLA)}}{\text{Net Cash Outflow (NCO)}}$
17.	<i>Net Stable Funding Ratio (NSFR)</i>	$\frac{\text{Available Stable Funding (ASF)}}{\text{Required Stable Funding (RSF)}}$

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN II**GLOSSARY**

Istilah	Keterangan
A	
Aktivitas Bank	Jasa yang disediakan oleh Bank kepada nasabah (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
AL/DPK	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid ($AL = \text{Final Excess Reserve} + \text{Kas} + \text{Penempatan pada BI lainnya} + \text{Reserve Repo}$) terhadap Dana Pihak Ketiga ($DPK = \text{Tabungan} + \text{Giro} + \text{Deposito}$). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> $AL/DPK > 10\%$.
AL/NCD	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid terhadap <i>Non Core Deposit</i> ($NCD = 30\% \text{ Tabungan} + 30\% \text{ Giro} + 10\% \text{ Deposito}$). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> $AL/NCD > 50\%$.
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	Jumlah aset dalam neraca yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan yang berlaku. Komponen ATMR dibagi menjadi tiga, yaitu: ATMR Kredit, ATMR Operasional, dan ATMR Pasar.
B	
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	Pengukuran efisiensi yang diukur dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional.
C	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	Penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan.
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	Rasio kecukupan modal yang diperoleh dari perhitungan $(\text{modal}/\text{ATMR}) \times 100\%$, dengan <i>threshold</i> yang ditetapkan oleh BIS (<i>Bank for International Settlements</i>) sebesar minimal 8%.
<i>Cash Ratio</i> (CR)	Perbandingan antara alat likuid terhadap utang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah. (POJK No.19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS).
<i>Concentration Ratio</i> (CR)	<i>Concentration Risk</i> digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi pada sejumlah entitas. Dalam hal ini, pengukuran pada perbankan diukur melalui total aset.

Istilah	Keterangan
D	
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.
Deposito	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
F	
<i>Fair Value Through Other Comprehensive Income (FVTOCI)</i>	Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai "tersedia untuk dijual" diakui dalam pendapatan komprehensif lain.
<i>Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)</i>	Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan atau liabilitas keuangan, yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
G	
Giro	Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
Giro Wajib Minimum (GWM)	Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. (PBI No.19/6/PBI/2017)
I	
<i>Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)</i>	Risiko suku bunga pada aset di <i>banking book</i> , atau risiko yang ada saat ini atau yang akan datang terhadap permodalan dan penghasilan bank yang timbul dari pergerakan suku bunga yang memengaruhi posisi <i>banking book</i> pada bank.
K	
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMU)	Kewajiban bank umum untuk menyediakan modal minimum sebesar persentase tertentu dari aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana ditetapkan oleh OJK (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum)
KUR (Kredit Usaha Rakyat)	Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup (Permenko No.11 Tahun 2017).

Istilah	Keterangan
L	
Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	Kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi (POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif).
Lembaga Jasa Keuangan (LJK)	Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)	Merupakan unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Kaitannya dengan pemerintah, LNPRT merupakan mitra dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti penegakan hukum, perlindungan konsumen, pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup. Contoh: Ormas, LSM, Lembaga Keagamaan. Sumber: BPS
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.
<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i>	Merupakan salah satu standar perhitungan risiko likuiditas bank. LCR merupakan perbandingan antara <i>High Quality Liquid Asset</i> (HQLA) dengan total arus keluar bersih (<i>Net Cash Outflow/NCO</i>) selama 30 hari kedepan dalam scenario stress. Kelompok Bank yang wajib menerapkan LCR adalah BUKU 3, BUKU 4, dan Bank yang dimiliki Asing baik KCBA maupun <i>Local entity</i> (Non KCBA). LCR ditetapkan paling rendah sebesar 100%. (POJK Nomor 42/POJK.03/2015)
<i>Loan at Risk (LaR)</i>	<i>Loan at Risk (LaR)</i> merupakan indikator risiko atas kredit yang disalurkan yang terdiri atas kredit kolektibilitas 1 (kualitas Lancar) yang telah direstrukturisasi, kolektibilitas 2 (kualitas Dalam Perhatian Khusus), serta kredit bermasalah atau <i>Non Performing Loan (NPL)</i> .
<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	Rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank (PBI No.15/15/PBI/2013).
M	
Modal Inti	Komponen permodalan yang terdiri dari modal inti utama (<i>Common Equity Tier 1</i>) dan modal inti tambahan (<i>Additional Tier 1</i>). Modal inti utama termasuk didalamnya modal disetor, cadangan tambahan modal, <i>minority interest</i> hasil konsolidasi, faktor pengurang CET 1, kekurangan modal, serta eksposur sekuritisasi. Sementara

Istilah	Keterangan
	modal inti tambahan diantaranya saham preferen, surat berharga dan pinjaman subordinasi, dan komponen lainnya (sesuai ketentuan BASEL III) (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
<i>Mudharabah</i>	Perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).
N	
<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	Merupakan indikator rentabilitas bank yang didapat dari rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap rata-rata Total Aset Produktif (SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011).
<i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR)	Rasio Pendanaan Stabil Bersih atau NSFR adalah perbandingan antara Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF) dengan Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF). NSFR ditujukan untuk mengurangi risiko likuiditas terkait sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang. NSFR ditetapkan paling rendah 100%. (POJK No. 50/POJK.03/2017)
<i>Non Performing Loan/Finance</i> (NPL) atau (NPF), Kredit/Pembiayaan Bermasalah	Kredit/pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
P	
<i>Pembiayaan Istishna'</i>	Pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>Pembiayaan Mudharabah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dengan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>Pembiayaan Murabahah</i>	Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)

Istilah	Keterangan
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Qardh</i>	Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pendanaan Non Inti	Pendanaan yang menurut Bank relatif tidak stabil atau cenderung tidak mengendap di Bank baik dalam situasi normal maupun krisis, meliputi: (1) dana pihak ketiga yang jumlahnya di atas Rp2 miliar; (2) seluruh transaksi antar Bank; dan (3) seluruh pinjaman (<i>borrowing</i>) tetapi tidak termasuk pinjaman subordinasi yang termasuk komponen modal. (SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum)
Posisi Devisa Neto (PDN)	Selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. (PBI No.6/20/PBI/2004 Perubahan Atas PBI Nomor 5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum)
Produk Bank	Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank. Produk dimaksud adalah produk yang diciptakan, diterbitkan, dan/atau dikembangkan oleh Bank yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
R	
Rencana Bisnis Bank (RBB)	Dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha bank jangka pendek dan jangka menengah, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
<i>Return on Asset</i> (ROA)	Salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis.
Risiko Nilai Tukar	Risiko nilai tukar terkait dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat perubahan nilai tukar terhadap posisi portofolio bank. Risiko nilai tukar berasal dari dampak pergerakan nilai tukar terhadap portofolio valas bank baik di sisi aset maupun kewajiban.

Istilah	Keterangan
Risiko Operasional	Penilaian risiko operasional bank mencakup penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko operasional. Hasil penilaian risiko operasional digunakan antara lain sebagai dasar untuk menetapkan strategi dan tindakan pengawasan terhadap risiko operasional bank. Risiko inheren operasional pada perbankan dievaluasi atas dasar karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, <i>fraud</i> , serta kejadian eksternal.
Risiko Pasar	Potensi kerugian yang dihadapi sebagai akibat pergerakan dalam harga pasar baik berupa nilai tukar maupun suku bunga.
Risiko Suku Bunga	Risiko kerugian pada posisi keuangan (neraca dan rekening administratif) akibat dari perubahan suku bunga yang dapat terekspose pada instrumen keuangan yang dikategorikan sebagai <i>trading book</i> maupun <i>banking book</i> .
T	
Tabungan	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)

Halaman ini sengaja dikosongkan



Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan
Menara Radius Prawiro, Gedung A, Lantai 10
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat
Telp: 021-29600000
e-mail: dsapi@ojk.go.id

